# **BAB IV**

# HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

#### 4.1.1. Profil Media Online Detik.com

# detikcom

Gambar 4.1 Logo Profil Media Online Detik.com

Sumber: (Detik.com, 2021)

Nama Perusahaan : PT. Trans Coorporation

Nama Usaha : Detik.com

Alamat Redaksi : Gedung Transmedia - Gedung Transmedia Lantai-

8-9 Kapten Tendean Cab. 12-14A, Jakarta Selatan,

12790

Telp : (021) 7918 7722

Fax : (021) 7918 7727

Email : redaksi@detik.com

Direktur Konten : Alfito Deannova Ginting

Pemimpin Redaksi : Alfito Deannova Ginting

Wakil Pemimpin Redaksi : Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno

Redaktur Pelaksana : Fajar Pratama (Detiknews), Angga Aliya ZRF

(Detikfinance), Kris Fathoni Wibowo, Nugraha

Rodiana (Detiksport), Fitraya Ramadhanny

(Detikinet), AN UyungPramudiarja (Detikhealth),

Eny Kartikawati (Wollpop), Odilia Winneke

(Detikfood), Dadan Kuswaraharja (Detiktravel),

Doni Wahyudi (Detikotomotif), Irwan Nugroho

(DetikX), Dikhy Sasra (Detikfoto), Gagah Wijoseno

(20Detik)

Redaktur Bahasa : Habib Rifai, Hadi Prayuda, Heru Yulistiyan

Kepemilikian media Detik.com dan orientasi bisnisnya yakni media milik swasta dengan orientasi profit (Adam, 2018). Detik.com menyelenggarakan presentasi mockup online pertamanya dan memberikan presentasi lengkap pada 9 Juli 1999. Didirikan oleh empat jurnalis berpengalaman, Budiono Darsono (mantan jurnalis detik) dan Yayan Sophian (mantan jurnalis). (Dalam hitungan detik), Abdul Rahman (mantan jurnalis detik, reporter Tempo) dan Didi Nugraha. Awalnya, detik.com fokus pada liputan politik, bisnis, dan teknologi informasi, tetapi setelah orde baru, liputan ini meluas ke berita olahraga dan hiburan (Irvan, 2020).

Pada 3 Agustus 2011, anak perusahaan CT Corp Chairul Tanjung, PT Trans Corporation, mengakuisisi detik.com (PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom)) senilai US\$ 60 juta kemudian US\$ 540 miliar (Irvan, 2020, hlm.57). Saat ini, detik.com berkembang untuk memiliki saluran berita untuk setiap grup: detik.news, detiksport, detikoto, detikhot, detiknet, detikfinance, detikfood, detikhealth, detiktravel, 20detik, dan Wollipop.

# 4.1.2. Profil Media Online Mongabay.co.id



Gambar 4.2 Logo Profil Media Online Mongabay.co.id

Sumber: (Mongabay.co.id, 2022)

Nama Perusahaan : Mongabay

Alamat Redaksi : 1259 El Camino Real #150

Menlo Park, CA, 94025

Telp : (650) 260-4018

Email : @mongabayindonesia.co.id

Program Manager : Ridzki R. Sigit

Editor Lama : Nur R. Fajar Sapariah Saturi, dan Rahmadi Rahmad

Koordinator Sosial Media : Akhyari Hananto

Kepemilikian media Mongabay dan orientasi bisnisnya yakni bersifat independen yang membicarakan khusus tentang lingkungan dengan orientasi non-profit (Neme, 2012). Sejak 1999, Mongabay.com Media telah berkembang menjadi salah satu situs online berbasis internet terbesar untuk berita, analisis, dan informasi lingkungan. Mongabay.com dikunjungi oleh lebih dari 2 juta pengunjung setiap bulannya. Selain itu, website ini lebih fokus kepada berorientasi lingkungan yang paling banyak dikunjungi di internet dibandingkan dengan website lain (Utami, 2015, p. 27).

Mongabay.com ditampilkan di San Francisco Chronicle atau *Time Magazine, "Wall Street Journal"* atau majalah internasional. Mongabay.com diakui oleh individu dari berbagai institusi sebagai sumber informasi penting dan terpercaya tentang hutan. saya. Baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Pada tahun 2008, Majalah *Time* menyebut Mongabay.com sebagai salah satu dari 15 *website* "hijau" teratas. Manado Post adalah jaringan media terbesar di Sulawesi Utara dan pemimpin pasar surat kabar lokal di dan sekitar Manado (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara). Pernah dinominasikan untuk Penghargaan Komunikator Perubahan Iklim Tahun 2010 oleh *Universitas George Mason* (Violleta, 2021, p. 33).

Mongabay.com saat ini sedang memperluas cakupan hutannya. Inisiatif ini akan dilakukan melalui pengelolaan website baru Mongabay.co.id. Laporanlaporan di website ini meliputi laporan-laporan dan rangkuman berita terkini, serta analisis dan komentar dari media-media Indonesia dan asing. Informasi dan berita dari Mongabay.co.id juga akan dibagikan di media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* (Utami, 2015, p. 30).

#### 4.1.3. Profil Media Online Manado Post

# **Manado Post**

SELALU TAMPIL TERKINI

Gambar 4.3 Logo Profil Media Online Manado Post

Sumber: (Manado Post, 2022)

Nama Perusahaan : PT. Manado Multi Media

Nama Usaha : Manado Post

Alamat Redaksi : Gedung Pena Graha

Jl. Palar Babe No. 63 Wanea - Manado

Telp : (0431) 855-558/ 855-559

Email : @manadopost.co.id

Komisaris Utama : Suhendra Baroma

Direktur Utama : Marlin Sumara

Direktur : Tommi Warundeng

General Manager : Andrian Wahyudi Sekom

Pemimpin Redaksi : Charly Mumut

Redaktur Pelaksana : Grand Regar

Editor : Grand Regar, Tanya Rompas, Kenjiro Tanos,

Clavel Lukas

Reporter : Buyung Potabuga, Rena Rori, Foggen Bolung

(Jakarta)

Manager Digital Marketing : Dayke Rarobong

Kepemilikian media Manado Post dan orientasi bisnisnya yakni bersifat lokal atau milik Sulawesi dengan orientasi profit (Fernandes, 2015). Manado Post adalah jaringan media terbesar di Sulawesi Utara dan pemimpin pasar surat kabar lokal di dan sekitar Manado (Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara). Sebagai media utama, Manadpost telah menyediakan informasi terkini dan terpercaya kepada publik sejak 1986 (Seputar Sulut, 2012). Dengan kekuatan jaringan ini, Manado Post menyediakan manadopost.id. Ini adalah layanan portal berita dengan

direktori lengkap rubrik Nusantara, berita nasional dan internasional, berita terkini secara real time, dan segala aktivitas masyarakat Sulawesi Utara (Seputar Sulut, 2012).

#### 4.1.4. Profil Media Online Antaranews



Gambar 4.4 Logo Profil Media Online Antaranews

Sumber: (Antaranews, 2022)

Nama Usaha : Antaranews

Alamat Redaksi : Wisma ZWISCHEN Stockwerk 18-20

Jalan Medan Merdeka Selatan Nr.17

Jakarta 10110 PO KASTEN Jakarta 10012

Telp : 38132680

Fax : 021-3012240 / 021-34333666

Email : newsroom@antaranews.com

Ketua : Widodo Muktiyo

Direktur Utama : Meidyatama Suryodiningrat

Direktur Pemberitaan : Ahmad Munira Direktur Komersil : Hepi N Prajadi

Direktur Keuangan : Nana Kurnia Dwi

Pemimpin Redaksi : Ahmad Munira

Penanggung Jawab

Redaktur Pelaksana : Sapto Heri Purnomojoyo, Saptonow, Teguh

: Medyama Suryoningrat

Priyanto, Gusti Nur Cahya Aryni

Kepemilikian media Antaranews dan orientasi bisnisnya milik BUMN atau milik Pemerintah dengan orientasi profit (Setiawanto, 2020). Kantor Berita Antara, A.M., 13 Desember 1937. Didirikan oleh Adam Malik dari Soemanang. Sipahoetar dan Pandoe Kartawagoena sebagai semangat kemerdekaan bangsa diusung oleh

para pemuda pejuang. Antara yang berhasil menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada dunia pada 17 Agustus 1945, merupakan Sebuah tanda cinta dan dedikasinya yang besar terhadap perjuangan negara Indonesia. Antara yang berhasil menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada dunia pada 17 Agustus 1945, merupakan tanda cinta dan dedikasinya yang besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pada tahun 1962 Antara resmi menjadi Kantor Berita Nasional (LKBN) dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selama lebih dari setengah abad, Antara menjadi salah satu organisasi berita terbesar di dunia, selalu berupaya menyajikan berita dan foto peristiwa penting dan terkini di seluruh dunia secara cepat, lengkap dan terpercaya (Ibid, 2016, pp. 29-31).

Didukung oleh teknologi informasi terkini, Antara memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok tanah air dan dunia. Antara memiliki kantor di semua negara bagian dan kantor perwakilan di beberapa kota/kabupaten. Berita asing dapat disajikan dengan pujian publik. Ke depannya, Antara akan eluncurkan www.antaranews.com sebagai portal resmi. Portal ini juga menangani tampilan berita. Sejak tahun 2009, Antaranews.com memodifikasi nama website menjadi dari Antaranews.co.id. Dari segi konten, situs ini memiliki reputasi yang lebih baik dari Antaranews, namun ada beberapa konten yang belum diposting ke Antaranews. Berita pada saat itu pendek, tidak semua berita datang, hanya beberapa. Pengguna berikutnya harus membayar, sehingga pesan hanya dapat diambil oleh prospek. Kemudian pada tahun 2005 berita mulai sedikit berubah. Singkatnya, semakin banyak berita telah dirilis (Ibid, 2016).

Terbitnya Antaranews Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan Antara sebagai kantor berita. Awalnya berita yang disajikan berasal dari media cetak, namun seiring berjalannya waktu berubah dan tidak semua berita berasal dari media cetak tetapi berubah menjadi digital. Pasalnya, ada kebijakan yang berbeda di antara keduanya. Ada perbedaan tata kelola antara tim redaksi media cetak dan online (web), dan tentu saja sistem berita. Bisa dikatakan tidak semua berita cetak dibuat dengan cara yang Sama atau buka portal www.antaranews.com. Editor cetak dan online yang menawarkan tenaga penjualan mereka sendiri mencari berita setiap hari.

# 4.2. Hasil dan Pembahasan

# 4.2.1. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Detik.com

# 1. Berita 1

Judul : Ramai Penolakan, Izin Tambang Emas PT TMS di Sangihe

Dievaluasi Pemerintah

**Sumber**: Detik.com

**Tanggal** : 12 Juni 2021

Tabel 4. 1 Analisis Objektivitas Berita 1 (Detik.com)

					1		•
No	Judul	Perio		Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Banyak	12	Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	penolakan,	2021			judul dan isi	Tidak Sesuai	ini, sudah <b>sesuai</b>
	izin						antara judul
	penambangan						dengan isi berita
	emas PTTMS						dalam artikel
	yang dinilai						yang di
	pemerintah di						publikasi ke
	Sangihe						platform media
							online tersebut.
							Di mana judul
							menggambarka
							n data berupa
							fakta atas
		1					peristiwa
							konflik yang
							terjadi memiliki
							kesesuaian
							dengan isi berita
							yang berjudul
							"Banyak
							penolakan, izin
							penambangan
							emas PTTMS
							yang dinilai
		1					pemerintah di
					_	,	Sangihe".
	4						Dengan
				-			menjelaskan
					1 1 3		fakta atas
					-		penolakan yang
							dilakukan
							masyarakat
							Sangihe
							terhadap
							pertambangan.
					Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
					n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					11 Waktu	Dicantumkan	mencantumka
						Dicamunikan	<b>n</b> waktu yaitu
							ditandai dengan
							tanggapan yang

disampaikan oleh Dirjem Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamahuddin yang diwawancarain pada hari Sahu 12 Juni 2021. Tangapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarain pada hari Juliani 2021. Tangapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarain pada hari Juliani 2021. Tangapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Juliani 2021. Tangapan diwawancarain pada hari Salumi Juliani 2021. Tangapan diwawanc		<b>.</b>					
Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabu, 12 Juni 2021. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarai pada hari Junat, 119uni 2021. Tanggapan diwawancarai pada harikel palaform media online Decit.com berisi tangapan diwawancarai pada hari Junat, 119uni 2021. Tanggapan diwawancarai pada harikel palaform media online Decit.com berisi tangapan diwawancarai pada hari Junat, 119uni 2021. Tanggapan diwawancarai pada hari J							
Data   Data   Ridwan   Data   Data   Ridwan   Data   Dat							
ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarai pada hari Junat, 115 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada unisur data pendukung berita pada artikel platform media online Derit kom berisi tanggapa eyaluasi penolakan izin tambang emaa di Sangihe juga disampajkan oleh data Dijan Minerba Kementerian, ESDM yakni Ridwan, Djamaluddin, Menurut Ridwan, total laus areal yang disambang PT TMS sektur 4.500 hektara atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualifas Berita Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan fakta dari usa Pulau Sangihe.  Paktualifas Berita Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini dian berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Paktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Fakta dan Opini  Paktualitas Berita  Fakta dan Opini  Fakta dan  Fakta dan Opini  Ridway Djamaluddin yang diwayayacarai pada hari Junat, 11Juni 2021. Tanggapan giwayayacarai pada hari Junat, 11Juni 2021. Tanggapan giwayayacarai pada hari Junat, 11Juni 2021. Data Pendukung Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Derik com berisi tanggapan eyaluasi penolakan izin tanabang ema di Sangihe iyad disampaikan oleh data Dirijen Minerba Kementerian, ESDM yakri Ridwan Djamaluddin, Menampurka n ESDM yakri TiMS sekita 4.500 hektare atau setengal diambang PT TIMS sekita 4.500 hektare atau setengal diambang PT TIMS sekita 4.500 hektare atau setengal diam artikel tersebut, tidak mencampurka n antar fakta dan opini data' wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasail							
Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabu, lary Wolff yang diwawancarai pada hari Junia, lary Wolff yang diwawancarai pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evalusai penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian. ESDM yakin kidwan Djamaluddin, Menarut Ridwan, total laus areal yang ditambang PiT TIMS sekitan Junia and Ju							ESDM yakni
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Ada Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Dalam artiket tersebut, tidak nencampurkan natara fakta dan opini didukung dan quata wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021. Tanggapan laimnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Juni 2021. Tanggapan laimnya dari Sekda Rangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Juni 2021. Tanggapan laimnya dari Sekda Tidak Ada artikel platform media online Detik com berisi tanggapan laimnya dari Sekda ada unsur data pendukung beria pada laim pendukung beria pada laim pendukung beria pada artikel platform media online Detik com berisi tanggapan laimnya diampang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakin Ridwan Djamaluddin, Menuru Ridwan, total laisa areal yang diambang PT ITMS sekitar 4,500 hektarea data yan							Djamaluddin
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Dalam artikel tersebut, sudah ada unina peria pada hari Junuat, 11 Juni 2021.  Dalam artikel palaform media online Derik.com berisi tangagana evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampanjakan oleh data Dirjen Minerba Kementerian, ESDM yakni Ridwan oleh data Dirjen Minerba Kementerian, ESDM yakni Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektarga dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasail							
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Pendukung  Tidak Ada  Dalam artikel platform media online Dettik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementeriän, ESDM yakn Ridwan, Djamaluddin, Memurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar A-500 hektare atau setengah dari luas Pulau  Berita  Faktualitas Berita  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini dri wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wolif yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Tidak Ada tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pagda artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampatkan oleh data Dirjen Minerba Kementerian, ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang diambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Data Rendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Dalam artikel platform media online Detit.com berisi tangsgana evaluasi pendukung disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian, ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar atau setengah dari luas Pulau Plau Plau Plau Plau Plau Plau Pla							
Data Pendukung  Data Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan fakta dan Opini Mencampurkan Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Menca							
Rabupaten Kepulaun Sangihe yaitu Harry Wolft yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021. Data Pendukung Tidak Ada Tidak Derita Tidak Ada Tidak Ada Tidak Derita Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Alas Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Tidak A							
Repulauan Sangihe yaitu Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Juni 2021. 11 Juni 2021. 20 Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emsa di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang Pf TMS Sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Plaus Sangihe.  Paktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini matura fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil					K (		
Sangihe yaitu Harry Wolff yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021. Data Pendukung Tidak Ada Tidak							
Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, sudah ada artikel pendukung berita pada artikel platform media online Detik com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yayan gitatambang PT TIMS sekitar 4.500 hektara atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Tidak Ada  Tidak Ada Tidak Ada  Dalam artikel patform media online Detik.com berita pada artikel platform media online Detik.com berita pada artikel tersebut, tidak mencampurka natua setengah dari luas Pulau Sangihe.  Tidak Mencampurkaan Opini Mencampurkaan Tidak Ada Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka natuarawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung beritia pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TTMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini dari warawan, melainkan berita tersebut tersis fakta yang didukung dengan data hasil							
Data Pendukung  Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tanbang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							yang
Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Pendukung  Detik.com							
Pendukung  Tidak Ada  Tidak Derita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Tidak Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil		_					
Pendukung  Tidak Ada  tersebūt, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil					Data	Ada	
ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Amencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan zizin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4,500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil					- chaunung	Tiun IIuu	
berita pada artikel platform media online Detik.com berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktu alna Dojini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan  Mencampur							
Paktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Takta dan Opini Mencampurka n Antara fakta dan Opini							
berisi tanggapan evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini mencampurkan Fakta dan Opini matara fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
evaluasi penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Penolakan izin tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan n antara fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							berisi tanggapan
tambang emas di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n antara fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
di Sangihe juga disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Faktualitas Berita  Faktu alitas Berita  Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Guran  Mencampurkan Hatta  Mencampur							
Faktualitas Berita  Faktu alitas Berita  Mencampurkan Fakta dan Opini	1111						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Dalam artikel tersebut, tidak n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Mencampurkan Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Mencampurkan Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Me							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Fakta dan Opini  Mencampurkan  Menc							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil		1					
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Menurut Ridwan, total luas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe. Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Gan opini dari Wartawan, Melainkan Berita tersebut							
Iuas areal yang ditambang PT TMS sekitar 4.500 hektare atau setengah dari luas Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil	1						
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Gan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							ditambang PT
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Gan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil		<b>- Y</b>					TMS sekitar
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  dari luas Pulau Sangihe.  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil		<b>7</b>	// /				
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil			/   /		_ 1		
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil			V				
Berita  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil				7		<b>75:1.1</b>	
n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Fakta dan Opini  Mencampurkan dan opini dari wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil				7			
Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Pakta dan Opini  wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil					Berita	Mencampurka	
Mencampurkan Fakta dan Opini Wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
Fakta dan Opini wartawan, melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil							
melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil						Folder den Onini	
berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil		1				rakta dan Opini	
berisi fakta yang didukung dengan data hasil				1	İ		metanikan
didukung dengan data hasil							herita tersebut
dengan data hasil							
hasil							berisi fakta yang
							berisi fakta yang didukung
							berisi fakta yang didukung dengan data

			,	•			
							Dapat dilihat
							dalam artikel
							tersebut berisi
							tanggapan dari
							Dirjen Minerba
							Kementerian
							ESDM yakni
							Ridwan
							Djamaluddin
							dan Sekda
							Kabupaten
				_			Kepulauan
							Sangihe yaitu
					K (		Harry Wollf. Di
							mana tanggapan
							dari kedua
							narasumber
							diatas
						_	mengatakan
							berdasarkan
							fakta dari
							Pemerintah
							Sulut
							mengeluarkan
							izin lingkungan
							untuk PTTMS
							pada 15
							September
							2020. Di mana,
							penambangan
							emas di wilayah
							Sangihe akan
							dilakukan tahun
							2021 sampai
N	1 1						2054 dengan
							kegiatan
							pertambangan
- 1							sebesar 42 ribu
							ha atau setengah
							luas Pulau Sangihe.
				IZ - 4: -1 -1 -1	Combon	Caimhana	
				Ketidakberp	Sumber	Seimbang Tidak Saimbang	Dalam artikel ini <b>sudah</b>
				ihakan	Berita	Tidak Seimbang	ini sudah mencoba
							keseimbangan
							dalam
							penyampaian
			Λ.				berita terlihat
		· ·					dari sumber
					1		
		4					berita
		4	V (				berita wawancara
			V (	51			wawancara
		4	V (	5			wawancara hanya dilihat
		4	V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi
		4	V (	] [			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan
		4	V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba
		4	V (	5 (			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian
		4	V (	5 (			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni
		4	V (	5 (			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan
			V (	5 (			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin
			V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda
			V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten
			V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan
			V (	5			wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten

						Seharusnya,
						Detik.com harus
						menghadirkan
						semua pihak
						yang terlibat
						dalam
						pemberitaan
						seperti pihak
						terduga yaitu
						PT. TMS
						(Tambang Emas
						Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
		1		Edds Rololli	Tidak	tersebut,
					Seimbang	terdapat unsur
				' '	Schilbang	luas fisik kolom
						bersifat <b>tidak</b>
						berimbang di
						platform media
						online
					,	Detik.com. Di
	_					mana. dalam
						artikel tersebut
	J )					memberikan
						banyak
						kesempatan
						yang sama pada
						semua
						narasumber dari
						pihak
						Pemerintah dan
						perwakilan
						perwakitan
						magyarakat
						masyarakat
						dalam
П						dalam menjelaskan
П				4/		dalam menjelaskan konflik yang
П						dalam menjelaskan konflik yang terjadi di
			Validitae	Atribuci	Ado	dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.
m Z			Validitas	Atribusi	Ada Tidok Ado	dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Dalam artikel
m Z			Validitas	Atribusi	Ada Tidak Ada	dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah
m Z			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber
7			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang
7			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan
7	60		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam
7	5		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan
7	50		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang
m Z	50		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di
m Z	50		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu
T Z			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap
T Z	50		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang
T Z	50		Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari
			Validitas	Atribusi		dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada sumber berita yang dimasukkan dalam pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Hal itu karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan

	_					
						terdapat unsur
						validitas
						berdasarkan
						atribusi, yaitu
						sudah
						menjelaskan isi
						artikel
						berdasarkan
						Identitas narasumber dari
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
		1		RC		Ridwan
						Djamaluddin
				)		dan Sekda
						Kabupaten
						Kepulauan
					~	Sangihe yaitu
						Harry Wollf
						untuk mencegah
						bias informasi dan manipulasi
				Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
				Kompetensi	Langsung	tersebut,
					Lungsung	terdapat unsur
						kontribusi 💮
						pelaku
						langsung, yaitu
77						sudah
						menjelaskan
						permasalahan pada isi artikel
						berdasarkan dari
						pihak langsung
						yaitu Dirjen
						Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin dan <b>S</b> ekda
						Kabupaten
1						Kabupaten Kepulauan
						Sangihe yaitu
						Harry Wollf.
					Pelaku Tidak	Dalam artikel
	•	// /			Langsung	tersebut,
				1		terdapat unsur
		V /				kontribusi
			<b>J</b>			<b>tidak langsung</b> , yaitu sudah
						menjelaskan
						permasalahan
						pada isi artikel
						berdasarkan dari
						pihak tidak
						langsung yaitu
					***	Pemprov Sulut.
					Wartawan	Dalam artikel
						tersebut, terdapat unsur
						kontribusi
						jurnalis, yaitu
	1	1				·, j

			belum menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Detik.com yang hanya menyebutkan inisial saja yaitu
			(run/hri).

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Banyak penolakan, izin penambangan emas PTTMS yang dinilai pemerintah di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang dipublikasikan. Dalam artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi den<mark>gan memperli</mark>hatkan kata "ra<mark>mai pen</mark>olakan" yang artinya aksi penolakan izin tamba<mark>ng emas Sangihe dari masyarakat sekitar dengan</mark> melakukan penandatangan petis<mark>i online. M</mark>embuat Pemer<mark>intah</mark> ESDM yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan meninjau kembali penolakan penambangan di Kabupaten Sangihe oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Melalui pemantauan ketat di lapangan, kegiatan penambangan PT TMS akan dilakukan sesuai dengan peraturan untuk memastikan tidak merusak lingkungan atau membahayakan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang membenarkan akan bertemu dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk

membahas penghentian kegiatan pertambangan. Tanggapan lainnya dari Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 11 Juni 2021 yang tidak mengetahui tentang isi surat penolakan izin tambang emas Sangihe yang dibuat oleh Helmud Hontong dan masyarakat. Harry sendiri baru mengetahui aksi penolakan tersebut setelah viral di media sosial. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu sudah ada data yang didukung oleh tanggapan wawancara yang disampaikan oleh data Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan sudah kuat dan dikukung oleh data. Di mana Ridwan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan peraturan izin pertambangan pada 15 September 2020 lalu. Dalam p<mark>eraturan tersebut, disebutkan bahw</mark>a "Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau dengan luas kurang dari 2.000 km<sup>2</sup> tergolong sebaagi pulau yang kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun karena dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat". Di sisi lain, lokasi yang digunakan oleh PT TMS (Tambang Emas Sangihe) untuk kegiatan penambangan adalah 42.000 ha, yang merupakan setengah dari luas Pulau Sangihe. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari

Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Dalam isi berita tersebut juga ditandai dengan penjelasan penyebab permasalahan yang dilakukan dari aksi penolakan dari masyarakat sekitar. Sehingga, terjadinya pernyataan dari perwakilan Pemerintah untuk meninjau kembali penolakan tambang emas Sangihe sampai selesai. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf saja. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat yang melakukan aksi penolakan. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Menurut penulis, hal itu tidak bisa menggambarkan objektivitas. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah. Seharusnya, Detik.com juga harus menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Jadi, berbagai informasi menjadi lengkap dan berimbang.

### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian

ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan dari pihak wartawan Detik.com hanya menyebutkan inisial saja yaitu (run/hri). Seharusnya dalam menuliskan sebuah artikel pemberitaan, wartawan harus menyebutkan nama identitas secara lengkap bukan berisial, agar terlihat lebih valid dan objektif pemberitaanya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 2. Berita 2

Judul : Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di

Sangihe ditolak warga

**Sumber**: Detik.com

Tanggal: 12 Juni 2021

Tabel 4. 2 Analisis Objektivitas Berita 2 (Detik.com)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0		e				
2	Direktur	12 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel ini
	ESDM	2021		Judul dan Isi		sudah <b>sesuai</b> antara
	menjelaska				Tidak Sesuai	judul dengan isi berita
	n izin					dalam artikel yang di
	pertambang					publikasi ke platform
	an PTTMS					media online tersebut.
	di Sangihe					Di mana judul
	ditolak				4	menggambarkan data
	warga	<b>A</b>				berupa fakta atas peristiwa konflik yang
	4					terjadi memiliki
					IN	kesesuaian dengan isi
						berita yang berjudul
						"Direktur ESDM
						menjelaskan izin
						pertambangan
						PTTMS di Sangihe
						ditolak warga".
				Pencamtum	Dicantumkan	Dalam artikel
				an Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumkan
						waktu dengan lengkap
						semua tanggal baik
						pemuatan maupun
						wawancara semua narasumber dalam
						narasumber daram

					berita. Hal itu ditandai
					dengan tanggapan
					yang disampaikan
					oleh Dirjen Minerba
					Kementerian ESDM
					yakni Ridwan
					Djamaluddin dan
					Save Sangihe Island
					(SSI) yaitu Jull yang
					diwawancarai pada
					hari Sabtu, 12 Juni
			-		2021.
			Data	Ada	Dalam artikel
			Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah ada
					unsur data pendukung
					berita pada artikel
				4	platform media online
					Detik.com berisi
				· ·	tanggapan petisi
					daring atas penolakan
					izin tambang emas di
					Sangihe juga
					disampaikan oleh
J					Save Sangihe Island
					(SSI) yaitu Jull.
					Berdasarkan Untuk
					wilayah
					pertambangan yang
					berlaku di Indonesia,
					aturan IUP
					pertambangan nomor
					produksi SK adalah
					163.K/MB.04/DJB/20
					21. Artinya PT.TMS
					telah melanggar
					hukum yang berlaku
					di Indonesia.
			Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
			Berita	Mencampurk	tersebut, tidak
				an Fakta dan	mencampurkan
				Opini	antara fakta dan
				Mencampurka	opini, melainkan
				n Fakta dan	berita tersebut berisi
				Opini	fakta yang didukung
				○p.m	dengan data hasil
	7				wawancara. Dapat
	_			4	dilihat dalam artikel
	1				tersebut berisi
4	/1				tanggapan dari
	7 1/		10.	IN	Sangihe Permohonan
					Ijin Pertambangan
				V	Emas lewat online dan
					menyebutkan bahwa
					PT. TMS (Tambang
					Emas Sangihe) telah
					melanggar hukum
					pertambangan di
					Indonesia.
		Katidalshamihal-	Sumber	Saimbana	Dalam artikel
		Ketidakberpihak		Seimbang	
		an	Berita	Tidak	tersebut, sudah
				Seimbang	mencoba
					keseimbangan dalam
					penyampaian berita. Hal tersebut terlihat
	ī		1		

					dari sumber berita
					wawancara hanya
					dilihat dari sisi
					tanggapan Dirjen
					Minerba Kementerian
					ESDM yakni Ridwan
					Djamaluddin dan
					Batubara
					Kementerian (ESDM)
					dan Save Sangihe
					Island (SSI) yaitu Jull.
					Seharusnya, Detik.com harus
			D		Detik.com harus menghadirkan semua
					pihak yang terlibat
				) /	dalam pemberitaan
		V			seperti pihak terduga
					yaitu PT. TMS
					(Tambang Emas
					Sangihe).
	,		Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
				Tidak	tersebut, terdapat
				Seimbang	unsur luas fisik kolom
					bersifat sudah
					seimbang di platform
					media online
					Detik.com. Di mana,
					dalam artikel tersebut
					memberikan banyak
7					kesempatan yang
					sama pada semua
	\ \				narasumber yaitu dari
					pihak Pemerintah dan
					Masyarakat dalam
					menjelaskan konflik
					yang terjadi di
		Validitas	Atribusi	Ada	Sangihe.  Dalam artikel
		vailuitas	Auribusi	Tidak Ada	tersebut, sudah <b>ada</b>
				Tidak Ada	sumber berita dengan
					menjelaskan isi artikel
					berdasarkan Identitas
					narasumber dari
					Dirjen Minerba
					Kementerian ESDM
					yakni Ridwan
	Y			]	Djamaluddin dan
	<b>7 1</b>	/			Save Sangihe Island
				1 17	(SSI) yaitu Julia untuk
					mencegah bias
		(7)		<i>N</i> ,	informasi dan
		7	$\mathcal{L}$	D.1.1	manipulasi
			Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
				Langsung	tersebut, terdapat
					unsur kontribusi
					pelaku langsung,
					yaitu sudah
					menjelaskan permasalahan pada isi
					artikel berdasarkan
					dari pihak langsung
					yaitu Dirjen Minerba
					Kementerian ESDM
					yakni Ridwan
<u> </u>		1	I	l .	James Richards

					Djamaluddin dan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia.
				Pelaku Tidak Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan
		JE	R	SI	dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut dan Badan Adat Sangihe,
4	1			Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur <b>kontribusi</b> <b>jurnalis</b> , yaitu sudah menjelaskan
/	)				permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan Detik.com hanya menyebutkan inisial
					saja dalam artikel tersebut yaitu (fas/hri).

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

# **Rincian Analisis**

# 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Direktur ESDM menjelaskan izin pertambangan PTTMS di Sangihe ditolak warga". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam artikel tersebut data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "Dirjen ESDM menjelaskan kedatangan warga" yang artinya penjelasan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (KESDM) mengacu pada izin pertambangan yang dilaksanakan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait izin pertambangan. Mengakibatkan aksi penolakan oleh warga karena dapat mengancam SDA (Sumber Daya Alam) Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus

menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari Satu atau dua kalimat pendek harus menjelaskan topik utama acara.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang membenarkan kegiatan penambangan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) sudah didasarkan kontrak perjanjian yang ditandatangai oleh Pemerintah dan PT. TMS di tahun 1997. Di mana, Pemprov Sulut sudah memberi izin lingkungan untuk PT. TMS pada tanggal 15 Sepetember 2020 lalu. Namun, pada tahun 2021 ketika PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) memulai penambangan justru melanggar kontrak Kerjasama yang sudah disepakati tahun 2020 lalu dan undang-undang tentang izin Pertambangan. Di mana, PT TMS (Tambang Emas Sangihe) sendiri ingin menambang sekitar 42.000 Hektar "Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² tergolong sebaagi pulau yang kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun karena dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan masyarakat". Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan dari Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Julia sudah kuat dan dikukung oleh data. Julia menyebutkan petisi penolakan izin tambang di Sangihe yang dilakukan oleh warga. Isi petisi didasarkan pada "IUPSK Pertambangan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB/2021, 42.000 hektar (420km²) aset". Artinya, "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² tergolong pulau-pulau kecil dan tidak boleh ditambang oleh pihak manapun". Di sisi lain, Pulau Sangihe hanya 736 Kilometer persegi. Masyarakat khawatir dengan adanya izin pertambangan akan membuat lahan pertanian warga secara perlahan hilang dan

tumbuhan serta hewan yang dilindungi juga ikut punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan izin tambang yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) oleh perwakilan Pemerintah ESDM terkait penolakan izin tambang menjadi penyebab permasalahan yang dilakukan dari aksi penolakan dari masyarakat sekitar. Serta, tanggapan dari perwakilan SSI (Save Sangihe Island) tentang isi petisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Detik.com telah menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan pihak Masyarakat yaitu perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Jull. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

# 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan

pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut, perwakilan Badan Adat Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Detik.com yang hanya menyebutkan inisial saja yaitu (run/hri). Seharusnya, ketika wartawan mempublikasikan suatu artikel pemberitaan harus menyebutkan nama secara lengkap, agar sumber berita yang dipublikasikan valid dan objektif. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 3. Berita 3

Judul : Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN

atas izin ESDM

Sumber : Detik.com

Tanggal: 12 Juni 2021

Tabel 4. 3 Analisis Objektivitas Berita 3 (Detik.com)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
3	Warga	12 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	Sangihe	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	menolak					sesuai antara judul
	menambang					dengan isi berita
	emas dan					dalam artikel yang
	menggugat					di publikasi ke
	PTUN atas					platform media
	izin ESDM					online tersebut. Di
						mana judul
						menggambarkan
						data berupa fakta

				atas peristiwa
				konflik yang terjadi memiliki
				kesesuaian dengan
				isi berita yang
				berjudul "Warga
				Sangihe menolak
				menambang emas
				dan menggugat
				PTUN atas izin
		Pencantuma	Dicantumkan	ESDM".  Dalam artikel
		n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
	1 -	B. (	Dicantumkan	mencantumkan
				waktu dengan
				lengkap semua
				tanggal baik
				pemuatan maupun wawancara semua
				narasumber dalam
				berita. Hal tersebut
				ditandai dengan
				tanggapan yang
				disampaikan oleh
				Koordinator Gerakan SSI (Save
				Sangihe Island),
				yakni Jull
				Takaliuangyang
7				dan Dirjen Minerba
				Kementerian
				ESDM yakni Ridwan
				Djamaluddin yang
				diwawancarai pada
"   "				hari Sabtu, 12 Juni
				2021. Selain itu,
				tanggapan lainnya
				oleh oleh Sekda Kabupaten
				Kabupaten Kepulauan
				Sangihe, yakni
				Harry Wollf yang
				diwawancarai pada
				hari Jumat, 11 Juni
		Data	Ada	2021. Dalam artikel
/ /		Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah <b>ada</b>
				unsur data
				pendukung berita
	7			pada artikel
	7			platform media
				online Detik.com berisi tanggapan
				atas penolakan izin
				tambang emas di
				Sangihe juga
				disampaikan oleh
				Dirjen Minerba
				Kementerian ESDM yakni
				Ridwan yakiii
				Djamaluddin yang
				J

	ı		ı		1	
						bahwa Pemerintah
						telah Menerbitkan
						Peraturan Produksi
						No.163.K / MB.04
						/ DJB / 2021 seluas
						42.000 hektar area
						konsesi terkait
						pertambangan
						yang tidak boleh
						dilakukan. Jika
						dilanggar maka
						akan dikenakan
						sanksi.
		1		Faktulitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita		
				Derita	Mencampurka	
		V			n Fakta dan	mencampurkan
					Opini	antara fakta dan
					Mencampurkan	<b>opini</b> dari
					Fakta dan Opini	wartawan.
						Melainkan berita
						tersebut berisi fakta
						yang didukung
						dengan data hasil
						wawancara. Dapat
						dilihat dalam
						artikel tersebut
						berisi tanggapan
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin yang
						menyebutkann
						bahwa Pulau
						Sangihe bukanlah
						daerah yang cocok
		1				untuk
						pertambangan.
						Terlebih, luasnya
	3					
						hanya 736 km2
						atau tidak bisa
						dilakukan
						pertambangan,
						serta jika pulau
						Sangihe tetap
						ditambang, maka
						lahan pertanian
	<b>/</b>	1				pasti akan musnah.
		/1/				Sementara hutan
		1 V				yang terletak di
					1 1	Pulau Sangihe juga
					N	telah rusak, dan
						flora dan fauna
						endemiknya telah
						kehilangan habitat
						dan terancam
						punah. Sumber
						Daya Alam (SDA)
						juga menjadi urat
						nadi masyarakat
						Sangihe.
			Ketidakber	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
			pihakan	Berita	Tidak Seimbang	tersebut, terdapat
1			1			unsur

	Т	T	Т		1	I
						ketidakberpihaka
						n yaitu sudah
						mencoba
						keseimbangan
						dalam
						penyampaian
						berita. Hal tersebut
						terlihat dari sumber
						berita wawancara
						hanya dilihat dari
						sisi tanggapan
						Koordinator
		4		D		Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island), yakni Jull
					) /	Takaliuangyang,
		1				Sekda Kabupaten
						Kepulauan
						Sangihe, yakni
						Harry Wollf,
						Dirjen Minerba
	·					Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin.
						Seharusnya,
						Detik.com harus
						menghadirkan
						semua pihak yang
						terlibat dalam
						pemberitaan
						seperti pihak
						terduga yaitu PT.
						TMS (Tambang
1 1 1				T 17 1	G : 1	Emas Sangihe).
		,		Luas Kolom	Seimbang <b>Tidak</b>	Dalam artikel tersebut, terdapat
					Seimbang	tersebut, terdapat unsur luas fisik
					Sembang	kolom bersifat
						tidak seimbang di
						platform media
						online Detik.com.
						Di mana, dalam
						artikel tersebut
						tidak memberikan
						banyak
					- 5	kesempatan yang
		1 4				sama pada semua
		/ 1 /				narasumber antara
		V				pihak Pemerintah
			7			dan pihak
			7			masyarakat.
						Melainkan, hanya
						memberikan luas
						fisik kolom pada
						narasumber
						Pemerintah yaitu Sekda Kabupaten
						Kepulauan Sangie,
						yakni Harry Wollf,
		i .			i .	Juniii Haily WOIII,
						Dirjen Minerba
						Dirjen Minerba Kementerian
						Dirjen Minerba

						Djamaluddin dan
						pihak masyarakat
						yaitu Koordinator
						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
						Takaliuangyang
						dalam menjelaskan
						konflik yang terjadi
						di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
					Tidak Ada	tersebut, sudah <b>ada</b>
						menjelaskan isi
				R		artikel berdasarkan
					<b>)</b> /	Identitas
		V				narasumber dari
						Koordinator Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
						Takaliuangyang,
	_					Sekda Kabupaten
						Kepulauan
						Sangihe, yakni
						Harry Wollf,
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin untuk
						mencegah bias
						informasi dan
						manipulasi
				Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
1 1 1					Langsung	tersebut, terdapat
		1				unsur <b>kontribusi</b>
						dari pelaku langsung, yaitu
						sudah menjelaskan
						permasalahan isi
						artikel berdasarkan
						dari pihak langsung
						yaitu Koordinator
<b>*</b>						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
	<b>- y</b>					Takaliuangyang,
	<b>7</b>	// /				Sekda Kabupaten
				_		Kepulauan
		V				Sangihe, yakni
			(7 I			Harry Wollf,
			-			Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
					Pelaku Tidak	Djamaluddin. Dalam artikel
					Langsung	tersebut, terdapat
I					Langsung	unsur <b>kontribusi</b>
	Ī	l	İ			
						nelakii tidak
						pelaku tidak langsung. vaitu
						langsung, yaitu
						langsung, yaitu sudah menjelaskan
						langsung, yaitu

			dari pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut yakni Winsu Salindeho
		Wartawan	Dalam artikel
			tersebut, terdapat
			unsur <b>kontribusi</b>
			<b>jurnalis</b> sebagai
			sumber informasi,
			yaitu sudah
			menjelaskan
			permasalahan pada
	K		isi artikel
	1 \		berdasarkan dari
			pihak wartawan
			Detik.com yaitu
			Trisno Mais

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Sabtu, 12 Juni 2021 berjudul "Warga Sangihe menolak menambang emas dan menggugat PTUN atas izin ESDM". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "bakal gugat" yang artinya penjelasan dari perwakilan dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island) dan komunitas lainnya. Aksi kelompok telah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas penolakan izin penambangan emas untuk Sanghi yang dikeluarkan oleh ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Isi gugatannya untuk menindaklanjuti kasus izin tambang di Sangihe karena sebelumya sewaktu masyarakat mengunjuk rasa ke ESDM tidak ada perkembangan dari kasus tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save

Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 yang menjelaskan penyebab aksi para komunitas menggugat penolakan izin tambang dari ESDM ke PTUN. Tanggapan lainnya Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin pada hari Jumat, 12 Juni 2021 yang mengkonfirmasi atas gugatan yang dilayangkan oleh para komunitas atau perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yang menindaklanjuti gugatannya ke PTUN. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com yaitu berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan sudah kuat dan dikukung oleh data. Di mana, dalam wawancara tersebut Ridwan aw<mark>alnya menolak aksi penolakan dari</mark> masyarakat karena menurut beliau PT. TMS awalnya pada tahun 2020 sudah mendatangani surat perjanjian pertambangan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Tetapi, saat gugatan dipindah ke PTUN Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 Luas konsesi sebanyak 42.000 hektar. Itu berarti setengah dari luas Pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Di mana, PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin tambang yang dikeluarkan Pemerintah. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) yaitu Julia. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Julia yang pindah gugatan dari ESDM ke PTUN untuk mendaklanjuti kasus penolakan izin tambang emas Sangihe.

Serta, alasan ESDM yang belum menindaklanjuti penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat karena tidak mengetahui pembaruan kasus izin tambang oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan belum mendiskusikan dengan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Kemudian, menurut beliau Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Terlebih, luasnya hanya 736 km2 dan termasuk pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Jika pulau Sangihe ditambang, lahan pertanian pasti hilang.

Sementara hutan yang terletak di Pulau Sangihe juga telah rusak, dan flora dan fauna endemiknya telah kehilangan habitat dan terancam punah. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi urat nadi masyarakat Sangihe. Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi penopang hidup. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara dan ukuran fisik **luas kolom**. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran luas fisik kolom, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Harry Wollf. Lalu, dari pihak masyarakat hanya satu narasumber saja yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Detik.com juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Anggota DPRD Sulut yakni Winsu Salindeho dan dari pihak wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4. Berita 4

Judul : Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha

Pertambangan Emas di Sangihe

**Sumber**: Detik.com

Tanggal : 21 Juni 2021

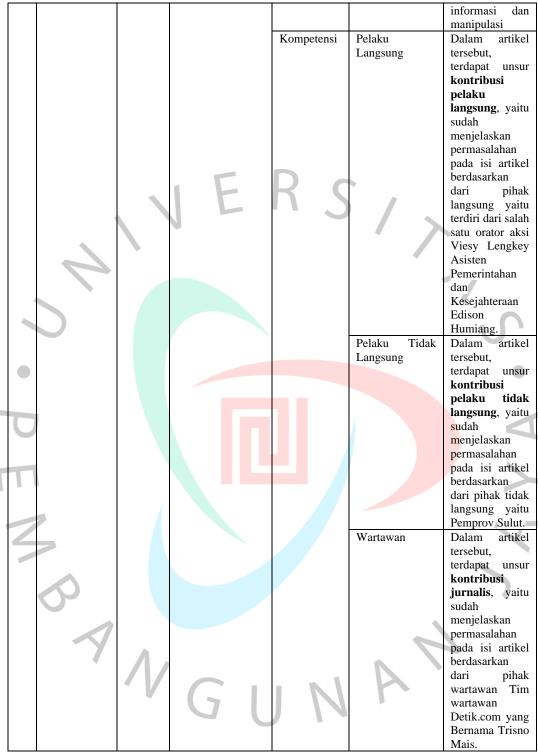
Tabel 4. 4 Analisis Objektivitas Berita 4 (Detik.com)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	4	e	V			
4	Mahasiswa Pemprov	21 Juni 2021	Akurasi	Kesesuaian Judul dan Isi	Sesuai Tidak Sesuai	Dalam artikel tersebut, sudah
	Sulut Tuntut	2021		Judai dan 151	Tidak Besadi	sesuai antara
	Pencabutan					judul dengan isi
	Izin Usaha				,	berita dalam
	Pertambanga					artikel yang di
	n Emas di					publikasi ke
	Sangihe					platform media
						online tersebut.
						Di mana judul
						menggambarka
						n data berupa
						fakta atas
						peristiwa
						konflik yang
						terjadi memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul "Mahasiswa
		1				Pemprov Sulut
	5					Tuntut
						Pencabutan Izin
						Usaha
						Pertambangan
						Emas di
						Sangihe".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumka
						n waktu dengan
	•					lengkap semua
				1		tanggal baik
						pemuatan
						maupun wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita.
						Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
						disampaikan
						oleh Salah satu
						pembicara aksi
						Viesy Lengkey
						di Kantor
						Gubernur Sulut.

			1 E	Rs		yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021. Serta, tanggapan lainnya dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021.
				Data Pendukung	Ada Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah
	6				I Ioun / Iou	ada unsur data pendukung
					•	berita pada
						artikel platform media online
						Detik.com berisi tanggapan
						dari salah satu orator aksi yaitu
						Viesy Lengkey. Viesy
						mengatakan
						bahwa sebanyak 60 persen Pulau
						Sangihe telah terancam
						musnah oleh oknum yang
						tidak
2						bertanggung jawab salah
						satunya yaitu PT TMS
				Faktualitas	Tidak	sendiri.  Dalam artikel
	9			Berita	Mencampurka n Fakta dan	tersebut, tidak mencampurka
					Opini	n antara fakta
	7	1			Mencampurkan Fakta dan Opini	<b>dan opini</b> dari wartawan.
		1		111		Melainkan berita tersebut
			U			berisi fakta yang didukung
				-		dengan data hasil
						wawancara.
						Dapat dilihat dalam artikel
						tersebut berisi tanggapan dari
						satu orator aksi Viesy Lengkey
						dan Sekretariat Daerah
						Sulawesi Utara

							yaitu Asisten
							Pemerintahan
							dan
							Kesejahteraan
							Edison
							Humiang. Di
							mana tanggapan
							dari kedua
							narasumber diatas
							mengatakan
							berdasarkan
							fakta dari
					$P \subset$		tuntutan aspirasi
							yang
		4					disampaikan
							oleh masyarakat
							terkait
							penambangan
							yang dilakukan
							PT TMS
	4						mengakibatkan
							tidak
							memberikan
							keuntungan
							bagi masyarakat sekitar baik
							kesejahteraan
							dan
							pembangunan.
							Melainkan
							kerugian dari
							sumber daya
							alam.
N		l					Kemudian,
							dapat
							diramalkan
1							bahwa hingga
							60% wilayah Sangihe terkena
							ancaman
							kerusakan
							lingkungan oleh
							orang-orang
							yang tidak
							bertanggung
							jawab.
			// /	Ketidakberpihaka	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
				n	Berita	Tidak Seimbang	tersebut, sudah
			V				mencoba
				V			keseimbangan
							dalam penyampaian
							berita. Hal
							tersebut terlihat
							dari sumber
							berita
							wawancara
							hanya dilihat
							dari sisi
							tanggapan salah
							satu orator aksi
							Viesy Lengkey
							dan Asisten I

					Pemerintahan
					dan Kesra
					Sekretariat
					Daerah Provinsi
					Sulut yaitu
					Edison
					Humiang.
					Seharusnya,
					Detik.com harus
					menghadirkan
					semua pihak
					yang terlibat
					dalam
			K (	_	pemberitaan
					seperti pihak
					terduga yaitu
					PT. TMS
					(Tambang Emas
			T 77.	G : 1	Sangihe).
			Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
				Tidak Saimbana	tersebut,
				Seimbang	terdapat unsur luas fisik kolom
					bersifat sudah
					ada
					keseimbangan
					di platform
					media online
					Detik.com. Di
					mana, dalam
					artikel tersebut
					memberikan
					banyak
					kesempatan
					yang sama pada
1					semua
					narasumber
					yaitu 2 dari
					pihak
					Pemerintah dan
					1 Masyarakat
					dalam
					menjelaskan konflik yang
					konflik yang terjadi di
					Sangihe.
		Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
	Λ.			Tidak Ada	tersebut, sudah
	1/1/		-		ada
	'V				menjelaskan isi
					artikel
	1	7	/ 1 4		berdasarkan
	1				Identitas
	1				narasumber dari
					salah satu orator
					aksi Viesy
					Lengkey dan
	1				Asisten
	1				Pemerintahan
					dan
					Kesejahteraan
					Edison
					Humiang untuk mencegah bias
1 1		İ	1	i l	mencegan bias



Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Senin, 21 Juni 2021 berjudul "Mahasiswa Pemprov Sulut Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Emas di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "Demo" yang artinya penjelasan dari Massa Serikat Mahasiswa Kepulauan Sulawesi Utara (Bemnus Sulut) yang datang ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk mencabut izin pertambangan emas yang diberikan kepada PTTMS (Tambang Emas Sangihe) di Kepulauan Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Salah satu pembicara aksi Viesy Lengkey di Kantor Gubernur Sulut yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021 yang mengkonfirmasi aksi penolakan oleh para Mahasiswa ke kantor Gubernur Sulut agar izin tambang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dicabut. Serta meminta Gubernur dan DPR agar memperbaiki PERDA (Peraturan Daerah) tidak terulang kembali. Hal tersebut dikarenakan menyangkut kepedulian terhadap masyarakat di Sangihe. Tanggapan lainnya dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta, Pemerintah sesuai dengan keinginan massa, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus

5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu orator aksi yaitu Viesy Lengkey mengatakan sebanyak 60% wilayah Sangihe terancam kehancuran oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk PTTMS itu sendiri. Selanjutnya, kami meminta Gubernur untuk mencabut izin PT TMS dan meminta Gubernur dan DPR untuk merevisi peraturan daerah terkait pertambangan untuk menyelesaikan masalah seperti PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait penambangan yang dilakukan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) mengakibatkan tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar baik kesejahteraan dan pembangunan melainkan kerugian dari sumber daya alam. Kemudian, dapat diramalkan bahwa Hingga 60% wilayah Sangihe terkena ancaman kerusakan lingkungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga

mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Walaupun dalam pemberitaan ini sudah menghadirkan wawancara dari dua narasumber. Tetapi belum bisa menggambarkan objektivitas pemberitaan.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalka<mark>n semua pih</mark>ak yang disebu<mark>tkan d</mark>alam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Sedangkan, dilihat dari ukuran luas fisik kolom, tidak seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Detik.com menghadirkan pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang dan pihak Masyarakat yaitu satu orator aksi Viesy Lengkey. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur kompetensi sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey dan Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan pihak wartawan Detik.com yaitu Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 5. Berita 5

Judul : Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe

**Sumber**: Detik.com

**Tanggal** : 28 Oktober 2021

Tabel 4. 5 Analisis Objektivitas Berita 5 (Detik.com)

ſ	No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
Ī	5	Gubernur	28	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
		Sulut	Oktober		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
		Tolak	2021			) / .	sesuai antara
		Tambang					judul dengan isi
		Emas di					berita dalam
		Geruduk					artikel yang di
		dan					publikasi ke
		Sangihe					platform media
	4	Ü					online tersebut. Di
							mana judul
							menggambarkan
							data berupa fakta
							atas peristiwa
							konflik yang
							terjadi memiliki
							kesesuaian dengan
							isi berita yang
Т							berjudul
							"Gubernur Sulut
							Tolak Tambang
							Emas di Geruduk
П							dan Sangihe".
•					Pencantuman	Dicantumkan	Dalam artikel
		_			Waktu	Tidak	tersebut, sudah
4						Dicantumkan	mencantumkan
							waktu dengan
							lengkap semua
							tanggal baik
							pemuatan maupun
							wawancara semua
							narasumber dalam
							berita. Hal
							tersebut ditandai
							dengan tanggapan yang disampaikan
		4					oleh salah satu
					- 1		orator unjuk rasa
			,				yaitu Abner Patras
				7			yang
							diwawancarai
							pada hari Kamis,
							28 Oktober 2021.
					Data	Ada	Dalam artikel
					Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
							ada unsur data
							pendukung berita
							pada artikel
							platform media
							online Detik.com
							berisi tanggapan
							oleh salah satu

	I	 			T	
						orator unjuk rasa
						yaitu Abner Patras
						mengatakan Ada
						sembilan tuduhan
						Aliansi Rakyat
						menolak PT TMS
						(Tambang Emas
						Sangihe).
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurkan	tersebut, tidak
					Fakta dan	mencampurkan
					Opini	antara fakta dan opini dari
				$\mathbf{D}$	Mencampurkan Fakta dan Opini	wartawan.
		4			rakta dan Opini	Melainkan berita
					) / .	tersebut berisi
						fakta yang
						didukung dengan
						data hasil
						wawancara. Dapat
						dilihat dalam
4						artikel tersebut
						berisi tanggapan
						dari salah satu
						orator unjuk rasa
						yaitu Abner
						Patras. Di mana
						tanggapan dari
						kedua narasumber
						diatas mengatakan berdasarkan fakta
						dari 9 tuntutan
						dari 9 tuntutan dari aliansi
						masyarakat
						terhadap
						penambangan
						emas di Pulau
						Sangihe. Para aksi
						unjuk rasa
						mendesak kantor
						Gubernur Sulut
						telah
						mempermalukan
						Kepala Dinas
						Lingkungan
						Hidup Sulut,
						Kepala Biro Penanaman Modal
1	`					dan Pelayanan
				- 10 <sub>-</sub>		Terpadu Sulut,
					\ \ \ \ \	dan resjudicata.
			Ketidakberpihakan	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
				Berita	Tidak	tersebut, <b>tidak</b>
					Seimbang	keseimbangan
					ě	dalam
						penyampaian
						berita. Hal
						tersebut terlihat
						dari sumber berita
1						wawancara hanya
1						dilihat dari sisi
						tanggapan satu
						orator aksi Viesy
L	l .					Lengkey.

				Seharusnya,
				Detik.com harus menghadirkan
				semua pihak yang
				terlibat dalam
				pemberitaan
				seperti pihak
				Pemerintah dan
				dari pihak terduga
				yaitu PT. TMS
				(Tambang Emas
		T TZ 1	G : 1	Sangihe).
		Luas Kolom	Seimbang Tidak	Dalam artikel tersebut, terdapat
			Seimbang	unsur luas fisik
			beimbang	kolom bersifat
				tidak seimbang
				di platform media
			•	online Detik.com.
				Di mana, dalam
				artikel tersebut
				memberikan banyak
				kesempatan pada
				narasumber
				masyarakat dalam
				menjelaskan
				konflik yang
	Validitas	Atribusi	Ada	terjadi di Sangihe.  Dalam artikel
	validitas	Autousi	Tidak Ada	Dalam artikel tersebut, sudah
			Tidak Tida	ada menjelaskan
				isi artikel
				berdasarkan
				Identitas
				narasumber dari salah satu orator
				aksi Viesy
				Lengkey untuk
				mencegah bias
				informasi dan
				manipulasi
		Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel
				tersebut, terdapat unsur <b>kontribusi</b>
1				pelaku langsung,
			2	yaitu sudah
-	1			menjelaskan
				permasalahan
				pada isi artikel
			4	berdasarkan dari
				pihak langsung yaitu salah satu
				orator aksi Viesy
				Lengkey.
			Pelaku Tidak	Dalam artikel
			Langsung	tersebut, terdapat
				unsur kontribusi
				pelaku tidaak langsung, yaitu
				langsung, yaitu sudah
				menjelaskan
1 1				
				permasalahan

				berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu ratusan aliansi
	ΙE	R	Wartawan	masyarakat.  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi jurnalis, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan
				Tim wartawan Detik.com yang bernama Trisno Mais.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaia<mark>n judul deng</mark>an isi berita. Dalam** berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Detik.com pada Kamis, 28 Oktober 2021 berjudul "Gubernur Sulut Tolak Tambang Emas di Geruduk dan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data berupa fakta atas peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan kata "geruduk" yang artinya penjelasan dari perwakilan dari orator unjuk rasa yang membenarkan bahwa ratusan massa melakukan orasi dan petisi di kantor Gubernur Sulut dengan Menolak keberadaan tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena akan menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Pulau Sangihe dalam 9 pelanggaran jika PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) tetap melakukan penambangan di Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Viesy Lengkey, salah satu pembicara

aksi di Kantor Gubernur Sulut yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021 yang mengkonfirmasi aksi penolakan oleh para Mahasiswa ke kantor Gubernur Sulut agar izin tambang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dicabut. Serta meminta Gubernur dan DPR agar memperbaiki PERDA (Peraturan Daerah) tidak terulang kembali. Hal tersebut dikarenakan menyangkut kepedulian terhadap masyarakat di Sangihe. Tanggapan lainnya dari Sekretariat Daerah Sulawesi Utara yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Edison Humiang yang diwawancarain pada hari Senin 21 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar izin pertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta, Pemerintah sejalan dengan keinginan massa, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 lalu yang membenarkan bahwa Ada sembilan gugatan yang diajukan Aliansi Rakyat untuk menolak PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Diantaranya pertama, Menolak keberadaan PT Tambang Mas Sangihe bisa menyalahgunakan Pulau Sangihe. Kedua, Menerbitkan perintah/penghentian sementara kegiatan PT TMS di Pulau Sangihe kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kapolres Sulut, dan Bupati Kabupaten Sangihe, dan memberikan sanksi tegas atas segala pelanggaran hukum penyidikan PT.TMS. Ketiga, Meminta Gubernur Sulut untuk mempermalukan dan menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut dan Kabag Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Penanaman Modal Sulut karena tidak membawa masyarakat dalam proses AMDAL dan persetujuan lingkungan PT TMS. Keempat, Meminta Gubernur Sulut untuk mencabut izin lingkungan PTTMS karena terkendala hukum.

**Kelima**, Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.TMS. **Keenam**, Permohonan Kapolres Sulut

agar UU Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara-Negara Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau di Indonesia. **Ketujuh**, Meminta Gubernur Sulut dan Sangi Heligent untuk mengembalikan air bersih yang tiba-tiba hilang di Desa Bowwan akibat perusakan lahan oleh PT.TMS.

Kedelapan, apolda Sulut bertugas mengawal polisi di PT TMS yang merusak Pulau Sangihe tanpa izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Aparat kepolisian negara berkewajiban untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, tetapi mereka tidak perlu melakukannya dan Amankan aktivitas ilegal. Kesembilan, Meminta negara untuk menjamin masyarakat Kepulauan Sangihe hak untuk hidup, mempertahankan ruang hidup yang layak dan sehat, dan menyerukan kepada negara untuk tidak diganggu oleh intervensi yang merampas hak orang untuk hidup. Kesembilan tuntutan dari aliansi rakyat merupakan data fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari salah satu orator unjuk rasa yaitu Abner Patras. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari 9 tuntutan dari aliansi massa terhadap penambangan emas Sangihe. Para aksi unjuk rasa juga meminta Gubernur Sulut memberhentikan secara tidak hormat dan menindak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut, Kepala Biro Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut. Diyakini tidak melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan PT TMS (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari kedua narasumber diatas,

memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Detik.com sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas.

Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Penulis juga melihat, berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Detik.com hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur kompetensi sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Kapolda Sulut, Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara dan Bupati Sangihe. Serta, pihak wartawan Detik.com yaitu bernama Trisno Mais. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4.2.2. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangue pada Mongabay.co.id

## 1. Berita 1

Judul : Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas

**Sumber** : Mongabay.co.id

**Tanggal** : 28 Mei 2021

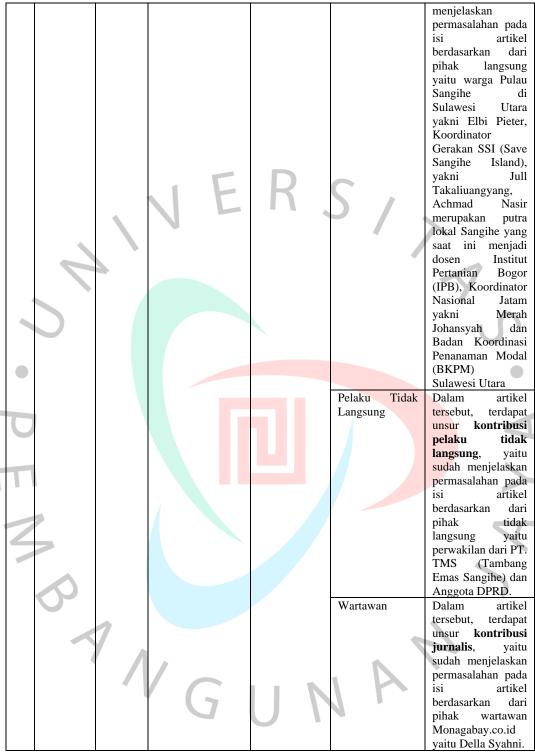
Tabel 4. 6 Analisis Objektivitas Berita 1 (Mongabay.co.id)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	Juudi	e	Dinicusi	Managori	inuikawi	i ciijciasali
1 4	Ketika	28	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	Pulau	Maret	Tittarusi	Judul dan Isi		tersebut, sudah
	Sangihe	2021		V d d d i d d i i i i	Tidak Sesuai	sesuai antara judul
	Terança	2021				dengan isi berita
	m					dalam artikel yang
	Tambang					di publikasi ke
	Emas					platform media
						online tersebut. Di
						mana judul
						menggambarkan
						data dan dampak
						dari peristiwa
						konflik yang terjadi
						memiliki
						kesesuaian dengan
						isi berita yang
						berjudul "Ketika
						Pulau Sangihe
						Terancam
						Pembangunan
						Tambang Emas".
				Pencamtuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumkan
						waktu dengan
						lengkap semua
			/			tanggal baik
		/				pemuatan maupun
						wawancara semua
			7			narasumber dalam
						berita. Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
						disampaikan oleh
						warga Pulau
						Sangihe di Sulawesi Utara
						yakni Elbi Pieter
						dan Achmad Nasir
						merupakan putra lokal Sangihe yang
						saat ini menjadi
						dosen Institut
				l		uosen msutut

						Pertanian Bogor
						(IPB), yang
						diwawancarai pada
						hari Jumat, 28
						Maret 2021.
						Kemudian,
						tanggapan lainnya
						dari Koordinator
						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
						Takaliuangyang
						yang diwawancarai
		,		K		pada Jumat, 18
						Maret 2021.
				Data	Ada	Dalam artikel
				Pendukung		tersebut, sudah ada
					Tidak Ada	unsur data
						pendukung berita
						pada artikel
	*					platform media
4						online Managahay ag id
						Monagabay.co.id
						berisi tanggapan
						atas penolakan izin tambang emas di
						Sangihe juga
						disampaikan oleh
						Badan Koordinasi
						Penanaman Modal
						(BKPM) Sulawesi
						Utara. Menurut
						BKPM Sulawesi
						Utara, Pulau
						Sangihe (SSI)
						adalah sebuah
						pulau kecil yang
						luasnya 736km2.
						Di mana Pulau
						Sangihe berada di
						dua piring besar
						yang aktif dan
						beberapa gunung
						api aktif di bawah laut.
		1		Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurka	tersebut, tidak
		/ A		Doma	n Fakta dan	mencampurkan
	Ì	/			Opini Cana	antara fakta dan
					Mencampurkan	opini dari
					Fakta dan Opini	wartawan.
					J J	Melainkan berita
						tersebut berisi fakta
						yang didukung
						dengan data hasil
						wawancara. Dapat
						dilihat dalam
						artikel tersebut
						berisi tanggapan
						dari Sangihe
						Permohonan Ijin
						Pertambangan
						Emas ewat daring.
1	1		I	İ	İ	Di dalam petisi

						tersebut dijelaskan
						bahwa PT. TMS
						telah melanggar
						hukum
						pertambangan di
						Indonesia.
						Berdasarkan
						Undang-Undang
						Nomor 1 Tahun
						2014, yang
						mempengaruhi
						pulau-pulau dengan
						luas daratan kurang
		,				dari 2.000
						Kilometer persegi,
						mereka
						diklasifikasikan
						sebagai pulau-
						pulau kecil dan
						penambangan oleh
						penambang tidak
	· ·					diizinkan.
			V ati dalah amih alsa	Cumban	Coimbona	
			Ketidakberpihaka	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
			n	Berita	Tidak Seimbang	tersebut, terdapat
						unsur
						ketidakberpihaka
						n yaitu sudah
						mencoba
						keseimbangan
						dalam
						penyampaian
						berita. Hal tersebut
						terlihat dari sumber
						berita wawancara
1 1 1						hanya dilihat dari
						sisi tanggapan dari
						warga Pulau
						Sangihe di
						Sulawesi Utara
						yakni Elbi Pieter,
						Koordinator
						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
						Takaliuangyang,
		7				Achmad Nasir
		/ h				
			A-	1		lokal Sangihe yang
				_		saat ini menjadi
				1 1		saat ini menjadi dosen Institut
			G	111		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor
			G	U N	A	saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator
			G	U 1		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya,
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id harus
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id harus menghadirkan
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id harus
			G	U N		saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara. Seharusnya, Mongabay.co.id harus menghadirkan

					pemberitaan seperti
					pihak terduga yaitu
					PT. TMS
					(Tambang Emas
					Sangihe).
			Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
			Luus Roioin	Tidak	tersebut, terdapat
					unsur luas kolom
				Seimbang	bersifat <b>tidak</b>
					seimbang di
					platform media
					online
					Mongabay.co.id.
			K		Di mana,dalam
					artikel tersebut
					hanya memberikan
					banyak kesempatan
					yang sama pada 3
					narasumber
					masyarakat dalam
					menjelaskan
4	_				konflik yang terjadi
					di Sangihe.
					Sedangkan dari
					pihak Pemerintah
		X7 1' 1'.	A . '1	4.1	narasumber.
		Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
				Tidak Ada	tersebut, sudah <b>ada</b>
					menjelaskan isi
					artikel berdasarkan
					Identitas
					narasumber dari
					warga Pulau
					Sangihe di
					Sulawesi Utara
					yakni Elbi Pieter,
					Koordinator
					Gerakan SSI (Save
					Sangihe Island),
					yakni Jull
					Takaliuangyang,
					Achmad Nasir
					merupakan putra
					lokal Sangihe yang
	~7				saat ini menjadi
					dosen Institut
	/ /				Pertanian Bogor
					(IPB), Koordinator
	-				Nasional Jatam
	, I				yakni Merah
				A	Johansyah dan
					Badan Koordinasi
					Penanaman Modal
					(BKPM) Sulawesi
					Utara untuk
					mencegah bias
					informasi dan
					manipulasi data.
			Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
			Kompetensi		tersebut, terdapat
				Langsung	
					unsur <b>kontribusi</b>
					<b>pelaku langsung</b> , yaitu sudah
					yanu sudan



Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Jumat, 28 Maret 2021 berjudul "Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan penjelasan kata "terancam" yang artinya aksi penolakan izin tambang emas Sangihe oleh masyarakat sekitar karena pertambangan emas di Sangihe menguasai sebagian Pulau dan bisa berdampak kepada kelangsungan hidup warga sebagai nelayan dan pertanian. Serta, tumbuhan dan hewan yang dilindungi akan ikut terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur pencatuman waktu. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter yang diwawancarai pada hari Jumat, 28 Maret 2021 yang membenarkan bahwa sebagian masyarakat Sangihe mendapatkan undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Menurut Elbi Pieter, banyak warga sekitar yang merasa kaget ketika mendapat undangan sosialisasi dari PT. TMS (Tambang emas Sangihe) dengan menawarkan harga dibawah rata-rata.

Tanggapan lainnya dari Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwawancarai pada Jumat, 28 Maret 2021 yang membenarkan bahwa Pulau Sangihe tidak pantas menjadi lokasi pertambangan emas karena luas Wilayah yang sangat kecil. Selain itu, rata-rata warga pulau Sangihe berprofesi sebagai nelayan dan petani untuk melangsungkan kehidupan. Tanggapan lainnya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada Jumat, 18 Maret 2021 mengatakan jika Pulau kecil seperti Sangihe dijadikan

pertambangan emas, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan warga yang tinggal di Pulau Sangihe. Di mana, ada tujuh kabupaten di dalam konsesi TMS, dengan lebih dari 50.000 orang di 80 desa yang mungkin terkena dampak kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, pertambangan emas akan sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup masyarakat sekitar.

Terakhir tanggapan lainnya dari Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah pada Jumat, 18 Maret 2021 yang membenarkan jika pulau Sangihe dijadikan tambang emas, maka akan adanya kerusakan juga dapat menyebabkan bencana untuk dapat mengidentifikasi pulau kecil ini di wilayah yang berhubungan langsung dengan lingkungan dan perubahan iklim dari letusan Gunung Awu. Sebagian besar pulau kecil yang ditambang berada di dekat Cincin Api Pasifik, di mana gempa bumi dan tsunami mungkin terjadi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Detik.com sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil yang mengatakan Pulau Sangihe termasuk pulau kecil dengan luas 736 km2. Sehingga tidak pantas untuk ditambang karena dapat mengancam SDA (Sumber Daya Alam). Apalagi proses pertambangan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) selama 33 tahun atau dari tahun 2021 sampai 2054. Di mana, diketahui bahwa Pulau Sangihe terletak di dua lempeng utama, Eurasia dan Samudra Pasifik, dan dua lempeng yang lebih kecil, Sangihe dan Laut Maluku, dengan beberapa gunung berapi yang masih aktif. Singkatnya, letusan gunung berapi bawah laut Banua Wuhu dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar. Pernyataan yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang

menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Save Sangihe Island (SSI) tentang petisi penolakan izin tambang emas oleh masyarakat sekitar melalu daring. Di dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa PT. TMS telah melanggar hukum pertambangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pulau pertama di tahun 2014, dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi, tergolong pulau kecil dan tidak bisa ditambang. Selain itu, dampak industri pertambangan akan mengakibatkan hilangnya lahan pertanian penduduk. Penambangan juga merusak hutan dan membahayakan flora dan fauna endemik. Pernyataan dari kedua <mark>narasumber d</mark>iatas, memper<mark>lihatkan</mark> pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita**. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat

ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu. Penulis juga melihat, berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal.

Sedangkan, dilihat dari ukuran luas fisik kolom, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Lalu, dari pihak Pemerintah hanya dua narasumber saja yaitu Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung

oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur kompetensi sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Achmad Nasir merupakan putra lokal Sangihe yang saat ini menjadi dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sulawesi Utara yaitu Franciscus Manumpil. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu perwakilan dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan Anggota DPRD. Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Della Syahni. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 2. Berita 2

**Judul** : Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang

habitatnya terancam tambang emas

**Sumber** : Mongabay.co.id

Tanggal: 14 Juni 2021

Tabel 4. 7 Analisis Objektivitas Berita 2 (Mongabay.co.id)

No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
2	Burung	14 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	cerulean	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	flycatcher,					sesuai antara
	termasuk					judul dengan isi
	burung					berita dalam
	langka di					artikel yang di
	dunia					publikasi ke
	yang					platform media
	habitatnya					online tersebut.
	terancam					Di mana judul
	tambang					menggambarkan
	emas					data dan dampak
						dari peristiwa
						konflik yang
						terjadi memiliki
		· ·				kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Burung
						cerulean
	5					flycatcher,
						termasuk burung
						langka di dunia
						yang habitatnya
						terancam tambang emas"
				Pencantuman	Dicantumkan	Dalam artikel
				Waktu	Tidak	tersebut, sudah
				vv aktu	Dicantumkan	mencantumkan
		7			Dicantunikan	waktu dengan
						lengkap semua
	•	$\Lambda$				tanggal baik
						pemuatan
						maupun
						wawancara
			7			semua
						narasumber
						dalam berita. Hal
						tersebut ditandai
						dengan
						tanggapan yang
						disampaikan oleh
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin
						yang

	,		T		-	
						diwawancarai
						pada hari Senin,
						14 Juni 2021.
						Tanggapan
						lainnya dari
						Hanom Bashari
						selaku Pemerhati
						Ekologi dan
						Burung Liar yang diwawancarai
						pada hari Sabtu, 11 Juni 2021.
				Data	Ada	Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
				1 Chaukung	11um / Iuu	ada unsur data
						pendukung berita
			-			pada artikel
						platform media
						online
						Mongabay.co.id
						berisi tanggapan
4						atas penolakan
						izin tambang
						emas di Sangihe
						oleh Dirjen
						Minerba
						Kementerian ESDM yakni
						Ridwan
	]					Djamaluddin
						mengatakan
	1					bahwa PT.
						Tambang Mas
						Sangihe [TMS]
	1					telah
-						memenangkan
						kontrak
						penambangan emas bersama
						emas bersama yang merupakan
						bagian dari Pulau
						Sangihe. Di
						mana, termasuk
						melanggar
					4	peraturan
						Pemerintah.
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
			/	Berita	Mencampurkan	tersebut, tidak
				1	Fakta dan Opini	mencampurkan antara fakta
		V			Mencampurkan	dan opini dari
					Fakta dan Opini	wartawan.
					i akta dan Opini	Melainkan berita
						tersebut berisi
						fakta yang
						didukung dengan
						data hasil
						wawancara.
						Dapat dilihat
						dalam artikel
						tersebut berisi
1						tanggapan dari
						Dirjen Minerba Kementerian

					]	ESDM	yakni
						Ridwan	
					]	Djamaluddi	n dan
					]	Hanom Ba	ashari
					t	tentang	Pulau
						Sangihe	
					t	terancam 1	
							danya
					1	penambanga	an
					1		secara
						illegal. Seh	
						membuat h	
						yang dilin	
			K			terancam pu	
	Ketidak	berpihakan	Sumber	Seimbang			ırtikel
			Berita	Tidak			udah
				Seimbang		mencoba	
						keseimban	gan
						dalam	
						penyampaia	
						berita.	Hal
							rlihat
							ımber
						berita wawa	
						hanya diliha sisi tang	
						0.	gapan
						uari i Minerba	Dirjen
						Kementeria:	n
							yakni
						Ridwan	yakııı
						Djamaluddi	n dan
						Hanom Ba	
						selaku Pem	
						Ekologi	dan
- T						Burung	Liar.
						Seharusnya,	,
						Mongabay.	
						harus	$\checkmark$
					1	menghadirk	an
					5	semua	pihak
						, ,	erlibat
						dalam	
						pemberitaar	
						seperti dari	
						masyarakat	
	7 .				I	pihak te	rduga
1 1						yaitu PT.	
	1 / 1/ -		1			(Tambang	Emas
			1 77	0:1		Sangihe).	.21 1
		7	Luas Kolom	Seimbang			rtikel
				Tidak		tersebut, ter	
				Seimbang		unsur luas	
						kolom be t <b>idak seim</b>	ersifat
							tform
							online
						Mongabay.	
						Di mana, o	
							sebut
						hanya	Scout
						memberikar	1
						banyak	•
						kesempatan	vanø
L						patuli	J 41115

						sama pada
						narasumber
						Pemerintah
						dalam
						menjelaskan
						konflik yang terjadi di
						Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
			vanuitas	Autousi	Tidak Ada	tersebut, sudah
					Tidak Ada	ada menjelaskan
						isi artikel
						berdasarkan
				R (		Identitas
						narasumber dari
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
					•	Ridwan
						Djamaluddin
						untuk mencegah
4						bias informasi
						dan manipulasi
				T7	D 1 1 1	data.
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel
						tersebut, terdapat
						unsur <b>kontribusi</b> pelaku
						langsung, yaitu
						sudah
						menjelaskan
						permasalahan
						pada isi artikel
						berdasarkan dari
						pihak langsung
						yakni Dirjen
						Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
					Pelaku Tidak	Djamaluddin Dalam artikel
					Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat
	U				Langoung	unsur <b>kontribusi</b>
					_	pelaku tidak
		7				langsung, yaitu
						sudah
		$\Lambda$				menjelaskan
		/1				permasalahan
						pada isi artikel
			(7)		,	berdasarkan dari
			7			pihak tidak
						langsung yaitu
						Warga Sangihe,
						Jaringan
						Advokasi
						Tambang
						(JATAM), International
						Union for
						Conservation of
						Nature [IUCN],
						Hanom Bashari
						dan John Riley
		l .	I		I	com rency

				dan James C. Wardill.
			Wartawan	Dalam artikel
				tersebut, terdapat
				unsur <b>kontribusi</b>
				<b>jurnalis</b> , yaitu
				sudah
				menjelaskan
				permasalahan
				pada isi artikel
				berdasarkan dari
				pihak wartawan
				Monagabay.co.id
		K		yaitu Christopel
				Paino.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul "Burung cerulean flycatcher, termasuk burung langka di dunia yang habitatnya terancam tambang emas". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan kata "terancam" yang artinya Mongabay.co,.id menyebutkan hewan seperti satwa endemik seperti Sangi Sunbird, Sangi Hair Nisventet, Sangi Heserindit, Sangi Hesseriwan, Sangi Hered Shrimp, Sangi Heselepuk yang terancam punah akibat perizinan tambang emas Sangihe. Sehingga membuat masyarakat sekitar melakukan aksi penolakan secara bersama untuk memberhentikan perizinan tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021 yang

membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum tentang izin penambangan yang berlaku di Indonesia.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021 yang membenarkan bahwa saat ini habitat Wilayah pegunungan Sahendarman merupakan rumah Untuk 18 jenis burung yang langka yakni terdiri dari 10 jenis burung endemik dan 8 jenis endemik. Seriwang Sangihe merupakan satwa dilindungi yang telah punah, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Di mana, Ridwan mengatakan bahwa PT. Tambang Mas Sangihe [TMS] memiliki kontrak penambangan emas seluas 42.000 hektar di bagian selatan Pulau Sangihe. Luasnya mencapai 73.698 hektar, Lebih dari setengah luas Pulau Sangihe dan pulau-pulau sekitarnya. Padahal, pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi tergolong pulau kecil. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. pt. TMS memasuki tahap operasi produksi setelah menerima SK 163.K/MB.04/DJB/2021. Kami juga diperbolehkan Selama 33 tahun sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054, pertambangan emas dan tembaga terbagi lagi menjadi 80 desa di 6 kecamatan.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021. Di mana, menurut beliau Salah Salah satu dari delapan spesies burung endemik Kepulauan Sangihe. Penghuninya diketahui hanya tinggal di lembah kuno Pegunungan Sahendalman, terdapat 390-674 m di atas permukaan laut. Berdasarkan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Seriwang Sangihe merupakan satwa

dilindungi yang telah punah yang diatur oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Pemerhati Ekologi dan Burung Liar merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari k<mark>edua narasum</mark>ber diatas meng<mark>atakan</mark> berdasarkan fakta dari habitat dan tumbuhan yang dilindungi di Pulau Sangihe akan terancam punah karena adanya penambangan emas secara illegal. Sehingga membuat habitat yang dilindungi terancam punah. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Hanom Bashari selaku Pemerhati Ekologi dan Burung Liar. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah

membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Warga Sangihe, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), Hanom Bashari dan John Riley dan James C. Reilly dari Universitas Leeds, Inggris. Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Christopel Paino. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

A V G U

# 3. Berita 3

Judul : Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas

Sangihe (TMS)

**Sumber** : Mongabay.co.id

Tanggal : 22 Juli 2021

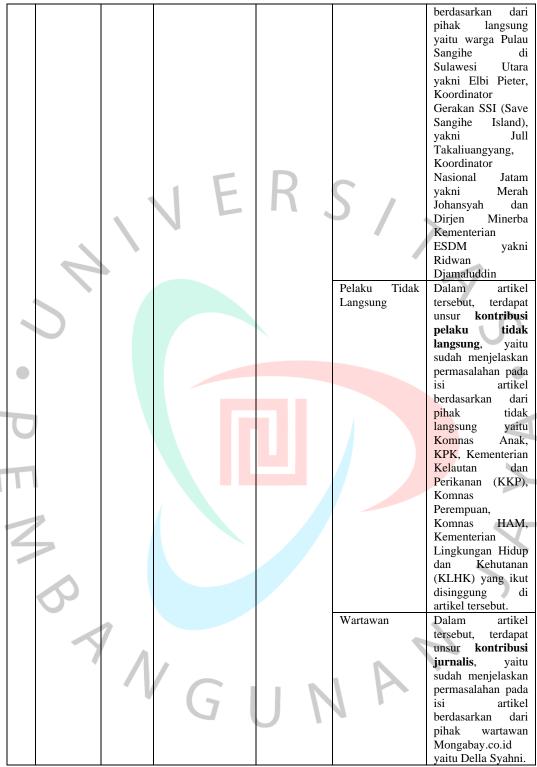
Tabel 4. 8 Analisis Objektivitas Berita 3 (Mongabay.co.id)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	W/	e 22 Juli	A 1	W	Sesuai	D-1 (1.1
3	Warga		Akurasi	Kesesuaian		Dalam artikel
	mengguga	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	t ESDM					sesuai antara judul
4	untuk UU					dengan isi berita
	Izin PT					dalam artikel yang
	Tambang					di publikasi ke
	mas					platform media
	Sangihe					online tersebut. Di
	(TMS)					mana judul
						menggambarkan
						data dan dampak
						dari peristiwa
						konflik yang terjadi
		\				memiliki
						kesesuaian dengan
						isi berita yang
						berjudul "Warga
						menggugat ESDM
						untuk UU Izin PT
						Tambang mas
						Sangihe (TMS)".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumkan
						waktu dengan
		1				lengkap semua
						tanggal baik
		7				pemuatan maupun
						wawancara semua
		$\Lambda$				narasumber dalam
		/ 1				berita. Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
					4	disampaikan oleh
			`			Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin,
						warga Pulau
						Sangihe di
						Sulawesi Utara
						yakni Elbi Pieter,
						Koordinator
						Nasional Jatam
						yakni Merah
						Johansyah dan

 ı				Γ	T7 1'
					Koordinator
					Gerakan SSI (Save
					Sangihe Island),
					yakni Jull Takaliuangyang
					yang diwawancarai
					pada hari Kamis, 22
					Juli 2021.
			Data	Ada	Dalam artikel
			Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah <b>ada</b>
			1 chantang	Troux Trou	unsur data
					pendukung berita
					pada artikel
			K		platform media
					online
					Mongabay.co.id
				-	berisi tanggapan
					atas Penolakan
				_	untuk menambang
					emas di Sangihe
					juga dilaporkan oleh Koordinator
					Nasional Jatam
					yakni Merah
					Johansyah
					mengatakan bahwa
					PT TMS termasuk
					pelanggaran dalam
					Pelanggaran Pasal
	V				26 UU tentang
					Pengelolaan
					Perlindungan Lingkungan
					(perubahan Pasal
					22 UU Cipta Kerja)
					dan aturan IUPK
					ini juga melanggar
7					kepatuhan terhadap
					Pasal 39K UU
					Minerva 3/2020. Di
					mana dalam
					Dokumen lingkungan
					diperlukan untuk
					menyetujui
	7				pembuatannya.
					Tanggapan lainnya
-	/	/			dari Dirjen
	/ 1		_		Minerba
	7				Kementerian
		7		N ,	ESDM yakni
					Ridwan Djamaluddin
					mengatakan bahwa
					Pemerintah Sulut
					memberikan Izin
					Lingkungan TMS
					diterbitkan pada 15
					September 2020.
					Peraturan
					pemerintah yang
			Faktualitas	Tidak	dilanggar.  Dalam artikel
			Berita	Mencampurka	tersebut, <b>tidak</b>
l			Dema	141chcampui Ka	terseout, tiuak

Retidakberpihaka n							
Mencampurkan Fakta dan Opini Fakta dan Opini Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan dara hasil wawancara. Dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang. Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang. Koordinator Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Keseimbangan dalam artikel tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terdihat dari sunsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dari warga Pulau Sangihe dari susur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dari warga Pulau Sangihe dari susur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam panyampaian penyampaian							
Fakta dan Opini   Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dapat dilihata dalam atrikel tersebut berisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elibi Pieter, Roordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang, Koordinator Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian Pisak Selikunan Pijamaluddin. Dirjen Minerba Kementerian Pisak Selikunan Pijamaluddin. Dirjen Minerba Kementerian Pisak Selikunan Pijamaluddin. Pijamaluddin Pijamaluddin. Pijamaluddin Pijamaluddin. Pijamaluddin Pijamaluddin. Pijamaluddin Pijamaluddin.							
Melainkan berita tersebut bersi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara. Dupat dilihat dalam artikel tersebut bersi tanggapan dari kasil wawancara. Dupat dilihat warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Jatam yakni Johansyah din Dirjem Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Diman dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian dalam penyampaian berita Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari sisi tang							_
ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Damaluddin.  Dalam artiket tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut tersihat dari sunber ketidakberpihaka n  Najatu sada hana penyampaian beria. Hal tersebut terlihat dari sunber berita wawancara hanya dilihita dari sisi tanggapa dia ketidakberpihaka n  Najatu sada hana penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sunber ketidakberpihaka n  Najatu sada hana nencoba kescimbanga dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sunber ketidakberpihaka n Najatu sada hana nencoba kescimbanga dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sunber ketidakberpihaka n Najatu sada hana nencoba kescimbanga dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sisi tanggapa dia ketidakberpihaka nencoba kescimbanga dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sunber ketidakberpihaka n Najatu ketidakbe						Fakta dan Opini	
Ketidakberpihaka n  Ketida							
ketidakberpihaka n  Ketida							
Ketidakberpihaka n   Sumber Berita   Seimbang							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumbar Berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihita dalam penyampaian berita Hal tersebut t							
Ketidakberpihaka n  Ketida							
Retidakberpihaka n   Sumber n   Berita   Seimbang   Dalam artikel tersebut terdapat unsur ketidakberpihaka n   Juli Takalituangyang, Koordinator Jatam yakni Elbi Pieter, Koordinator Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.    Seimbang							
ketidakberpihaka n Sumber n Seimbang Tidak Seimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sisi tanggapan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sisi tanggapan dalam penyampaian da							
Retidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketida							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita Scimbang Tidak Seimbang Tidak Sei					$\mathcal{D}$		
ketidakberpihaka n Sumber n Seimbang			<b>*</b>				
Retidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Simber Berita  Ketidakberpihaka n Simber Berita  Ketidakberpihaka n Simber Berita  Ketidakberpihaka n Simber Berita  Ketidakberpihaka n yakiu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangithe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id						$\cup$ / .	
Ketidakberpihaka n Sumber n Seimbang Dijamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id Merah Johansyah dan Dijen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba kesimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n Sumber Berita  Ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
Ketidakberpihaka n  Ketida							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita Seimbang Tidak Seimbang un Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang un Seimbang tersebut, terdapat un seit dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari simber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tangapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakhi Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							yakni Jull
Ketidakberpihaka n Sumber Berita Seimbang Tidak Seimbang un Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang un Seimbang tersebut, terdapat un seit dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari simber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tangapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakhi Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							Takaliuangyang,
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang tetrsebut, terdapat unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	4						Koordinator Jatam
Ketidakberpihaka Sumber Berita  Ketidakberpihaka Sumber Berita  Ketidakberpihaka Sumber Berita  Ketidakberpihaka Sumber Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Retidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Dijamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							-
Ketidakberpihaka Sumber Berita  Ketidakberpihaka Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay,co.id							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang  Retidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay,co.id							
Ketidakberpihaka n Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
Ketidakberpihaka n  Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang  Retidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takalitangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
Ketidakberpihaka n  Seimbang Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihar dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
n Berita Tidak Seimbang tersebut, terdapat unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id						~	
unsur ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
ketidakberpihaka n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id				n	Berita	Tidak Seimbang	
n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tangapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							Kelinaknerninaka
keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							
dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							n yaitu sudah
penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							n yaitu sudah mencoba
berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	1						n yaitu sudah mencoba keseimbangan
terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam
hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id							n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian
sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	Z						n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut
warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	Z						n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber
warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	Z						n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari
Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	Z						n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari
yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	Z	, B					n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau
Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	7	3					n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di
Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	7	8	7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara
Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	7	, B	7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter,
yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	7	305	7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator
Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id	7		7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save
Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island),
Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7				n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull
yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN	A	n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang,
Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN	IA	n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator
Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN	IA	n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam
Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN	A	n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah
ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN	A	n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan
Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7	G	JN		n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba
Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id			7		JN		n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian
Seharusnya, Mongabay.co.id			7		JN		n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni
Mongabay.co.id			7	G			n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan
			7	G			n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya,
			7	G			n yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya,

	1			T		
						menghadirkan
						semua pihak yang
						terlibat dalam
						pemberitaan seperti
						pihak terduga yaitu
						PT. TMS
						(Tambang Emas
						Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
					Tidak Seimbang	tersebut, terdapat
					Č	unsur luas fisik
						kolom bersifat
						sudah <b>berimbang</b>
				R		di platform media
						online
					) / .	Mongabay.co.id.
						Di mana, dalam
						artikel tersebut
						memberikan
						banyak kesempatan
						yang sama pada
4						semua narasumber
						yaitu 2 pihak dari
						Pemerintah dan 2
						pihak dari
						masyarakat dalam
						menjelaskan
						konflik yang terjadi
						di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
			vanutas	Autousi	Tidak Ada	tersebut, sudah ada
					Tidak Ada	menjelaskan isi
						artikel berdasarkan
						Identitas
						narasumber dari
						warga Pulau
						Sangihe di
						Sulawesi Utara
						yakni Elbi Pieter,
						Koordinator
						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull Takaliuangyang,
						Koordinator
		7				Nasional Jatam
		/				yakni Merah
		A				Johansyah dan
			/			Dirjen Minerba
		7				Kementerian
						ESDM yakni
					V	Ridwan yakiii
						Djamaluddin untuk
						mencegah bias
						informasi dan
						manipulasi data.
				Kompotons:	Pelaku	Dalam artikel
				Kompetensi		tersebut, terdapat
					Langsung	unsur <b>kontribusi</b>
						pelaku langsung,
						yaitu sudah
						menjelaskan
						permasalahan pada
						isi artikel
1	1		I	I		isi arukei



Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Kamis, 22 Juli 2021 berjudul "Warga menggugat ESDM untuk UU Izin PT Tambang mas Sangihe (TMS)". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan kata "gugat" yang artinya Masyarakat di Pulau Sangihe yang melaporkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) secara hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Sumber Daya Alam Kanada (ESDM) pada 29 Januari 2021 tentang izin peningkatan tahapan kegiatan produksi untuk kegiatan produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021 yang membenarkan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) telah melanggar hukum tentang izin penambangan yang berlaku di Indonesia.

Tanggapan lainnya dari Hanom Bashari yang diwawancarai pada hari Sabtu, 11 Juni 2021 yang membenarkan bahwa saat ini Habitat Pegunungan Sahendalman merupakan rumah Untuk 18 jenis burung yang langka yakni terdiri dari 10 jenis burung endemik dan 8 jenis endemik. Di mana merujuk Seriwang Sangihe merupakan satwa dilindungi yang telah punah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Tanggapan lainnya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021 yang membenarkan bahwa warga sekitar dan para komunitas menggugat periizinan PT.TMS (Tambang Emas Sangihhe) yang Pelanggaran UU Pasal 39 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan menetapkan Kesesuaian Lingkungan (KKLH). Dan melanggar izin tanpa mempertimbangkan kelayakan ekologisnya pada dasarnya melanggar "Pasal 28 UUD 1945, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia". Oleh karena itu, konsesi-konsesi yang disebutkan dalam persidangan juga dianggap telah diberikan kepada kawasan-kawasan yang dilarang oleh Undang-Undang Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1/12014. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Di mana menurut beliau PT TMS termasuk melanggar undang-undang IUPK ini juga melanggar pelaksanaan "Pengaturan pembuatan Pasal 3/2020 Pasal 39 K UU Minerva" dalam "UU Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Pasal 26 – Direvisi dengan UU Cipta Kerja Pasal 22 dan Dokumen Lingkungan".

Tanggapan lainnya dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah Sulut memberikan Izin lingkungan untuk TMS pada 15 September 2020. Izin lingkungan menyebutkan, luas areal tambang TMS 65,48 hektare dari total luas 42.000 hektare. Selain itu, industri pertambangan dapat secara signifikan meningkatkan toksisitas lingkungan, yang berdampak buruk bagi manusia dan biota alam. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Koordinator Nasional Jatam merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang

menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti telah melanggar hukum yaitu pada "UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 26-Revisi Pasal 22 UU Cipta Kerja, IUPK ini juga melanggar pelaksanaan Pasal 39 huruf k UU Minerva 3/2020" dan ramah lingkungan. Perlu persiapan. dokumen". Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe juga harus ikut diwawancarai dalam pemberitaan. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Mongabay.co.id memberikan kesempatan yang sama pada pihak narasumber dari dua pihak Pemerintah yaitu Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Lalu, dari pihak masyarakat dua narasumber saja yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber

yaitu warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu orator aksi Viesy Lengkey, warga Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yakni Elbi Pieter, Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Koordinator Nasional Jatam yakni Merah Johansyah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu mulai dari Komnas Anak, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Serta, pihak dari wartawan Mongabay.co.id yaitu Della Syahni. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

## 4. Berita 4

Judul : WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang

emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran

Tambang Emas Ilegal

**Sumber** : Mongabay.co.id

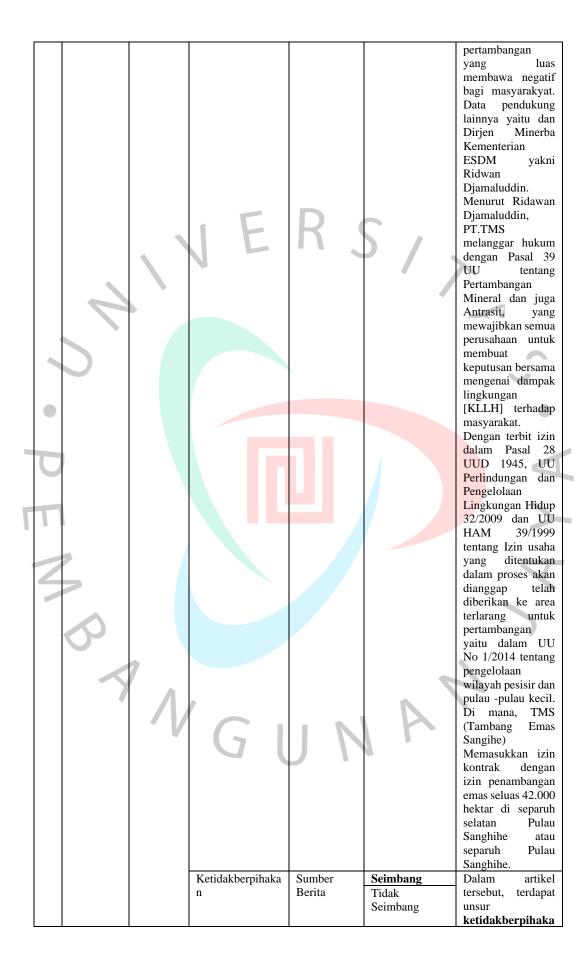
**Tanggal** : 20 Desember 2021

Tabel 4. 9 Analisis Objektivitas Berita 4 (Mongabay.co.id)

					4	
N o	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
4	WALHI	20	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	Memo	Desembe		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
4	akhir	r 2021				sesuai antara judul
	tahun,					dengan isi berita
	Masyarak					dalam artikel yang
	at Sangihe					di publikasi ke
	Tolak					platform media
	tambang					online tersebut. Di
	emas demi					mana judul
	selamatka					menggambarkan
	n Pulau					data dan dampak
	Sangihe					dari peristiwa
	yang					konflik yang
	indah dari	N N				terjadi memiliki
	kehancura					kesesuaian dengan
	n					isi berita yang
	Tambang					berjudul "WALHI
	Emas					Memo akhir tahun,
	Ilegal					Masyarakat
						Sangihe Tolak
						tambang emas
						demi selamatkan
						Pulau Sangihe
						yang indah dari
						kehancuran
						Tambang Emas
						Ilegal".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
	•			n Waktu		tersebut, sudah
					Tidak	mencantumkan
					Dicantumkan	waktu dengan
						lengkap semua
			7			tanggal baik
						pemuatan maupun
						wawancara semua
						narasumber dalam
						berita. Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
						disampaikan oleh
						Koordinator
						Gerakan SSI (Save
						Sangihe Island),
						yakni Jull
	<u> </u>					Takaliuangyang,

Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak	
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampala Jaring Kawasan Indonesia Amar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangny pesisir erosi, pasang, pasang, pasang, permuka yang aki terjadi, terhadap daya daya daya daya daya daya daya	Nusa
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampala Jaring Kawasan Indonesia Amar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangny pesisir erosi, pasang, pasang, pasang, permuka yang aki terjadi, terhadap daya daya daya daya daya daya daya	Timur
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Tidak Ada  Data Data Data Data Data Data Data D	
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada patform online Mongaba berisi atas peno tumbang Sangihe disnampai Jaring Kawasan Indonesia Ancaman Adamak Alamak Ancaman dadampak Ancaman dadampak Ancaman dadampak Ancaman dadampak Ancaman dadampak Ancaman dadampak Ancaman Pengelola uterhadap daya daya daya daya daya Pedoman Pengelola uterhadap daya daya Pedoman Pengelola uterhadap daya daya Pedoman Pengelola uterhadap daya daya daya Pedoman Pengelola uterhadap daya daya Pedoman Pengelola Lisensi. pendukur	Exwar,
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  T	Minerba
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Dalam Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi datas peno tas banga Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesis Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, Imusim penangka hilangny; pesisir erosi, pasang, permukas yang akt terjadi, terjadaj daya Pedegenal	
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi i disampai Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, jumsim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelok Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam Pada Pada Palafform online Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, Imusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	yakni
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi ut atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aki terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelok Sumber Alam Ancaman Pentamba	
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi ut atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aki terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelok Sumber Alam Ancaman Pentamba	din yang
Data Pendukung    Data	
Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Un pendukun pada platform online Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesis Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	mat, 17
Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam tersebut, ada un pendukun pada platform online Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampai Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukat yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Pendukung  Tidak Ada  tersebut, ada un pendukur pada platform online  Mongaba berisi utas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukax yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pendukur pendukur pada pada platform online  Tidak Ada  tersebut, ada un pendukur pada platform online  Mongaba berisi utas peno tambang Sangihe disampai Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman elemangka hilangnya pendukur pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pada platform online Pengelola Sumber Alam Ancaman Pengelola Sumber Alam Ancaman P	artikel
ada un pendukur pada platform online Mongaba berisi ta atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi.	sudah
pendukur pada platform online Mongaba berisi (a atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi.	
pada platform online Mongaba berisi da atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur pen	
platform online Mongaba berisi tatas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, j musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukat yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	
online Mongaba berisi datas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, j musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukar yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	artikel
Mongaba berisi atas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukat yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelok Sumber Allam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur perdamkar pendukur	media
berisi datas peno tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi.	,
atas peno tambang Sangihe disampai Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukat yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi.	
tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, j musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	anggapan
tambang Sangihe disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, j musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	lakan izin
Sangihe disampai Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, I musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. ipendukur	emas di
disampail Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, I musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. isendukur	
Jaring Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, p musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, parmukar yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	
Kawasan Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, In musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	Nusa
Indonesia Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Asmar Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, Imusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Mengatal dampak Ancaman dan eko dampak iklim, pmusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi, pendukur	Exwar.
dampak Ancaman dan eko dampak iklim, p musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Ancaman dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
dan eko dampak iklim, pusim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	dari
dampak iklim, p musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
iklim, musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
musim penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	Krisis
penangka hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	erubahan
hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
hilangnya pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	pan ikan,
pesisir erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
erosi, pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	karena
pasang, permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	banjir
permukaa yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	kenaikan
yang aka terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
terjadi, terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
terhadap daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
daya Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	ancaman sumber
Pedoman Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Pengelola Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	pangan.
Sumber Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Alam Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	
Ancaman Pertamba Lisensi. pendukur	Daya
Pertamba Lisensi. pendukur	Terkait
Lisensi. pendukur	
pendukur	ngan
pendukur	Data
	g lainya
yaitu yaitu	Dirjen
Minerba	J
Kementer	ian
ESDM	yakni
Ridwan	yakiii
Djamaluc	din
Mengatal	
bahwa F	
(Tamban	
Sangihe)	telah

	memasukkan izin kontrak penambangan emas di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe memiliki luas 42.000 hektar
	penambangan emas di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe memiliki luas 42.000 hektar
	emas di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe memiliki luas 42.000 hektar
	Sangihe. Pulau Sangihe memiliki luas 42.000 hektar
	Sangihe memiliki luas 42.000 hektar
	luas 42.000 hektar
	atau setengah dari
	luas Pulau Sangihe. Luas ini
	Luasnya sekitar
	73.698 hektar,
	setengah dari luas
	Pulau Sangihe dan
	pulau-pulau
	kecilnya.
Faktualitas Tidak	Dalam artikel
Berita Mencampurka	
n Fakta dan	
Opini	antara fakta dan
Mencampurkar	
Fakta dan Opin	
	Melainkan berita tersebut berisi
	fakta yang didukung dengan
	data hasil
	wawancara. Dapat
	dilihat dalam
	artikel tersebut
	berisi tanggapan
	Jaring Nusa
	Kawasan Timur
	Indonesia yakni Asmar Exwar.
	Menurut Asmar
	Exwar, adanya
	pertambangan
	emas di Sangihe
	akan
	mengakibatkan
	Ancaman
	ekonomi, budaya,
	sosial, politik dan
	lingkungan terhadap
	kehidupan
	masyarakat Pulau
	Sangihe. Sejak izin
	pertambangan
	Tanpa dicabut,
	kondisi
	permasalahan ini
	akan menambah
	daftar panjang permasalahan
	lingkungan, seperti
	konflik
	kemiskinan di
	pulau-pulau kecil
	seperti Pulau
	Sangihe. Hak
	Asasi manusia dan
	kegiatan



						n yaitu sudah mencoba
						keseimbangan
						dalam
						penyampaian
						berita. Hal tersebut
						terlihat dari
						sumber berita
						wawancara hanya
						dilihat dari sisi
						tanggapan Koordinator
						Gerakan SSI (Save
			1	R		Sangihe Island),
						yakni Jull
						Takaliuangyang,
						Jaring Nusa
						Kawasan Timur Indonesia yakni
						Asmar Exwar,
						Dirjen Minerba
4						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
			7			Djamaluddin. Seharusnya,
						Mongabay.co.id
						harus
						menghadirkan
						semua pihak yang
						terlibat dalam
						pemberitaan
		\				seperti pihak terduga yaitu PT.
						TMS (Tambang
						Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
					Tidak	tersebut, terdapat
					Seimbang	unsur luas fisik kolom bersifat
						belum berimbang
						di platform media
						online
						Mongabay.co.id.
						Di mana, dalam
						artikel tersebut
	7	<b>A</b>				hanya memberikan banyak
	4					kesempatan pada 2
		' V				narasumber dari
		•				pihak masyarakat.
			7			Sedangkan dari
						pihak Pemerintah hanya satu
						nanya satu narasumber dalam
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
					Tidak Ada	tersebut, sudah
						<b>ada</b> menjelaskan isi artikel
						berdasarkan
1						
						Identitas

				narasumber dari
				Koordinator
				Gerakan SSI (Save
				Sangihe Island),
				yakni Jull
				Takaliuangyang, Jaring Nusa
				Kawasan Timur
				Indonesia yakni
				Asmar Exwar,
				Dirjen Minerba
				Kementerian
				ESDM yakni
		K		Ridwan
				Djamaluddin
				untuk mencegah bias informasi dan
				manipulasi
		Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
		Rompetensi	Langsung	tersebut, terdapat
			88	unsur <b>kontribusi</b>
				pelaku langsung,
				yaitu sudah
				menjelaskan
				permasalahan pada
				isi artikel berdasarkan dari
				pihak langsung
				yaitu Koordinator
				Gerakan SSI (Save
				Sangihe Island),
				yakni Jull
	\			Takaliuangyang, Jaring Nusa
				Jaring Nusa Kawasan Timur
				Indonesia yakni
				Asmar Exwar,
				Dirjen Minerba
				Kementerian
				ESDM yakni
				Ridwan
			Pelaku Tidak	Djamaluddin Dalam artikel
			Langsung	tersebut, terdapat
			Zangsang	unsur <b>kontribusi</b>
	7			pelaku tidak
				langsung, yaitu
•				sudah menjelaskan
	/ //	1		permasalahan pada isi artikel
				berdasarkan dari
		, ,	N.	pihak tidak
				langsung yaitu
				masyarakat
				Sangihe dan tokoh
				publik seperti artis
				Emil Salim, Kaka Slank dan Laode
				Syarif Laode
			Wartawan	Dalam artikel
				tersebut, terdapat
				unsur <b>kontribusi</b>
				jurnalis, yaitu
				sudah menjelaskan

				lahan pada
			isi	artikel
			berdasaı	rkan dari
			pihak	wartawan
			Monaga	bay.co.id
			yaitu	Christopel
			Paino.	

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

## 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada Senin, 20 Desember 2021 berjudul "WALHI Memo akhir tahun, Masyarakat Sangihe Tolak tambang emas demi selamatkan Pulau Sangihe yang indah dari kehancuran Tambang Emas Ilegal". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan menjelaskan kata "catatan akhir tahun" yang artinya Mongabay.cp,.id telah merangkum selama 1 tahun terakhir dari aksi penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap perizinan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang melanggar hukum dari bulan Maret sampai Desember 2021. Salah satu alasan dari masyarakat menolak perizinaan tambang emas karena berdampak pada tumbuhan dan hewan yang dilindungi akan terancam punah. Serta, akan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar yang rata-rata pekerjaannya ialah petani dan nelayan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021 yang membuktikan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sagihe) belum mendapatkan izin pertambangan dari Kementrian Kelauatan dan Perikanan. Tanggapan lainnya datang dari Bupati Kepulauan Sangihe yaitu Jabes Gaghana

yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021. Dalam wawancara Jabes mengatakan Pemerintah Kepulauan Sangihe dari tahun 2017 tidak pernah menandatangani satu surat dari perizinan pertambangan Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar mengatakan Pulau Sangihe termasuk salah satunya adalah Eutrichomyias Rowleyi, yang juga dikenal sebagai Burung Niu. Menariknya, burung tersebut dikabarkan telah menghilang terhitung semenjak 105 tahun dari Pulau Sangihe. Hingga akhirnya ditemukan kembali oleh ahli burung Murray D. Sebelum tahun 2033, burung Seriwang pertama kali diidentifikasi pada tahun 1873 oleh seorang naturalis yakni Jerman Adolf B. Burung Seriwang pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1998, bersama dengan bukti, hingga ekspedisi oleh *Universitas York* dan John Riley dan James C. Dari Leeds dan Manado ke Gunung Sahendalman.

Data pendukung lainya yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Jumat, 17 Desember 2021 yang membenarkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar perizinan pertambangan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Di mana, berdasarkan "Pasal 28 UUD 1945, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32/2009 dan UU HAM 39/1999". Konsesi perusahaan yang dinominasikan dalam persidangan juga dianggap telah diberikan di wilayah pesisir dan wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1/12014 tentang Negara-negara Berkembang Pulau Kecil. Kedua pernyataan dari perwakilan ESDM dan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana

seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari perizinan PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) secara illegal dapat membahayakan kelangsungan kehidupan. Serta, Pulau Sangihe termasuk salah satu termasuk keragaman hayati yang sangat tinggi dan harus dilindungi karena habitat dan tumbuhan yang terancam punah. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahka<mark>n antara fakta dan opini dari wa</mark>rtawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang

objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Lalu, dari pihak Pemerintah hanya satu narasumber saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

## 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan tokoh publik atas seperti Emil Salim, Kaka Slank dan Laode Syarif. Serta, dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Christopel Paino. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

## 5. Berita 5

Judul : Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa

Industri Nikel Terancacam Punah

**Sumber** : Mongabay.co.id

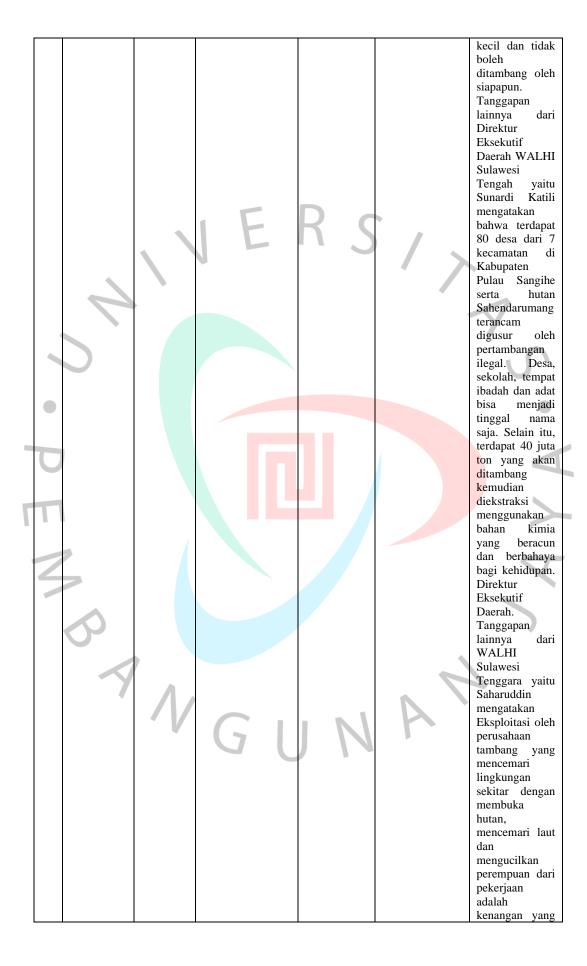
**Tanggal** : 30 Desember 2021

Tabel 4. 10 Analisis Objektivitas Berita 5 (Mongabay.co.id)

N	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0						
5	Pernyataan	30	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	akhir tahun	Desembe		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	dari	r 2021				sesuai antara
	WALHI					judul dengan isi
	Sulawesi,					berita dalam
	Mengataka					artikel yang di
	n bahwa					publikasi ke

		ı	T		T	1.0
	Industri					platform media
	Nikel					online tersebut.
	Terancaca					Di mana judul
	m Punah					menggambarka
						n data dan
						dampak dari
						peristiwa
						konflik yang
						terjadi memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Pernyataan
				K (		akhir tahun dari
						WALHI
						Sulawesi,
						Mengatakan
						bahwa Industri
						Nikel
		•				Terancacam
					4	Punah".
				Danaantuma	Disantumlan	Dalam artikel
				Pencantuma n Waktu	Dicantumkan	
				n waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumka
						<b>n</b> waktu dengan
						lengkap semua
						tanggal baik
						pemuatan
						maupun
						wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita.
						Hal tersebut
						tanggapan dari
						atas penolakan
		/				izin tambang
						emas di Sangihe
						juga
						disampaikan
						oleh Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi Utara
						yaitu Theo
		7				Runtewene,
						Dirjen Minerba
		// ^				Kementerian
		/1/		==		ESDM yakni
		~ V				Ridwan
		_				Djamaluddin,
						Direktur
				-		Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi
						Tengah yaitu
						Sunardi Katili,
1			i e		1	Direktur
						T/114*C
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Daerah WALHI Sulawesi
						Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu
						Daerah WALHI Sulawesi

_						
						Eksekutif
	1					Daerah WALHI
						Sulawesi
						Selatan yaitu
						Muhammad Al
						Amin yang
						diwawancarai
						pada hari
						Kamis, 30
				Data	Ada	Desember 2021.  Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, suda
				rendukung	Huak Aua	ada unsur data
				$D \subset$		pendukung
						berita pada
						artikel platform
						media online
						Mongabay.co.id
						berisi tanggapan
		<b>&gt;</b>				dari
					,	atas penolakan
						izin tambang
						emas di Sangihe
						juga
	1					disampaikan
						oleh Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI Sulawesi Utara
						yaitu Theo
					1	Runtewene,
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin
		/				mengatakan
						bahwa
						Pemerintah
						telah
						Menerbitkan
						Peraturan
						Produksi
						No.163.K / MB.04 / DJB /
						MB.04 / DJB / 2021 seluas
		7				42.000 hektar
		1				area konsesi
	•			_		lingkungan
	1			1 11		hidup Yang
						artinya setengah
			7			dari luas pulau
	1			-		Sangihe.
						Sebagaimana
						dalam peraturan
	1					UU Nomor 1
	1					Tahun 2014,
						tentang pulau-
						pulau dengan
	1					luas daratan
						kurang dari
						2000 Km2 yang
	1					dikategorikan sebagai pulau
L	1					sebagai pulau



						tak terlupakan
						dan pendidikan.
						Tanggapan
						lainnya dari
						Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi
						Selatan yaitu
						Muhammad Al
						Amin
						mengatakan bahwa tambang
				D		
					<i>I</i>	emas dapat
						menyebabkan
						Penggundulan
					*	hutan lindung
						juga
					*	menyebabkan
						pencemaran
				D1. "	7D* 1 1	sungai dan laut.
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurka	tersebut, <b>tidak</b>
					n Fakta dan	mencampurka
					Opini	n antara fakta
					Mencampurkaa	dan opini dari
					n Fakta dan	wartawan.
					Opini	Melainkan
						berita tersebut
						berisi fakta yang
						didukung
						dengan data
						hasil
						wawancara.
111						Dapat dilihat
						dalam artikel
						tersebut berisi
						tanggapan dari
						Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi Utara
						yaitu Theo
						Runtewene,
						Dirjen Minerba
		7				Kementerian
	7					ESDM yaitu
	•	// /				Riidwa
		/ 1/		1		Djalaludin,
		V				Direktur Ekselyytif
			7		-	Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi
						Tengah yaitu
						Sunardi Katili,
						Direktur Ekselyytif
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi
						Tenggara yaitu
						Saharuddin,
						Direktur
						Eksekutif
1	1					Daerah WALHI

						Sulawesi
						Selatan yaitu
						Muhammad Al
						Amin. Menurut
						hasil
						wawancara
						tersebut
						WALHI
						wilayah
						Sulawesi telah
						merilis laporan
						akhir tahun
						tentang dampak
				D		lingkungan dan
					/	sosial dari
				' '		industri nikel di
						wilayah
						Sulawesi.
			Vatidalshamihalsa	Sumber	Saimbana	Dalam artikel
		<b>,</b>	Ketidakberpihaka	Sumber Berita	Seimbang	tersebut, <b>tidak</b>
			n	Denta	Tidak Soimbong	keseimbangan
					Seimbang	dalam
1						penyampaian
						berita. Hal
						tersebut terlihat
						berita
						wawancara
						hanya dilihat
						dari sisi
						tanggapan dari
						Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
	1					Sulawesi Utara
		,				yaitu Theo
						Runtewene,
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yaitu
	_					Riidwa
						Djalaludin,
						Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
		7				Sulawesi
						Tengah yaitu
					\ \ \	Sunardi Katili,
		/ 1/		- 1		Direktur
		V				Eksekutif
			(7)		-	Daerah WALHI
			7			Sulawesi
						Tenggara yaitu
						Saharuddin,
						Direktur
						Eksekutif
						Daerah WALHI
						Sulawesi
						Selatan yaitu
						Muhammad Al
						Amin.
						Seharusnya,
						Mongabay.co.id
						harus

Luas Kolom   Seimbang   Dalam artikel tersebut, samaju shak kolom   Seimbang   Dalam artikel terdapa yaitu   Samaju shak kolom bersifat tidak berimbang di platform media ontine   Mongabaye.o. id . Di mana, dalam artikel tersebut, banyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak Pemerintah dalam menjelaskan sonfik yang terjadi di Sangihe.    Validitas   Atribusi   Ada							
Validitas							menghadirkan
Validitas Atribusi Ada arasumber dari pinak horyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak penerintah dalam menjelaskan isi arikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada narasumber dari pinak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak horyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, sudah ada narasumber dari pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Polam artikel tersebut, bang dari dalam menjelaskan isi narikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam menjelaskan isi narikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam di pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam di pinak bermatah yang terjadi pinak bermatah yang terjadi pinak bermatah yang terjadi							semua pihak
Validitas Atribusi Ada arasumber dari pinak horyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak penerintah dalam menjelaskan isi arikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada narasumber dari pinak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak horyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, sudah ada narasumber dari pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Polam artikel tersebut, bang dari dalam menjelaskan isi narikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam menjelaskan isi narikel berdasarkan idenitias narasumber dari pinak yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam di pinak bermatah yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, bang dalam di pinak bermatah yang terjadi pinak bermatah yang terjadi pinak bermatah yang terjadi							
Luas Kolom							
Validitas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Atri							
Lugs Kolom  Lugs Kolom  Seimbang  Tidak Seimbi							
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak  Tidak Seimbing  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur unas fisik kolom bersifat tidak berimbang di platform media onfine  Mongabay.co.id  Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konfisik yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konfisik yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Kadili, Direktu							
Validitas Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Dalam artikel  tersebut, stementerian  dalam artikel  tersebut, stementerian  tersebur, stementerian  ters							
Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Derimbang Tidak De							
Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat fidak berimbang di plaform media onfine Mongabay, co. id Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sanagibe.  Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  T							
Validitas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Atri							
Validitas							
Validitas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ad					7 77 1	0 1	
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif					Luas Kolom		
Validitas					R (		
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif						Seimbang	
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut hanyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangibe.  Validitas Atribusi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tid							
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tridak Ada Trikel berdasarkan Identitas narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tolalam artikel berdasarkan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut hanya kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konfili yang terjadi di Sangihe.  Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif						~	
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tid						4	
dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama pada narasumber dari pihak Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel berdasarkan Identitas narasumber dari pihak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Dalam artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif	4						
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isf artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Utara yaitu Riidwa Utara yaitu Riidwa Utara yaitu Riidwa Utara waitu Riid							
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tid							
Validitas							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif							yang sama pada
Validitas Atribusi Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif							narasumber dari
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							pihak
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							Pemerintah
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							dalam
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							menjelaskan
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							-
Validitas Atribusi  Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Riidwa Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak A							
Tidak Ada  tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif			/	Validitas	Atribusi	Ada	
ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							tersebut, sudah
menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
artikel berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
berdasarkan Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Identitas narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
narasumber dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif		~					
Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif					1		
Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif			V				
ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Sunardi Katili, Direktur Eksekutif							
Direktur Eksekutif							
Eksekutif							
Daerah WALHI							
<u> </u>	1						Daerah WALHI

					Sulawesi
					Tenggara yaitu
					Saharuddin,
					Direktur
					Eksekutif
					Daerah WALHI
					Sulawesi
					Selatan yaitu
					Muhammad Al
					Amin untuk
					mencegah bias
					informasi dan
					manipulasi data.
			Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
			Kompetensi	Langsung	tersebut,
			' '	Langsung	terdapat unsur
		V			kontribusi
					pelaku
					langsung, yaitu
					sudah
					menjelaskan
					permasalahan
					pada isi artikel
					berdasarkan
					dari pihak
					langsung yaitu
					Direktur
					Eksekutif
					Daerah WALHI
					Sulawesi Utara
					yaitu Theo
					Runtewene,
					Dirjen Minerba
					Kementerian
					ESDM yakni
					Ridwan
	/				Djamaluddin,
					Direktur
					Eksekutif
					Daerah WALHI
					Sulawesi
					Tengah yaitu
					Sunardi Katili,
					Direktur
					Eksekutif
					Daerah WALHI
					Sulawesi
	7 A				
	<b>'</b> / / /				Tenggara yaitu
	/ 1/		1		Saharuddin,
					Direktur
		(7)			Eksekutif
		7	/ 1 4		Daerah WALHI
					Sulawesi
					Selatan yaitu
					Muhammad Al
					Amin.
				Pelaku Tidak	Dalam artikel
				Langsung	tersebut,
					terdapat unsur
					kontribusi
					pelaku tidak
					langsung, yaitu
					sudah
					menjelaskan
L L	L .	l .		l .	jerushun

	E	R s	Wartawan	permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu WALHI Region Sulawesi dan Warga Sangihe. Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi jurnalis, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan
			,	wartawan Mongabay.co.id yaitu Wahyu Chandra.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Mongabay.co.id pada 30 Desember 2021 berjudul "Pernyataan akhir tahun dari WALHI Sulawesi, Mengatakan bahwa Industri Nikel Terancacam Punah". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan data dan dampak dari peristiwa konflik yang terjadi dengan menjelaskan kata "catatan akhir tahun" yang artinya Mongabay.cp,.id telah merangkum selama 1 tahun dari kasus konflik tambang emas Sangihe yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di Sulawesi, lebih tepatnya di Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI

Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Di mana menurut beliau menurut "UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang".

Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Sangi, Hutan Sahendalman terancam punah. Terdapat desa, sekolah, tempat ibadah dan adat bisa menjadi tinggal nama saja. Selain itu, terdapat 40 juta ton akan diambil secara illegal, kemudian diekstraksi menggunakan bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi oleh perusahaan pertambangan yang menggunduli hutan dan mencemari laut dan lingkungan mengisolasi perempuan dari pekerjaan. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau penambangan nikel tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga mencemari sungai dan lautan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Di mana menurut beliau Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe. Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2014,

pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang.

Data pendukung lainnya tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau terdapat 80 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Sangi, Hutan Sahendalman terancam punah. Terdapat desa, sekolah, tempat ibadah dan adat bisa menjadi tinggal nama saja. Selain itu, terdapat 40 juta ton akan diambil secara illegal, kemudian diekstraksi menggunakan bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

Data pendukung lainnya tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beliau eksploitasi oleh perusahaan pertambangan yang menggunduli hutan dan mencemari laut dan lingkungan mengisolasi perempuan dari pekerjaan. Tanggapan lainnya dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin yang diwawancarai pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Menurut beli<mark>au penamban</mark>gan nikel tidak <mark>hanya m</mark>enyebabkan deforestasi, tetapi juga mencem<mark>ari sungai d</mark>an lautan. Ketig<mark>a pern</mark>yataan dari perwakilan ESDM dan Pemerhati Ekologi dan Burung Li Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara, Tengah dan Tenggara merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari tiga narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah

WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.

Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari WALHI Sulawesi telah menerbitkan laporan akhir tahun tentang dampak lingkungan dan sosial dari industri nikel di wilayah Sulawesi. Di Sulawesi Utara, 57.000 jiwa, terutama perempuan dan anakanak, telah dievakuasi dari 80 desa, serta hilangnya nyawa petani dan nelayan akibat rusaknya sumber air nelayan tradisional. Di Sulawesi Tengah, dampak pengolahan nikel di Kompleks Industri Morowari (IMIP) di Indonesia telah menimbulkan pencemaran dari pembuangan limbah tailing, berdampak pada kerusakan terumbu karang dan mata pencaharian nelayan pesisir. Sedangkan, di Sulawesi Utara terdapat eksploitasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan tambang secara illegal. Seperti menebang hutan sembarangan, mencemari laut sehingga menjadikan perempuan di Sulawesi Utara diasingkan dari pekerjaannya. Di Sulawesi Selatan, terdapat penambangan nikel secara ilegal yang menyebabkan deforestasi alam hutan sehingga t<mark>erjadinya penc</mark>emaran alam di s<mark>ungai a</mark>taupun laut. Pernyataan dari ketiga narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Mongabay.co.id sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan Direktur Eksekutif Daerah WALHI

Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin.

Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran luas fisik kolom, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Mongabay.co.id hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu D<mark>irektur Eksek</mark>utif Daerah WAL<mark>HI Sul</mark>awesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Seharusnya, Mongabay.co.id juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Ridwan Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Utara yaitu Theo Runtewene, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu Riidwa Djalaludin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah yaitu Sunardi Katili, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara yaitu Saharuddin, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Al Amin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu WALHI Region Sulawesi dan Warga Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Mongabay.co.id yaitu Wahyu Chandra. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4.2.3. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Manado Post

## 1. Berita 1

Judul : Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas

Sangihe (TMS)

**Sumber** : Manado Post

Tanggal: 29 Maret 2021

Tabel 4. 11 Analisis Objektivitas Berita 1 (Manado Post)

N 4	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0				_		
1	Masyaraka	20	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	t Bowone	Desembe	1 III di dist	Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	menolak	r 2021		Judui dan isi	Tidak Sesuai	sesuai judul
	keberadaa	1 2021				
						dengan isi berita
	n PT.					dalam artikel
	Tambang					yang di publikasi
	Emas					ke platform
	Sangihe					media online
	(TMS)					tersebut. Di
						mana judul
		\				menggambarkan
						pernyataan dari
						narasumber yaitu
		1				masyarakat atas
						peristiwa yang
						terjadi memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Masyarakat
						Bowone
						menolak
						keberadaan PT.
						Tambang Emas
		1				Sangihe (TMS)".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
		<b>/ /</b> /		n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
					Dicantumkan	mencantumkan
					Dicantumkan	waktu dengan
						lengkap semua
						tanggal baik
						pemuatan
						maupun
						wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita. Hal
						tersebut ditandai
						dengan
						tanggapan yang
						disampaikan
		l				arsamparkan

Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Luas Kolom  Seimbang  Kementerian  SEM  Seimbang  Seimbang  Berita  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Reperita dan para abibi untuk mempublikasika na artikel tentang konfisk tambang enas Sangiple.  Dalam artikel tentang konfisk tambang enas Sangiple.  Dalam artikel deresbut didak seinbang dalam penyampaiam berita terlihat dari simber berita untuk seinbang dalam penyampaiam berita terlihat dari simber tidak seinbang dalam perita terlihat dari simber tidak seinbang d							
Ridwan Dijamaluddin dan gerakan SSI (Save Sangihe Island). Scharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasika n arikel tentang konfilk tambang emas Sangihe. Dalfini arikel tersebut tidak seimbang berita terlihat dari sumber berita terlihat dari sumber berita terlihat dari sumber berita terlihat dari sumber berita tura tampa dilihat dari sumber berita tura tampa dilihat dari sumber berita tura tura maya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakn i Juli Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Juli Takaliungang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan serma pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut, tangan unsur luas fisik toolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							Kementerian
Ketidakberpihaka n Sumber Seimbang emas Sangihe Island).  Ketidakberpihaka n Sumber Berita Tidak seimbang dalam penyampaian berita tertihat dari samber berita tanggapan Koordinator Gerakan SSI Gave Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Juli Takaliuangyang . Jaring Nusa							ESDM yakni
Ketidakberpihaka n Sumber Seimbang emas Sangihe Island).  Ketidakberpihaka n Sumber Berita Tidak seimbang dalam penyampaian berita tertihat dari samber berita tanggapan Koordinator Gerakan SSI Gave Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Juli Takaliuangyang . Jaring Nusa							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang  Seimbang  Seimbang  Jalam artikel tentang konfili kambang emas Sangihe.  Jalam artikel tentang konfili kambang emas Sangihe.  Jalam artikel tentang konfili kambang emas Sangihe.  Seimbang  Seimbang  Koordinator  Gerakan SSI (Save Sangihe lisland), yakni Juli  Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Finuru Indonesia yakni Asmar Exwar: Sebarusnya, Manado Post harus nenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihaka Seimbang  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana, dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana dalam artikel tersebut hanya di platform media online Manado Post Dri mana dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya da							Diamaluddin dan
Ketidakberpihaka n Sumber Seimbang emas Sangihe.  Ketidakberpihaka n Sumber Seimbang emas Sangihe.  Berita Tidak Seimbang emas Sangihe.  Berita Tidak Seimbang emas Sangihe.  Jaring Nusa Kawasan Timer Indonesia yakni Asmar Exwar.  Seimbang semas Seimbang dalam penyampaian berita terihat dari sumber berita terihat dari sumber berita terihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI Gave Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang Jaring Nusa Kawasan Timer Indonesia yakni Asmar Exwar.  Sehrusuya, Manado Post harus harus menghadirkan sepenti pihaka Kerduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Emas Sangihe)  Luas Kolom Seimbang Emas Sangihe)  Luas Kolom Seimbang Gi platform media online Manado Post berum berimbang di platform media online Manado Post Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang  Tidak Scimbang  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak S							
Scharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahilu untuk mempublikasika nartikel tentang konflik tambang emas Sangihe.							
Ketidakberpihaka n   Sumber Berita   Seimbang   Dahim artikel tersebut tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita terlihat dari sisi tanggapan (Soordinator) Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Ekwar Scharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang teribat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam artikel tersebut terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam artikel tersebut terduga yaitu PT. TMS (Tambang dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut tersebut hanya dalam artikel tersebut hanya dalam artikel tersebut tersebut tersebut tersebut hanya dalam artikel tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut hanya dalam artikel tersebut tersebut hanya dalam artikel tersebut tersebut hanya dalam dalam artikel tersebut tersebut hanya dalam dalam artikel tersebut hanya dalam dal							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dafam artikel tersebut terihat dari sumber berita terihat dari sumber berita terihat dari sumber berita terihat dari sumber berita terihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Scharusaya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihat terduga yaitu PT. TMS (Tambang Tidak Seimbang  Tidak Seimbang Tidak Seimbang  Tidak Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang Sei							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita Seimbang emas Sangihe.  Ketidakberpihaka n Sumber Berita Tidak Seimbang emas Sangihe.  Luas Kolom Seimbang emas Sangihe tersebut harus menghadirkan semua pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambada yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang terlibat dalam pemberitaan yang te							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Luas Kolom  Seimbang  Seimbang  Seimbang  Seimbang  Seimbang  Luas Kolom  Seimbang  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Seimbang  Dalam artikel tersbut tidak seimbang dalam penyampaian berita terjihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang . Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia Kawasan Timur Indonesia Asmar Eswar Seharusya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak dajam pemberitaan seperti pihak dajam pemberitaan seperti pihak kerduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom beriifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Berita  Tidak Seimbang  Seimbang  Dalam artikel tersebut tidak seimbang dalam penyampaian berita terihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangibe Island), yakni Jull Takaliuangyang Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Ewar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Tidak Seimbang  T					$\nu$		
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang  Jalam artikel tentang konflik tambang emas Sangihe tersebut tidak seimbang dain penyampaian penyampai							
Ketidakberpihaka n   Sumber Berita   Seimbang   Dalam artikel tentang berita   Seimbang   Dalam artikel tersebut didak seimbang dalam penyampaian berita terjihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Islandy, yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timul Indonesia Tunur I					)	/	
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Sumber Berita  Seimbang Tidak Seimbang seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Dalam artikel tersebut tedapat tersebut terkebut tersebut seimbang Dalam artikel tersebut tersebut tersebut tersebut seimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut tersebut hanya							
Ketidakberpihaka n  Ketidakberpihaka n  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Amaya dilihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI Gave Sangihe Island), yakni Jull  Takaliuangyang Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakin Asmar Exwar. Seharusnya. Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaiu PT TMS (Tambang  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Luas Kolom  Dalam artikel tersebut tidak seimbang Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakin Asmar Exwar. Seharusnya. Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaiu PT TMS (Tambang Dalam artikel tersebut terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di plafform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel							
Ketidakberpihaka n Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut tidak seimbang dalam artikel tersebut tidak seimbang dalam penyampajan berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Juli Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Scharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Tidak Seimbang berita dalam artikel tersebut tuas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post, Di mana, dalam artikel tersebut hanya						4	
n Berita Tidak Seimbang dalam penyampanjan berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yatu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Dalam artikel tersebut terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya				Ketidakhernihaka	Sumber	Seimbang	
Seimbang  Seimbang dalam penyampajan berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwara Scharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Tidak Seimbang Emas Sangihe).  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di plafform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya	4	*					
berita sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pinak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas K							
berita wawancara hanya dilihat dari sisi tangapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
hanya dilihat dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							berita
dari sisi tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							wawancara
tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							hanya dilihat
Coordinator   Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull   Takaliuangyang   Jaring Nusa   Kawasan Timur Indonesia yakni   Asmar Exwar Seharusnya,   Manado Post   harus   menghadirkan   semua   pihak   yang terlibat   dalam   pemberitaan   seperti   pihak   terduga yaitu PT.   TMS (Tambang   Emas Sangihe).      Luas Kolom   Seimbang   Dalam artikel   tersebut, terdapat   unsur luas fisik   kolom   berinbang   di   platform   media   online   Manado   Post. Di   mana,   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   hanya   dalam   artikel   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   tersebut   terse							dari sisi
Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel							tanggapan
Cave Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).    Luas Kolom   Seimbang   Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Island), yakni Jull   Takaliuangyang , Jaring Nusa   Kawasan Timur   Indonesia yakni   Asmar Exwar, Seharusnya,   Manado Post   harus   menghadirkan   semua   pihak   yang terlibat   dalam   pemberitaan   seperti   pihak   terduga yaitu PT.   TMS (Tambang   Emas Sangihe).							Gerakan SSI
Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Luas Kolom  Dalam artikel  tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							(Save Sangihe
Takaliuangyang , Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas K							
Kawasan Timur Indonesia yakni Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Dalam artikel tersebut, terdapat sepembang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom   Seimbang   Dalam artikel tersebut hanya   Dost. Di mana, dalam artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel tersebut hanya   Dost. Di mana artikel							
Asmar Exwar. Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).    Luas Kolom   Seimbang   Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya		_					
menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom Seimbang Dalam artikel Tidak Seimbang Unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya			7				
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya			7			4	
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang Unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya		4		7			
TMS (Tambang Emas Sangihe).  Luas Kolom  Seimbang  Tidak Seimbang  unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya			<b>/</b>		1		
Luas Kolom  Seimbang  Dalam artikel  Tidak Seimbang  unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Luas Kolom    Seimbang   Dalam artikel tersebut, terdapat unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya					1 13		Emas Sangihe).
Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya					Luas Kolom	Seimbang	
Seimbang unsur luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya						Tidak	
kolom bersifat belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
belum berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya						- Junioung	
berimbang di platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
platform media online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
online Manado Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
Post. Di mana, dalam artikel tersebut hanya							
dalam artikel tersebut hanya							
tersebut hanya							
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l							
							•

	1			1
				kesempatan pada
				narasumber dari
				pihak
				masyarakat 2
				dalam
				menjelaskan
				konflik yang terjadi di
	Validitas	Atribusi	Ada	Sangihe.  Dalam artikel
	v anuitas	Autoust	Ada Tidak Ada	tersebut, sudah
			1 Iuan / Iua	ada menjelaskan
				isi artikel
	1	R (		berdasarkan
				Identitas
				narasumber dari
				Kepala
				Kampung
			•	Bowone yakni
				Wilmar
				Manangkoda dan
				Koordinator
				Gerakan SSI
				(Save Sangihe
	1			Island), yakni
				Jull Taladiana
				Takaliuangyang.
				untuk mencegah bias informasi
				dan manipulasi
		Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
		Kompetensi	Langsung	tersebut, terdapat
			Lungsung	unsur kontribusi
,				pelaku
				langsung, yaitu
				sudah
/				menjelaskan
				permasalahan
				pada isi artikel
				berdasarkan dari
				pihak langsung
				yaitu Kepala
				Kampung //
				Bowone yakni Wilmar
7				Manangkoda dan
/				Koordinator
Λ				Gerakan SSI
	_	_		(Save Sangihe
1 V		1 11		Island), yakni
				Jull
	7 1	1 1 7	l	Takaliuangyang.
			Pelaku Tidak	Dalam artikel
			Langsung	tersebut, terdapat
			- 0	unsur <b>kontribusi</b>
				pelaku tidak
				langsung, yaitu
				sudah
				menjelaskan
				permasalahan
				pada isi artikel
				berdasarkan dari
				pihak tidak
I				langsung yaitu

				Camat Tabukan
				Selatan Tengah
				yakni Jun
				Mananohas.
			Wartawan	Dalam artikel
				tersebut, terdapat
				unsur <b>kontribusi</b>
				<b>jurnalis</b> , yaitu
				sudah
				menjelaskan
				permasalahan
				pada isi artikel
				berdasarkan dari
		K (	~	pihak wartawan
				Manado Post.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 29 Maret 2021 berjudul "Masyarakat Bowone menolak keberadaan PT. Tambang Emas Sangihe (TMS)". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan menjelaskan aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) oleh masyarakat Bowone lewat media sosial dengan melakukan petisi online. Bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh Dunia penolakan izin tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda yang diwawancarai pada hari Senin, 20 Maret 2021 yang membenarkan bahwa awal mula terjadinya penolakan dari masyarakat Sangihe terhadap PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) karena adanya sosialisasi dari PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang tidak sejalan dengan masyarakat. Sehingga

masyarakat Sangihe mengadakan aksi penolakan dengan menandatangi Kantor Gubernur Sulut untuk mendapatkan keadilan.

Tanggapan lainya dari Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang yang diwawancarai pada hari Senin, 29 Maret 2021. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa alasan dari perwakilan para komunitas SSI (Save Sangihe Island) menolak PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) karena dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dan habitat yang dilindungi akan terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda menyebutkan para pemilik lahan yang sudah mengikuti sosialisasi yang dilakukan PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) menolak tawaran karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Harga yang ditawarkan sebesar Rp. 5.000 per meter, seharusnya PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) menawarkan harga pembebasan lahan yang sewajarnya yaitu sesuai dengan harga tanah yang terbaru. Ditambah dengan perizinan operasi PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) berjalan sampai 2054. Pernyataan dari Kepala Kampung Bowone merupakan data fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari

kepala kampung Bowone yaitu Wilmar Manangkoda dan perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yakni Jull Takaliuangyang. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari alasan masyarakkat Sangihe menolak PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) yang berawal dari sosisalisasi yang diadain menawarkan harga pembebasan lahan tanah yang tidak wajar. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan kepala kampung Bowone yaitu Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak dari Pemerinta dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari

pihak masyarakat saja yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Seharusnya, Manado Post juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

## 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Kampung Bowone yakni Wilmar Manangkoda dan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Camat Tabukan Selatan Tengah yakni Jun Mananohas dan pihak wartawan Manado Post

yaitu Clavel Lukas. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

## 2. Berita 2

Judul : Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan

Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap

industri pertambangan

**Sumber** : Manado Post

Tanggal: 12 Juni 2021

Tabel 4. 12 Analisis Objektivitas Berita 2 (Manado Post)

	N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
	2	Presiden	e 12 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	_	Jokowi,	2021	Titulusi	Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
P		kasihanilah	2021		Judul dali Isi	Tidak Sesuai	sesuai antara judul
L		rakyat, cabut					dengan isi berita
		izin					dalam artikel yang
		pertambanga					di publikasi ke
1		n Sangihe di					platform media
		Sulawesi					online tersebut.
		Utara. Ini					Hal tersebut
		adalah petisi					ditandai Di mana
		lengkap					judul
		terhadap					menggambarkan
		industri					pernyataan dari
		pertambanga	· ·				narasumber yaitu
		n					masyarakat atas
			A				peristiwa yang
		•					terjadi memiliki
			/ //		1		kesesuaian dengan
							isi berita yang
							berjudul "Presiden
							Jokowi,
							kasihanilah rakyat,
							cabut izin
							pertambangan
							Sangihe di
							Sulawesi Utara. Ini
							adalah petisi
							lengkap terhadap
							industri
							pertambangan".
					Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
					n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
						Dicantumkan	mencantumkan

						pada hari Minggu, 12 Juni 2021.
4				Data	Ada	Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
						<b>ada</b> unsur data pendukung berita
						pada artikel
						platform media
						online Manado
						Post berisi tanggapan
						wawancara
						masyarakat dan
						Dirjen Minerba Kementerian
" '	1					ESDM yakni Ridwan
						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan
						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin.
Z						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi
Z						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04
7						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas
7						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi
7	5					ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup
7						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah
7						ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe.
		1			A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar
7	S 4	1			A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang
7		1	G		A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun
		1	G	JN	A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku
		1	G	JN	A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun
			G	JN	A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau dengan luas daratan kurang
			G		A	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2
			G	JN		ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau
			G	JN		ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2
			G			ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak
			G			ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.
			G	Faktualitas Berita	Tidak Mencampurka	ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dikarenakan Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup atau setengah pulau Sangihe. Maka PT TMS terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulaupulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak

					I	
					n Fakta dan	mencampurkan
					Opini	antara fakta dan
					Mencampurkan	<b>opini</b> dari
					Fakta dan Opini	wartawan.
						Melainkan, fakta
						yang didukung
						dengan data hasil
						wawancara dari
						Masyarakat dan
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
				R		Djamaluddin.
						Seharusnya,
					•	Manado Post
						dapat
						menambahkan
					*	wawancara dari
						sisi Pemerintah
						dan para ahli untuk
4						mempublikasikan
						artikel tentang konflik tambang
						emas Sangihe.
						Agar lebih akurasi
						faktualisasi
						beritanya.
			Ketidakberpihak	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
			an	Berita	Tidak	tersebut, terdapat
			an	Derita	Seimbang	unsur
					Schnoung	ketidakberpihaka
						n yaitu sudah
						mencoba
						keseimbangan
						dalam
	_					penyampaian
						berita. Hal tersebut
						terlihat dari
						sumber berita
						wawancara hanya
						dilihat dari sisi
						tanggapan
						Masyarakat
						Sangihe dan Dirjen
						Minerba
						Kementerian
			7			ESDM yakni
		/ 1/		1		Ridwan
						Djamaluddin,
			<b>\7</b>			Seharusnya,
						Manado Post harus
						menghadirkan
						semua pihak yang terlibat dalam
						pemberitaan
						seperti pihak
						terduga yaitu PT.
						TMS (Tambang
						Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
				Luas Kololli	Tidak	tersebut, terdapat
						unsur luas fisik
	l l				Seimpano	unsui mas nsik
					Seimbang	kolom bersifat

Validitas  Validitas  Atribusi  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Pelaku Langsung Jama pada Jamado Ada  Ada  Atribusi  Atrib		1					
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang tenjadi di Sangibe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, udah ada ninjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakin Kidwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjulasi tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah nenjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah nenjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak lidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah							sudah <b>berimbang</b>
Post. Di mana dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam menjelaskan menjelaskan konfilik yang terjadi di Sangibe. Dalam artikel tersebut, sudah ada "nenjelaskan isi artikel berdsaarkan didentitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah biasi informasi dan manipulasi dan menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdsaarkan dari pihak dangsung yaitu sudah menjelaskan yaitu sudah menjelaskan permasalahan yaitu sudah menjelaskan yaitu sudah							
Validitas Atribusi  Validitas Atribusi  Validitas Atribusi  Validitas Atribusi  Penerintah dan Masyarakat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Remerintah dan menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Bulam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan lada menjelaskan lada menjelaskan lada menjelaskan lada menjelaskan pada kementerian  ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjpulasi  Kompetensi Langsung  Kompetensi Pelaku Langsung unsur kontribusi pehku langsung, yaitu masyarakat sangihe dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjpulasi unsur kontribusi pehku langsung, yaitu masyarakat sangihe dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjpulasi unsur kontribusi pehku langsung, yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjpulasi unsur kontribusi pehku langsung, yaitu masyarakat dan pihak diaka langsung, yaitu sadah menjelaskan permasalahan pada si i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah menjelaskan permasalahan pada si i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah menjelaskan permasalahan pada si i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah menjelaskan permasalahan pada si i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah menjelaskan permasalahan pada si i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah pada sada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah pada sada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah pada sada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sadah pada sada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sadah pada sada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sadah pada hadi sa i artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sad							online Manado
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, terdapat unsur suntribusi pelaku langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan haripalasi nermasalahan pada langsung yaitu masyarakat dan pemasalahan pada langsung yaitu masyarakat dari pihak liangsung yaitu masyarakat dari pihak							,
Validitas							dalam artikel
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut terdapat unsur kontribusi pelaku angung, yaitu sudah menjelaskan kompetensi Pelaku Langsung vaitu mayarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu mayarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu mayarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu mayarakat sanga pelaku langsung vaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi auritkel berdasarkar dari pihak langsung vaitu mayarakat sangah dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yaitu mayarakat sangah yaitu							tersebut
Validitas							memberikan
Validitas							banyak
Validitas							
Validitas							
Validitas							
Validitas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Pelaku Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Pelaku Tidak Ada  Tidak							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Langsung  Tidak Langs							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Langsung  Tidak Langsung  T					R (		Masyarakat dalam
Validitas  Atribusi Ada Tidak Ada							
Validitas  Atribusi  Ada Tidak Ada T						//.	I
Validitas  Atribusi  Tidak Ada  T							
Tidak Ada  tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Kompetensi Pelaku Langsung  Kompetensi Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaki langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangite dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah Adat				Validitas	Atribusi	Ada	
kompetensi  Kompetensi  Ridwan  Djamaluddin  untuk mencegah  bias informasi dan  manjulasi  Kompetensi  Rementerian  ESDM yakni  Ridwan  Djamaluddin  untuk mencegah  bias informasi dan  manjulasi  Dalam artikel  tersebut, terdapat  unsur kontribusi  pelaku langsung,  yaitu sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak langsung  yaith  wali menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak langsung  yaith  wali menjelaskan  permasalahan pada  isi  berdasarkan dari  pihak langsung  yaith  wali daka  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  pamaluddin  Dalam artikel  tersebut, terdapat  unsur kontribusi  pelaku tidak  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung  yatus  sudah  menjelaskan  permasalahan pada  isi  artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung  yatus			_				
Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Kompetensi  Pelaku Langsung  Rodan Adat  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  paritkel berdasarkan dari pihak angsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba  Kementerian  ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  paritkel berdasarkan dari pihak angsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian  ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian  ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusis pelaku tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
berdasarkan ldentitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Rompetensi Pelaku Langsung  Langsung  Rompetensi Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba (kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung vaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba (kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku tidak langsung, yaitu usudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat	4						
Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung Untuk mencegah bias informasi dan manipulasi Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku Tidak Langsung Tidak Langsung Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu	_						
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian esta waitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan peda isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan peda isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan peda isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan peda isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan peda isi artikel be							
Kompetensi Kompetensi Kompetensi Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Rompetensi  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak  Rementerian  Pelaku							
Kompetensi  Kompetensi  Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung Unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Pelaku tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung  Pelaku Tidak  Langsung							
Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu Badan Adat							
Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan parmasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan parmasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat					Kompetensi	Pelaku	
unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							tersebut, terdapat
pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat	1					8 8	
yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat			/				
menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapati unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
yaitu masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat			_				
Ridwan Djamaluddin  Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat			Λ.				
Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat			/1/				
Pelaku Tidak Langsung  Pelaku Tidak Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat			7 V				Djamaluddin
Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat						Pelaku Tidak	
unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat				7			
langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							pelaku tidak
sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							langsung, yaitu
permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							sudah menjelaskan
isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
pihak tidak langsung yaitu Badan Adat							
langsung yaitu Badan Adat							berdasarkan dari
langsung yaitu Badan Adat							pihak tidak
Badan Adat							
							Badan Adat

		Wartawan	Dalam	artikel
			tersebut,	terdapat
			unsur <b>ko</b>	ntribusi
			jurnalis,	yaitu
			sudah mer	njelaskan
			permasala	han pada
			isi	artikel
			berdasarka	an dari
			pihak v	vartawan
			Manado P	ost yaitu
			Filip Kapa	intow.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### Rincian Analisis

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul "Presiden Jokowi, kasihanilah rakyat, cabut izin pertambangan Sangihe di Sulawesi Utara. Ini adalah petisi lengkap terhadap industri pertambangan". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesua<mark>i dengan is</mark>i berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan <mark>pernyataan</mark> d<mark>a</mark>ri narasumber ya<mark>itu mas</mark>yarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang dilakukan oleh masyarakat dengan meminta presiden Jokowi untuk menyetujui penolakan penambangan emas di Sangihe dengan membaca isi tuntutan petisi yang sudah dirangkum oleh masyarakat Sangihe. Petisi tersebut sudah di ditanda tangani lebih dari 100 ribu orang yang menyetujui aksi penolakan penambangan di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda yang di wawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe bekerja sebagai nelayan dan petanni untuk meneruskan kelangsungan kehidupan.

Jika, tetap ada pertambangan disana maka sumber penghidupan masyarakat sekitar juga ikut terancam punah.

Tanggapan lainnya dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa PT TMS (Tambang Emas Sangihe) tidak pernah datang ke Pulau Sangihe sebelumnya dan tidak tahu keadaan masyarakat disana. Serta, tidak pernah tahu bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Itu artinya setengah dari luas pulau Sangihe dan termasuk melanggar hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Mongabay.co.id sudah ad<mark>a didukung o</mark>leh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan o<mark>leh Dirjen M</mark>inerba Kemente<mark>rian E</mark>SDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam wawancara tersenut menyebutkan bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Maka, PT TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti melanggar "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun". Pernyataan dari perwakilan Pemerintah ESDM merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita

tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari tuntunan petisi yang diajukan sebagai pertimbangan penolakan perizinan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melakukan pertambangan emas di Sangihe. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari ketidakberpihakan yaitu sudah mencoba unsur keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari sumber berita wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan perwakilan Masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Manado Post memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan dari pihak masyarakat yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

## 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu perwakilan Badan Adat Sangih. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Filip Kapantow. Hal

ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

## 3. Berita 3

Judul : Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang

penambangan emas di Sangihe

Sumber : Manado Post

Tanggal : 12 Juni 2021

Tabel 4. 13 Analisis Objektivitas Berita 3 (Manado Post)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0		e				
3	Puluhan ribu	12 Juni	Akurasi	Kesesuaian Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	orang	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	menandatanga					<b>se</b> suai antara
	ni petisi					judul dengan isi
	menentang					berita dalam
	penambangan	`				artikel yang di
	emas di					publikasi ke
	Sangihe	/				platform media
						online tersebut.
						Di mana judul
						menggambarka
						n pernyataan
						dari narasumber
						yaitu
						masyarakat atas
						peristiwa yang
						terjadi memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
	4	/\ /				yang berjudul
				1		"Puluhan ribu
						orang
						menandatangani
						petisi
						menentang
						penambangan
						emas di
						Sangihe".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
				11 Wakta	Dicantumkan	mencantumka
					Dicalitullikail	<b>n</b> waktu dengan
						lengkap semua
						tanggal baik
						pemuatan
1		l		1		pemuatan

maupun wawancara semua narasumber dalam herita. Hal tersebut disandai dengan tanggapan yang disampaikam oleh salah satu penggerak Save Sanghe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarati pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Dalam artikel patform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sanghe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy sampengatakan PT TMS dalam artikel patform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sanghe Island (SSI) yaitu Agrendy mengatakan PT TMS dalam paporan IUP-nya mengkahipa 42 ribu Ha wilayah Sanghe atau setengah Pulau Sanghe (SSI) yaitu Agrendy mengatakan PT Takta dan Opini duri wartawan. Fakta dan Opini duri wartawan. Takta wang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sanghe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya, Manado Post							
semua narasumber dalam berita. Hal tersebut ditandi dengam tanggapan yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Dalam artikel platform media online Manado Post berisi pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu pengerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Agrendy Saselah Agrendy Saselah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe							maupun
Pendukung  Pendukung  Pendukung  Pendukung  Pendukung  Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Data  Pendukung  Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung  Tidak Ada  Dalam artikel pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berita pada artikel platform m							wawancara
Data							semua
Hal tersebut ditandai dengan tanggapan yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada artikel platform media online Manado Post berita pada art							narasumber
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada  Tidak Lersebut, sudah  Ada  Tidak Lersebut, sudah  Tidak Lersebu							
Tidak Ada  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Fakta dan Opini  Fakta dan Opini							
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada  Tidak Denitak  Tidak Ada  Tidak Denitak  Tidak Ada  Tidak Denitak  Tidak Olimiak  Tidak Olim							
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada  Dalam artikel platform media online Manado Post berist tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Jang berita pada artikel platform media online Manado Post berist tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Watu setengah Pulau Sangihe si and nopini dari wartawartawartawartawartawartawartawart							
penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada tersebut, sudah ada usur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Mencampurka a Fakta dan Opini Mencampurka a rantara fakta dan Opini Mencampurka a rantara fakta dan opini dara wartawan fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy saselah, Scharusnya, Scharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktua							
Data Pendukung  Data Pendukung  Data Pendukung  Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada usur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Savec Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy mengatakan PT TMS dalam alaporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah an Pakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusaya,							
Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung  Ada Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Sangihe  Island (SS1)  Saselah, Agrendy Saselah, Agrendy Mencampurka Agrendy Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Sangihe  atau setengah Pulata Sangihe  atau setengah Vidak Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SS1) yaitu Agrendy Saselah, Scharusaya,							
Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post beris tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy mengatakan PT TIMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe. Dalam artikel tersebut, tidak Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,					$\cup$		
Data Pendukung  Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Agrendy  Sangihe Island  (SSI)  Yaitu  Agrendy  Saselah,  Seharusnya,  Saselah,  Seharusnya,							
Data Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada Pendukung  Tidak Ada  Dalam artikel unsur data pendukung berita pada artikel platform media onlinien Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggarak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy Saselah. Agrendy Mengatakan PT Tims dalam laporan IUP-paya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau setengah Pulau Sangihe atau matara fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggarak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya, Saselah, Seharusnya,					' '		
Data   Pendukung							
Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak pendukung  Tidak pendukung  Tidak pendukung  Tidak pendukung  Tidak pendukung  Tidak pendukung  Tidak penggarak save  Sangihe Island  Sangihe Island  Sangihe Jalam  Japoran IUP-nya  mengkapling 42  Tidak pendukung  Tidak penggarak save  Sangihe Island  Tidak penggarak penggarak save  Sangihe Jalam  Japoran IUP-nya  mengkapling 42  Tibu Ha wilayah  Sangihe  Tidak pendukung  Tidak pe							
Data Pendukung  Tidak Ada  Tidak							
Pendukung  Tidak Ada  tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SS1) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangih Pulau Sang					Data	Ada	
Agada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy Saselah Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe a							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan fakta dan Opini  Mencampurkan fakta dan Opini dari wartawan.  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							· ·
Taktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka Negarika							1
Faktualitas Berita  Faktu alitas Berita  Fakta dan Opini  Manado Post berisi tanggapan wawancara Agrendy saselah. PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe. Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka n antara fakta dan Opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
berisi tanggapan wawancara salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan opini Mencampurkan n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu pengerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta							
Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Galam artikel tersebut, tidak mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Agrendy mengatakan PT TMS dalam laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Gata Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Gata Mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
laporan IUP-nya mengkapling 42 ribu Ha wilayah Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe atau setengah Pulau Sangihe.  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka n antara fakta dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe.  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka dan opini dari wartawan. Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Berita  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,					Ealstualitas	Tidel	
n Fakta dan Opini  Mencampurkan Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Opini Mencampurkan Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,					Berna		
Mencampurkan Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,		/	1				
Fakta dan Opini wartawan.  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,					-		
Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							_
didukung dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,						,	
dengan data hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,				7			
hasil wawancara dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
(SSI) yaitu Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Agrendy Saselah, Seharusnya,							
Saselah, Seharusnya,							
Seharusnya,							
	L						

						dapat
						menambahkan
						wawancara dari
						sisi Pemerintah
						dan para ahli
						untuk
						mempublikasika
						n artikel tentang
						konflik tambang
						emas Sangihe.
						Agar terlihat akurasi dari
						Faktualitas
		1		$\cup$ $\subset$		berita.
			Ketidakberpihaka	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
			n	Berita	Tidak	tersebut, <b>belum</b>
			"	Bernu	Seimbang	seimbang
					Schibung	dalam
						penyampaian
						berita. Hal
						tersebut terlihat
4						dari sumber
						berita
						wawancara
						hanya dilihat
						dari sisi
						tanggapan salah
						satu penggerak
						Save Sangihe Island (SSI)
	1					Island (SSI) yaitu Agrendy
						Saselah,
						Seharusnya,
						Manado Post
						harus
						menghadirkan
						semua pihak
						yang terlibat
						dalam
						pemberitaan
						seperti pihak
						Pemerintah dan
						pihak terduga
						yaitu PT. TMS (Tambang Emas
						Sangihe).
		_		Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
		1		Zaas Roioili	Tidak	tersebut,
	-	/1/			Seimbang	terdapat unsur
						luas fisik kolom
			GI			bersifat belum
			7	1 3		<b>berimbang</b> di
						platform media
						online Manado
						Post. Di mana,
						dalam artikel
						tersebut hanya
						memberikan
						kesempatan
						pada narasumber dari
						pihak
						masyarakat saja
						dalam
			l	l	l	-/******

		I	T	T		
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di
			TT 11 11.	A	4.7	Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
					Tidak Ada	tersebut, sudah
						ada
						menjelaskan isi
						artikel berdasarkan
						Identitas
						narasumber dari
						salah satu
				$\cup$ $\subset$		penggerak Save
						Sangihe Island
				' \		(SSI) yaitu
						Agrendy
						Saselah untuk
						mencegah bias
						informasi dan
						manipulasi
4				Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel
					Langsung	tersebut,
						terdapat unsur
						kontribusi
						pelaku
						langsung, yaitu
						sudah
						menjelaskan
	1					permasalahan pada isi artikel
						berdasarkan dari
						pihak langsung
						yaitu salah satu
		\ \				penggerak Save
						Sangihe Island
						(SSI) yaitu
						Agrendy
						Saselah
					Pelaku Tidak	Dalam artikel
					Langsung	tersebut,
						terdapat unsur
						kontribusi
						pelaku tidak
						langsung, yaitu
						sudah menjelaskan
		1				permasalahan
	₹	/1/				pada isi artikel
				1 10		berdasarkan dari
				1/1		pihak tidak
			7 (	1 1 4		langsung yaitu
						Dinas PTSP
						Provinsi
						Sulawesi Utara,
						perwakilan
						Badan Adat
						Sangihe,
						meminta
						Presiden Jokowi
						untuk mencabut
						Undang- Undang nomor
						IUP PT TMS
		1	İ	l .		101 11 1113

				dari Sangihe.	Pulau
			Wartawan	Dalam	artikel
				tersebut, terdapat	unsur
				kontribu	
				<b>jurnalis</b> , sudah	yaitu
				menjelask	
				permasala	
				pada isi	
				berdasark	
				pihak wa	
		7 (		Manado	Post
					Tanya
				Rompas.	

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

## **Rincian Analisis**

## 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Minggu, 12 Juni 2021 berjudul "Puluhan ribu orang menandatangani petisi menentang penambangan emas di Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut memperlihatkan menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan menjelaskan alasan dari puluhan ribu orang yang mendukung penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara online. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah yang diwawancarai pada hari Minggu, 12 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut perwakilan pergerakan SSI menyetujui masyarakat Sangihe menolak penambangan emas di Kepulauan Sangihe. Di mana, realitas daerah kepulauan maka sangat tidak cocok konsep pertambangan terbuka atau pertambangan yang dikelola langsung oleh perusahaan raksasa seperti

perusahaan yang mengayomi PT TMS. Hal tersebut termasuk bentuk eksploitasi terhadap masyarakat Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dalam wawancara tersebut Agrendy mengatakan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam laporan IUP-nya mengkapling sebanyak 42 ribu Ha wilayah Sangihe dan itu bukan ukuran yang sangat kecil. Bahkan total luas areal yang sangat luas ini hanya 737 hektar. Artinya, sekitar 57% lebih sedikit setengah lebih sedikit masuk dalam wilayah susah produksi oleh PT TMS. Seharusnya masyarakat punya hak untuk menolak sebab Sangihe adalah pulau kecil yang juga dilindungi oleh undang-undang p<mark>ulau kecil yak</mark>ni "Undang-un<mark>dang No</mark>mor 1 Tahun 2014". PT.TMS saat ini menye<mark>rbu pulau te</mark>rsebut. Ini rama<mark>h ling</mark>kungan dan terutama investasi. Terutama di bidang perikanan dan penelitian sumber daya perikanan. Pernyataan dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan darisalah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan

berdasarkan fakta alasan dari masyarakat Sangihe yang mendukung penolakan perizinan tambang emas di Sangihe dengan melakukan petisi. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Seperti dari pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Seharusnya, Manado Post juga harus memberi kesempatan yang

sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari salah satu penggerak Save Sangihe Island (SSI) yaitu Agrendy Saselah. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Badan Adat Sangihe. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Tanya Rompas. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan

mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4. Berita 4

Judul : Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah

menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin

PT.TMS

**Sumber** : Manado Post

Tanggal: 13 Juni 2021

Tabel 4. 14 Analisis Objektivitas Berita 4 (Manado Post)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	Sudui	e	Difficust	Rategori	munator	renjemsan
4	Menentang	13 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	pertambangan	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut sudah
	di Sangihe,					sesuai antara
	79.000 orang					judul dengan isi
	telah					berita dalam
	menandatanga					artikel yang di
	ni petisi yang					publikasi ke
	meminta					platform media
	Jokowi					online tersebut. Di
	mencabut izin					mana judul
	PT.TMS					menggambarkan
		1				pernyataan dari
						narasumber yaitu
						masyarakat atas
						peristiwa yang
						terjadi memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Menentang
						pertambangan di
						Sangihe, 79.000
		$\Lambda$				orang telah
				10		menandatangani
						petisi yang
						meminta Jokowi
				, , ,	l.	mencabut izin
						PT.TMS". Di
						mana, dalam
						berita tersebut
						berisi tentang
						aksi penolakan
						kehadiran PT.
						TMS (Tambang
						Emas Sangihe)
						dengan
						menandatangani
						petisi secara
						daring yang

					dilakukan sampai
					100 ribu tanda
					tangan dari
					masyarakat yang
					mendukung aksi
					masyarakat
					menolak izin
					tambang emas di
					Sangihe.
			Pencamtum	Dicantumkan	Dalam artikel
			an Waktu	Tidak	tersebut, sudah
				Dicantumkan	mencantumkan
					waktu dengan
			K (		lengkap semua
					tanggal baik
					pemuatan maupun
					wawancara semua
					narasumber dalam
					berita. Hal
					tersebut ditandai dengan tanggapan
					yang disampaikan
					oleh Dirjen
					Minerba
		)			Kementerian
					ESDM yakni
					Ridwan
					Djamaluddin dan
					masyarakat
					Sangihe yaitu
/					Wilmar yang diwawancarai
					pada hari Senin,
					13 Juni 2021.
			Data	Ada	Dalam artikel
			Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
					ada unsur data
					pendukung berita
					pada artikel
					platform media
					online Manado Post berisi
					tanggapan wawancara
_					masyarakat dan
					Dirjen Minerba
					Kementerian
-	1				ESDM yakni
	/ 1/		_ =		Ridwan
	V				Djamaluddin.
		<b>17</b>		,	Menurut beliau
		7			Pemerintah telah
					Menerbitkan Peraturan
					Peraturan Produksi
					No.163.K /
					MB.04 / DJB /
					2021 seluas
					42.000 hektar area
					konsesi
					lingkungan hidup.
			Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
1	1		Berita	Mencampurk	tersebut, tidak

	Ketidakberpihak an	Sumber Berita	an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Seimbang  Tidak Seimbang	mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan.  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Seharusnya, Manado Post dapat menambahkan wawancara dari sisi Pemerintah dan para ahli untuk mempublikasikan artikel tentang konflik tambang emas Sangihe.  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur ketidakberpihak an yaitu sudah mencoba keseimbangan dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Masyarakat Sangihe dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, Seharusnya, Manado Post harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang
		Luas Kolom	Seimbang Tidak Seimbang	terlibat dalam pemberitaan seperti pihak

Validitas			T			ı	
Validitas Atribusi Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tid							di platform media
Validitas Atribusi Ada Pemerintah dalam artikel tersebut memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber yaitu dari pihak Masyarakat dan Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangibe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Idemfus narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakoi Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan manjulasi untuk mencegah bias informasi dan menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak dalan gangung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasalahan permasal							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribus pelaku langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada sia artikel berdasarkan dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakin Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasa dan manipulasa dan menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dan di dentribus dentribus dentribus dan di dentribus dentrib							
Managang   Managang							
Validitas Atribusi Ada  Validitas Atribusi Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Rompetensi Pelaku Langsung  Kompetensi Pelaku Langsung  Tidak Pelak							
kesempatan yang sama pada sema pada sema pada sema pada sema pada sema pada sema pada sema pada sema pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sampat.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan identitas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakhi Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung. yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi Ridwan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi Ridwan pada isi artikel berdasarkan dari pihak idak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakhi kidak dan Dirjen Minerba kement							
Validitas							
Validitas  Atribusi  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Kompetensi  Kompetensi  Ridwan  Djamaluddin  menjelaskan kementerian  ESDM yakni Ridwan  Djamaluddin  mutu mencegah bias informasi dan  menjelaskan kementerian  ESDM yakni Ridwan  Djamaluddin  mutu mencegah bias informasi dan  manjapulasi  Dalam artikel tersebut, sudah  Ridwan  Djamaluddin  mutu mencegah bias informasi dan  manjapulasi  Dalam artikel tersebut, terdapati  pelaku langsung, yaitu sudah  menjelaskan permasalahan  pada isi artikel berdasarkan  Kementerian  pihak langsung, yaitu sudah  Kementerian  pilamaluddin  Tidak Pelaku  Langsung  Tidak Pelaku  Tidak Pelaku  Langsung  Tidak Pelaku  Langsung  Tidak Pelaku  Tidak Pelaku  Tidak Pelaku  Langsung  Tidak Pelaku  Langsung  Tidak Pelaku  Ti							
Validitas Atribusi Ada Pemerintah dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasyumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Dirjam Jalam artikel Langsung terjadi di Sangihe.  Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel Langsung terjadi di Sangihe.  Langsung terjadi di Sangihe.  Kompetensi Pelaku Langsung untuk mencegah bias informasi dan manipulasi berdaku langsung, yaitu mayarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Dijamaluddin datu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu mayarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Dijamaluddin Tidak Pelaku Langsung yaitu mayarakat dan Dirjen Minerba kementerian ESDM yakni Ridwan Dijamaluddin Tidak Pelaku Langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas FTSP Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Dinas FTSP Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Dinas FTSP Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Dinas FTSP Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langsung yaitu Provinsi Stulawesi Variori pihak tidak langs							
Validitas Atribusi  Validitas Atribusi  Ada  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelak langsung, yaitu mayarakat dan permasalahan pada isi artikel berdasakan dari pihak langsung, yaitu mayarakat dan Dimanladdin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung yaitu mayarakat dan Dimanladdin  Tidak Pelaku Langsung yaitu mayarakat dan Dimanladdin  Tidak Pelaku Langsung yaitu mayarakat dan Dimanladdin  Tidak Pelaku Langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak idaka langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak idaka langsung yaitu Dimas PTSP  Provinsi Studawai yaitu Dimas PTSP  Trovinsi Studawai yaitu Dimas PTSP							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak A							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Mada  T							
Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Tidak Ada  Ada  Dirjen Minerba  Kementerian  ESDM  yakit  Balam  Ada isi artikeb  berdasakan dari  pihak Iangsung,  yaitu masyarakat  dan  Dirjen  Minerba  Kementerian  ESDM  yakit  sudah  menjelaskan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan dari  pihak Iangsung,  yaitu masyarakat  dan  Dirjen  Minerba  Kementerian  ESDM  yakit  Balam  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  peda isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalahan  permasalahan  permasalahan  pada isi artikeb  berdasakan  permasalah					$\nu$		
Validitas							
Validitas					)	/ /	
Tidak Ada tersebut, sudah ada menjelaskan si artikel berdasarkan ldemtas narasumber dari masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyaraka dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Tidak Pelaku Langsung waitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu masyarakan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pimasuladin Dalam artikel tersebut, terdapatu unsur kontribusi pelaku tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarakan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak la		`		Validitas	Atribusi	Ada	
Kompetensi							tersebut, sudah
Berdasarkan   Identitas   Id							ada menjelaskan
Kompetensi							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pel							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku  Tidak Pela							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pel							
Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung Langs							
Kompetensi Pelaku Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung yaitu mayarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Dirjen Minerba kementerian et sebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian et sebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba kementerian et sebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan dari pihak tidak langsung yaitu							
Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Dalam artikel  tersebut, terdapat  unsur kontribusi  pelaku langsung,  yaitu sudah  menjelaskan  permasalahan  pada isi artikel  berdasarkan dari  pihak langsung  yaitu masyarakat  dan Dirjen  Minerba  Kementerian  ESDM yakni  Ridwan  Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  unsur kontribusi  pelaku tidak  langsung, yaitu  sudah  menjelaskan  permasalahan  pada isi artikel  berdasarkan dari  pihak tidak  langsung yaitu  Dinas PTSP  Provinsi Sulawesi							
Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung Untuk mencegah bias informasi dan manipulasi unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku langsung, vaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak							
Kompetensi Pelaku Langsung Pelaku Langsung Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung Unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
Langsung  Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Jamaluddin  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak P					Kompetensi		
pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi						Langsung	
yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi	1 1						
menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Dalam artikel  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi			/				
permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung Ungamaluddin  Tidak Pelaku Ungamaluddin  Tidak Pelaku Ungamaluddin  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
berdasarkan dari pihak langsung yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin Tidak Pelaku Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
yaitu masyarakat dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi		(A)					
Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							3
ESDM yakni Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Pelaku Tidak Langsung  Tidak Pelaku L							
Ridwan Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
Djamaluddin  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi			Λ.				
Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi		,	/1/		_		
Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi			'V			Tidak Pelaku	
unsur kontribusi pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi			-				tersebut, terdapat
langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi				7	/ \ \ \	1	
sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							_
menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi		•	1				
pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi	1					1	шешетаѕкап
berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							
pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							permasalahan
langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							permasalahan pada isi artikel
Dinas PTSP Provinsi Sulawesi							permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari
							permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu
Utara							permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP
							permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi

		Wartawan	Dalam artik	el
			tersebut, terdapa	at
			unsur kontribu	si
			jurnalis, yait	u
			sudah	
			menjelaskan	
			permasalahan	
			pada isi artik	el
			berdasarkan da	ri
			pihak wartawa	ın
			Manado Post yait	tu
			Angel Rumeen.	

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

## **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 13 Juni 2021 berjudul "Menentang pertambangan di Sangihe, 79.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta Jokowi mencabut izin PT.TMS". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita y<mark>ang di publi</mark>kasikan. Dala<mark>m isi arti</mark>kel tersebut menggambarkan pernyataan dari <mark>narasumber y</mark>aitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi dengan memperlihatkan p<mark>enjelasan dari</mark> aksi penolakan kehadiran PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dengan menandatangani petisi secara daring. Penandatanganan petisi yang dilakukan sudah sampai 79 ribu tanda tangan dari masyarakat yang mendukung aksi masyarakat menolak izin tambang emas di Sangihe, Dalam petisi tersebut meminta Presiden Jokowi untuk mencabut perizinan pertambangan dari Pt. TMS (Tambang Emas Sangihe). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Senin, 13 Juni 2021. Dalam wawancara

tersebut menyebutkan bahwa alasan masyarakat penolakan terhadap tambang emas di Sangihe dengan melakukan petisi. Diketaui bahwa Pulau Sangihe adalah pulau kecil dengan dua gunung berapi aktif di dasar laut dan gunung berapi aktif di pegunungan di atas daratan. Ini cenderung merusak bagian kerak dan pelat struktural mantel atas. Tak heran jika literatur sejarah menyebutkan bahwa letusan gunung berapi yang dahsyat menyebabkan tsunami di kepulauan kita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam wawancara tersebut, perwakilan Pemerintah ESDM menyebutkan bahwa Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K/ MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km² tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.". Sedangkan, Pulau Sangihe sendiri hanya berukuran 736 Km2. Ketika Pulau Sangihe ditambang, lahan pertanian, nelayan, dan flora dan fauna endemik kehilangan habitatnya dan terancam punah. Pernyataan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari dua

narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari kedua narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta dari PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) terbukti melanggar undang-undang tentang izin pertambangan. Di mana sudah disebutkan dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun.". Sedangkan, Pulau Sangihe sendiri hanya berukuran 736 Km2. Pernyataan dari kedua narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat ketidakberpihakan dari unsur yaitu sudah mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari sumber berita wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan perwakilan Masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, sudah seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Manado Post memberikan banyak kesempatan yang sama pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin dan dari pihak masyarakat yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan masyarakat Sangihe yaitu Wilmar Manangkoda dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari masyarakat, Dirjen

Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara dan pihak wartawan Manado Post yaitu Angel Rumeen. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 5. Berita 5

Judul : PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi

warga Sangihe

**Sumber** : Manado Post

**Tanggal** : 23 Agustus 2021

Tabel 4. 15 Analisis Objektivitas Berita 5 (Manado Post)

	N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
	0		e				
	5	PT.TMS	23	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel tersebut,
		mendudu	Agustu		Judul dan	Tidak Sesuai	sudah <b>sesuai</b> antara
		ki	s 2021		Isi		judul dengan isi berita
		peringkat					dalam artikel yang di
		ketiga					publikasi ke platform
1		dalam					media
		proses					online tersebut. Di
		intervensi					mana judul
		warga					menggambarkan
		Sangihe					pernyataan dari
							narasumber yaitu
							masyarakat atas
							peristiwa yang terjadi
							memiliki kesesuaian
			<i>A</i>				dengan isi berita yang beriudul "PT.TMS
							berjudul "PT.TMS menduduki peringkat
						I	ketiga dalam proses
			1				intervensi warga
						7	Sangihe".
					Pencantum	Dicantumkan	Dalam artikel tersebut,
					an Waktu	Tidak	sudah <b>mencantumkan</b>
						Dicantumkan	waktu dengan lengkap
							semua tanggal baik
							pemuatan maupun
							wawancara semua
							narasumber dalam
							berita. Hal tersebut
							ditandai dengan
							tanggapan yang
							disampaikan oleh
L							Penggerak Sangihe

Samsared Barahama yang diwawancarai pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021.  Data Pendukung Tidak Ada Tidak Ada Unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hukum dengan pengugata terhadap 468 orang, pengugata dan gugatan telih terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usuha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomor: 146/G/2021/Pf UN tentang olojek sengketa Keptutusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tepkaiti pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan and Opini Mencampurkan and Opini Mencampurkan and Opini Mencampurkan and Opini Mencampurkan and Opini Samsared Barahaman mengenai objek sengketa keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari Daja Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 103.K/MB.04/DJB/202 1 tangga			T	ı	1	
Data Pendukung Tidak Ada Pendukung Ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapam wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSU) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hakum dengan penggugat dan dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaba Negara di Jakarta statu PTUN dengan nomori-146/G/2021/PT UN tentang objek sengketa Keputusan Mencampurkan Fakta dan Opini Mencampurkan an Amama Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan dan Mencampurkan dan Mencampurkan dan Mencampurkan dan Mencampurkan dan Mencampurkan dan Mencampurkan dan Men						Save Island (SSI) yaitu
Data Pendukung  Ada Pendukung  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSD) yaitu Samsared Barahama, Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hukum dengan penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdatrar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomor. 146/43/201/497 UN tentang objek sengketa Keputusan Meneri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tegknit pemberian 17/in tambang pada Nomor: 136/kMB 04/DB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 laib.  Faktualitas Berita Mencampurka na Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Mencampurkan an Fakta dan Opini Sangal 29 Januari 2021 laib.  Faktualitas Berita Mencampurkan antara faktu dan opini waratawan, Melainkan, fakta yang dala hasil wawancara dari Penggerak Sangibe Save Island (SSD) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Meneri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian 12/in tambang Nomor: 163 K/MB 04/DB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tanggapan Penggerak sangibe berita wawancara haria tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tersebut terlihat dari sumber berita wawancara haria tanggapan Penggerak sangibe sangapan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibangan Penggerak sangibanga						
Data Pendukung  Ada Data artikel tersebut, sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel plaform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SIS) yaitu Samsared Barahama, Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hukum dengan penggugut terhadap 468 orang penggugut terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat media pengadian Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomori 1465/2021/PT UN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tepkati pemberian Lin tambang pada Nomori. 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari. 2021 lalu, dari wartawan an Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan dari wartawani Penggerak Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 latu, dari sumber berita wawancara dari Penggerak Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang Nomori 163 k/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari Lerkait pemberian Lin tambang No						3 0
Pendukung Penguat dara pendukung beberia kangapah Pengadian Tata Usana penggugat dan penggugat dan kuasa hikum dengan penggugat terhadap 468 orang penggugat dan pengadian Tata Usana Pengadian Tata Usan						
Pendukung  Pendukung  Tidak Ada  Sudah ada unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Manado Posts is tanggapan wawanacara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kusas hukum dengan penggugat terhadap 468 orang pengugat terhadap 4				Data	Ado	
Pendukung berita pada artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sanghie Save Island (SSI) yatiu Samsared Barahama. Di man, pengungulan tanda tangan kuasa hukum dengan penggugat terhadap des orang penggugat terhadap des orang penggugat terhadap des orang penggugat dan dengan penggugat terhadap des orang penggugat dan dengan penggugat dan dan Samata Negara di Jakarta atau PTUM dengan nomor: 146/G2/02/1977 UN tentang objeksengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Latu ESDM terkait pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januar 2021 lalu. Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan antara fakta dan Opini Mencampurkan antara fakta dan Opini Penggerak Sangibe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Jain watawan mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Jain tanggaran Penggerak Sangiba dalam penyampang Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.    Ketidakberpihak an Sumber Berita Tidak Scimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang herita, Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari subter berita wawancara hanya dilihat dari subter berita wawancara hanya dilihat dari sisa tanggapan Penggerak Sanggan Pen						,
artikel platform media online Manado Post berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahaman Di mana, penggunpulan tandak tangan kusah inkum dengan penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdaftar di Kepantrean Pengdalian Profit UN tentang objeks engketa Keputusan Menteri Energi dan Mencampurkan Pakat dan Opini Angala Pengerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsacd Barahama mengenai oberita dan berita terkati pemberian 1201.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampan berita. Hal tersebut terlihat dari sumber pengan penggugan Penggerak sangihe penderan pengan penggugan Penggerak sangihe pengerah penge				1 chaukung	Tidak Ada	
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Faktu dan Opini  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Faktu dan Opini  Faktualitas Berita  Faktu dan Opini  Faktu da						
berisi tanggapan wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kasaa hükum dengan penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 orang penggugat terhadap 468 sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM erekait pemberian Liin tambang pada Nomor: 163 k7MB 0.47DIS 478 orang 163 k7MB 0.47DIS 478 orang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Ziitu tambang Nomor: 163 k7MB 0.47DIS 638 orang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Baraham mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Ziitu tambang Nomor: 163 k7MB 0.47DIS 63 orang 163 k7MB 0.47DIS 63 orang 163 k7MB 0.47DIS 63 orang 163 k7MB 0.47DIS 64 ora						
Wawancara oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, penggugat dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan						
Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengunpulan tanda tangan kuasa bukum dengan pengugugat dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomor:146/G/2021/PT UN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Dalam artikel tersebut, tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Dalam artikel tersebut, didak mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan antara fakta yang didukung dengam data and Pengegrak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Seimbang Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terkait sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggarak Penggerak						
Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa hukum dengan pengugusat dan an gugatan telah terdaftar di Kepanteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTU Mengan nomor: 146/G/2021/PT UN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait pemberian Liin tambang pada Nomor: 163:K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 lalu.  Berita Tidak Mencampurka mantar fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan an Takta dan Opini Mencampurkan hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenaj objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Liin tambang Nomor: 163:K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Tidak Seimbang Seimbang Seimbang Dalam artikel tersebut, terkait pemberian Liin tambang Nomor: 163:K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, terkait pemberian Liin tambang Nomor: 163:K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Hal tersebut terkitat dari sisti tambang Nomor: 163:K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.						Penggerak Sangihe
Faktualitas Berita  Fidak Berita  Amencampurka  Amara fakta dan opini  Amencampurkan  Amara fakta dan opini  Amara fakta dan o				K		
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Ketidakberpihak an						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka na Hakta yang didukung dengan data hasii wawancara dari dari wartawan, delanikan, akta yang didukung dengan data hasii wawancara dari akta yang didukung dengan data hasii wawancara dari dari wartawan, delanikan, akta yang didukung dengan data hasii wawancara dari akta yang didukung dengan data hasii wawancara dari terkait pemberiari Lini tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak Sumber Berita  Ketidakberpihak an  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sisi tanggaan Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Hatia dan Opini  Mencampurka n Hatia Hatia dan Opini  Mencampurka n Hatia Hatia dan Opini  Menc					4	
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Faktu alitas Dojini  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Faktualitas Berita  Seimbang Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangishe Sawa Island (SSI) yaitu Samsared Barahama Menteri Energi dan Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangishe Sawa Island (SSI) yaitu Samsared Barahama Menteri Energi dan Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangishe Sawa Island (SSI) yaitu Samsared Barahama Menteri Energi dan Mencampurkan Melainkan, fakta yang Melainkan,						
Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka an Wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sawisea Keputusan Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sawisea Menteri Erergi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Lin tambang Palvaria dari  Berita  Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang Opini  Berita  Melainkan, fakta Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapa Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas  Mencampurk an Fakta dan Opini  Dalam artikel tersebut, idak mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan, didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163 K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak		-				
Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta atau PTUN dengan nomor:146/G/2021/PT UN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait pemberian Lzin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 talu.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai sobjek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, terlihat dari sumber berita Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak	7					
Retidakberpihak an Berita  Ketidakberpihak belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						· I · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Berita Galam atrikel tersebut, tidak mencampurkan antara fakta dan opini didukung dengan data dairi wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan dala dari engenai objek sengketa Keputusan Menteri Ernergi dan Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Ernergi dan Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Ernergi dan Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Ernergi dan Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Ernergi dan Dalam atrikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya diliha dari sisi tanggapan Penggerak						-
UN tentang objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 lalu.  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka na Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Asil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita  Ketidakberpihak Seimbang  Ketidakberpihak an Sumber Berita Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak Seimbang  Ketidakberpihak an  Sumber Daya Mineral atau ESDM Melainkan, fakta dan opini dari wartawan, engenai objek sengketa Keputusan Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						nomor:146/G/2021/PT
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Meainkan, fakta yang didukung dengan data basil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai Opiek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkati pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Sumber Daya Mineral atau ESDM terkaît pemberian Izin tambang pada Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021 lalu.  Faktualitas Berita Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan n Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Tidak Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisit tanggapan Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor:  163.K/MB.04/DIB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Berita  Ketidakberpihak Sumber Berita  Tidak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurka an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Halinkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wavancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak	1					
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini Mencampurka n Fakta dan Opini Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak an  Sumber Berita  Seimbang  Seimbang  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari pengegrak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Berita  Seimbang Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari pengegrak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Penggerak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Penggerak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu	1					
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Sawasared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak an  Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurka antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari sarghand (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Faktualitas Berita  Faktualitas Berita  Tidak Mencampurk an Fakta dan Opini  Mencampurkan n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak an  Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Faktualitas Berita  Fakta dan Opini  Mencampurka an Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Ketidakberpihak an  Sumber Berita  Seimbang  Tidak Seimbang  Dalam artikel tersebut, tidak mencampurkan antara fakta dan opini dari wartawan, Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Sawe Island (SSI) yaitu Samsared Barahama Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Tidak Seimbang  dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						1 tanggal 29 Januari
Berita    Mencampurk an Fakta dan Opini						
An Fakta dan Opini  Mencampurka n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Berita  Ketidakberpihak Sumber Berita  Seimbang  Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Netidakberpihak an   Sumber an   Seimbang				Berita	_	_
Mencampurka n Fakta dan Opini  Melainkan, fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an  Seimbang  Seimbang  Berita  Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
n Fakta dan Opini didukung dengan data hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak					-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Opini hasil wawancara dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak					_	
Reidakberpihak an Berita  Ketidakberpihak an Berita  Ketidakberpihak an Berita  Reidakberpihak an Berita  Reimbang belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita  Seimbang  Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak					- r	
mengenai objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Seimbang Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak		<b>7</b>				
Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Seimbang Seimbang Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak	4					
terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang						
tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/202 1 tanggal 29 Januari 2021.  Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang dalam artikel tersebut, belum seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut,  Berita Tidak Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						e
Ketidakberpihak an Sumber Berita Seimbang Dalam artikel tersebut,  Berita Tidak Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
an Berita Tidak Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						2021.
Seimbang dalam penyampaian berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak			Ketidakberpihak			
berita. Hal tersebut terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak			an	Berita		
terlihat dari sumber berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak					Seimbang	
berita wawancara hanya dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
dilihat dari sisi tanggapan Penggerak						
tanggapan Penggerak						
The same same same						Sangihe Save Island

						(SSI) yaitu Samsared
						Barahama, Seharusnya,
						Manado Post harus
						menghadirkan semua
						pihak yang terlibat
						dalam pemberitaan
						masyarakat dan pihak
						terduga yaitu PT. TMS
						(Tambang Emas
						Sangihe).
				Luas	Seimbang	Dalam artikel tersebut,
				Kolom	Tidak	terdapat unsur luas fisik
				K	Seimbang	kolom bersifat <b>belum</b>
						berimbang di platform
						media online Manado
						Post. Di mana, dalam
						artikel tersebut hanya
						memberikan banyak
						kesempatan yang sama
						pada semua narasumber
4						dai pihak Masyarakat
						dalam menjelaskan
						konflik yang terjadi di
						Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel tersebut,
					Tidak Ada	sudah <b>ada</b> menjelaskan
						isi artikel berdasarkan
						Identitas narasumber
						dari Penggerak Sangihe
						Save Island (SSI) yaitu
						Samsared Barahama
						<mark>untuk m</mark> encegah bias
						informasi dan
	l .					manipulasi
				Kompetensi	Pelaku	Dalam artikel tersebut,
					Langsung	terdapat unsur
						kontribusi pelaku
						langsung, yaitu sudah
						menjelaskan
						permasalahan pada
						isi artikel berdasarkan
						dari
						pihak langsung yaitu
						Penggerak Sangihe
						Save Island (SSI) yaitu
		<i>A</i>			D 1 1 = : : :	Samsared Barahama.
	4				Pelaku Tidak	Dalam artikel tersebut,
					Langsung	terdapat unsur
		-				kontribusi pelaku
			7			tidak langsung, yaitu
						sudah menjelaskan
						permasalahan pada isi
						artikel berdasarkan dari
						pihak tidak langsung
						yaitu Warga Kepulauan
						Sangihe, Ketua Majelis
						Hakim Akhdiat
						Sastrodinata dan
						Menteri ESDM.
					Wartawan	Dalam artikel tersebut,
						terdapat unsur
1						kontribusi jurnalis,
						yaitu sudah

			menjelaskan permasalahan pada is artikel berdasarkan dar
			pihak wartawai
			Manado Post yaitu
			Kenjiro Tanos.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Manado Post pada Senin, 23 Agustus 2021 berjudul "PT.TMS menduduki peringkat ketiga dalam proses intervensi warga Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan pernyataan dari narasumber yaitu masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Dengan memperlihatkan penjelasan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) yang menjadi pihak ketiga menggugat siding intervensi aks<mark>i penolakan d</mark>ari warga di Sangihe. Di mana isi gugatan yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Kementerian ESDM RI terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Dalam isi gugatan tersebut menyebutkan bahwa kontrak Kerjasama PT.TMS dengan Pemerintah harus dibatalkan karena dapat merusak sumber daya alam Pulau Sangihe. Kemudian digugat oleh sejumlah warga Kabupaten Kepulauan Sangihe di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memasuki babak baru. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama yang diwawancarai pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021. Dalam wawancara tersebut perwakilan SSI (Save Sangihe Island) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil sidang yang telah ditetapkan pada Kamis 19 Agustus 2021

lalu di PTUN Jakarta. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Akhdiat Sastrodinata telah mengabulkan permohonan dari pihak PT Tambang Mas Sangihe (TMS) untuk melawan gugatan dari warga Pulau Sangihe yang menuntut PT. TMS karena pertambangan secara ilegal. Di mana, permohonan dari pihak PT TMS telah dikabulkan oleh PTUN melalui Majelis Hakim yang memimpin perkara tersebut sehingga PT TMS menjadi Tergugat II Intervensi melawan warga Kepulauan Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Manado Post sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Di mana, pengumpulan tanda tangan kuasa penggugat terhadap 468 orang penggugat dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan nomor:146/G/2021/PTUN.Jkt, dengan objek sengketa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021. Pernyataan dari perwakilan SSI (Save Sangihe Island) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Dalam isi berita tersebut

ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) yang menggugat masyarakat Sangihe yang melakukan aksi penolakan. Di mana isi gugatan yang dilakukan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Kementerian ESDM RI terkait pemberian Izin tambang Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 lalu. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Manado Post sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan sisi tanggapan Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama, Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita yang tidak objektif karena hanya menggunakan narasumber tunggal. Seperti pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan,

Manado Post hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Seharusnya, Manado Post juga harus memberikan kesempatan yang sama pada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Penggerak Sangihe Save Island (SSI) yaitu Samsared Barahama. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Warga Kepulauan Sangihe, Ketua Majelis Hakim Akhdiat Sastrodinata dan Menteri ESDM. Serta, dari pihak wartawan Manado Post yaitu Kenjiro Tanos. Hal ini juga

sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4.2.4. Analisis Objektivitas Berita Konflik Tambang Emas Sangihe pada Antaranews

# 1. Berita 1

Judul : Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam

proses intervensi Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil

Bupati Kepulauan Sangihe

**Sumber** : Antaranews

**Tanggal** : 14 Juni 2021

Tabel 4. 16 Analisis Objektivitas Berita 1 (Antaranews)

-						
No	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
1	Konflik	14 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	antar	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	warga di					sesuai antara
	sekitar					judul dengan isi
	TMS					berita dalam
	menjadi					artikel yang di
	pihak					publikasi ke
	ketiga					platform media
	dalam					online tersebut.
	proses	7				Di mana judul
	intervensi					menggambarkan
	Kepulauan	$\Lambda$				peristiwa konflik
	Sangihe,	/ 1		-		tetapi isi
	terungkap	' V				pemberitaan
	hasil					hanya sedikit
	otopsi					membahas
	Wakil					konflik tambang
	Bupati					emas Sangihe
	Kepulauan					yang memiliki
	Sangihe					kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Konflik antar
						warga di sekitar
						TMS menjadi
						pihak ketiga
						dalam proses
						intervensi

						Kepulauan
						Sangihe,
						terungkap hasil
						otopsi Wakil
						Bupati
						Kepulauan
				D 4	D't	Sangihe".
				Pencantuman	Dicantumkan	Dalam artikel
				Waktu	Tidak Dicantumkan	tersebut, sudah mencantumkan
					Dicantumkan	waktu dengan
						lengkap semua
						tanggal baik
				R (		pemuatan
						maupun
						wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita. Hal
						tersebut ditandai
						dengan
						tanggapan yang
						disampaikan oleh Kepala Biro
						Penerangan
						Masyarakat
						(Karopenmas)
						Divisi Humas
						Polri Brigen Pol.
						Yaitu Rusdi
						Hartono dan
		\				Kepala Bidang
						Humas Polda Sulut AKBP
	1					yaitu Jules
11.	Ī					Abraham yang
						diwawancarai
						pada hari Senin,
						14 Juni 2021.
				Data	Ada	Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
						ada unsur sudah
						ada data pendukung berita
		· ·			_	pada artikel
		7				platform media
		_				online
	-	Λ				Antaranews
		/1				berisi hasil
		V				wawancara oleh
			17		•	Kepala Bidang
						Humas Polda
						Sulut AKBP yaitu Jules
						yaitu Jules Abraham yang
						diwawancarai
						pada hari Senin,
						14 Juni 2021. Di
						mana, Jules
						mengungkapkan
						bahwa tidak ada
						tanda-tanda luka
						yang disengajai
L	1					di tubuh korban

						atau mantan
						Wakil Gubernur
						Sulawesi Utara
						dengan hasil
						sementara dari
						tim forensik
						Polda Sulawesi
						Utara penyebab
						kematian Wakil
						Gubernur
						Sulawesi Utara
						yaitu penyakit
						menahun atau
				Faktualitas	m: 1. 1.	tua.
				Berita	Tidak	Dalam artikel
				Бепа	Mencampurkan Fakta dan	tersebut, terdapat <b>tidak</b>
					Opini dan	mencampurkan
		-			Mencampurkan	antara fakta
					Fakta dan Opini	dan opini dari
					i akta dan Opini	wartawan.
4						Melainkan, fakta
						yang didukung
						dengan data hasil
						wawancara oleh
						Kepala Biro
						Penerangan
						Masyarakat
						(Karopenmas)
						Divisi Humas
						Polri Brigen Pol.
		\				Yaitu Rusdi Hartono dan
						Kepala Bidang
						Humas Polda
	ľ					Sulut AKBP
						yaitu Jules
						Abraham.
			Ketidakberpihakan	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
				Berita	Tidak	tersebut, belum
					Seimbang	seimbang dalam
						penyampaian
						berita terlihat
		\				dari sumber
		2				berita
		7				wawancara hanya dilihat dari
		A				•
	•					sisi tanggapan Kepala Biro
		7 /				Penerangan
						Masyarakat
						(Karopenmas)
						Divisi Humas
						Polri Brigen Pol.
						Yaitu Rusdi
						Hartono dan
						Kepala Bidang
						Humas Polda
						Sulut AKBP
						yaitu Jules
						Abraham
						mengenai hasil
						autopsi kematian
1	1	I				Wakil Gubernur

						Helmud Hontong
						dengan konflik
						tambang emas
						Sangihe.
						Seharusnya,
						Antaranews
						harus
						menghadirkan
						semua pihak
						yang terlibat
						dalam
						pemberitaan
				$\mathbf{D}$		seperti dari pihak
				T '		masyarakat dan pihak terduga
					) / .	yaitu PT. TMS
			V			(Tambang Emas
						Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
					Tidak	tersebut, terdapat
					Seimbang	unsur luas fisik
4					J	kolom bersifat
						belum
						<b>berimbang</b> di
						platform media
						online
						Antaranews. Di mana, dalam
						mana, dalam artikel tersebut
						hanya
						memberikan
						banyak
						kesempatan yang
						sama pada semua
						narasumber dari
						pihak
						Pemerintah dalam
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di
						Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
					Tidak Ada	tersebut, sudah
						ada menjelaskan
		/				isi artikel
	7					berdasarkan
	•		/		1	Identitas
	ı	/ /		1		narasumber dari, Kepala Biro
						i isebaia Biro l
		V	GI			Penerangan
		* V	G			Penerangan Masyarakat
		· V	G			Penerangan
		· V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas)
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules
		* V	G			Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP

				informaci dan
				informasi dan manipulasi
		Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel
		Kompetensi	T Claku Langsung	tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari
	J E	RS		pihak langsung yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda
				Sulut AKBP yaitu Jules
				Abraham.
			Pelaku Tidak	Dalam artikel
			Langsung	tersebut, terdapat
				unsur <b>kontribusi</b>
				pelaku tidak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan
1 1 1				pada isi artikel berdasarkan dari
				pihak tidak
3				langsung yaitu Kapolres, Dokter, Menteri
				ESDM dan tim forensik Polda
				Sulawesi Utara.
0			Wartawan	Dalam artikel tersebut, terdapat unsur <b>kontribusi</b>
				<b>jurnalis</b> , yaitu
	G	JN	A)	sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak wartawan
				Tim wartawan Antaranews
Sumban (Data Banditi 20	22)			yakni Laily Rachmawaty.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Senin, 14 Juni 2021 berjudul "Konflik antar warga di sekitar TMS menjadi pihak ketiga dalam proses intervensi Kepulauan Sangihe, terungkap hasil otopsi Wakil Bupati Kepulauan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan penyebab meninggalnya Gubernur Sulawesi Utara yaitu Helmud Hontong di Pesawat yang diautopsi oleh tim forensik Polda (Polisi Daerah) Sulawesi Utara dikarenakan penyakit menahun. Bukan karena ada kaitannya dengan penolakan tambang emas Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan headline bersifat menarik dan har<mark>us menjad</mark>i intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa hasil autopsi sudah selesai dan segera diberi keterangan dari Kapolres dan Dokter yang melakukan autopsi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham yang diwawancarai pada hari Senin, 14 Juni 2021. Dalam wawancara dari kedua narasumber tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang disengajai di tubuh korban dengan hasil sementara dari tim forensik Polda Sulawesi penyebab kematian Wakil Gubernur Sulawesi Utara yaitu penyakit menahun. Pernyataan dari kedua narasumber yaitu Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan f<mark>akta dalam **faktualitas berita. Mel**ainkan berita</mark> tersebut berisi fakta yang diduku<mark>ng dengan dat</mark>a hasil wawancar<mark>a dari n</mark>arasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang hasil autopsi dari jenazah mantan Gubernur Sulawesi Utara yaitu Helmud Hontong. Di mana menurut tim forensik Polda Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa kematian Helmud Hontong karena penyakit menahun. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta

dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari sisi tanggapan sisi tanggapan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham mengenai hasil autopsi kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong dengan konflik tambang emas Sangihe. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Seperti dari pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, perwakilan dari masyarakat dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari Masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigen Pol. Yaitu Rusdi Hartono dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Jules Abraham. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Kapolres, Dokter, Menteri ESDM dan tim forensik Polda Sulawesi Utara. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Laily Rachmawaty. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 2. Berita 2

Judul : Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau

Sangihe

Sumber : Antaranews
Tanggal : 21 Juni 2021

Tabel 4. 17 Analisis Objektivitas Berita 2 (Antaranews)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0		e				
2	Aktivis	21 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	menyerukan	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	pencabutan					sesuai antara
	izin					judul dengan isi
4	pertambanga					berita dalam
	n emas di					artikel yang di
	pulau					publikasi ke
	Sangihe					platform media
						online tersebut.
						Di mana judul
						menggambarka
						n peristiwa
						konflik tetapi isi
						pemberitaan
						<mark>ha</mark> nya sedikit
						membahas
						konflik tambang
						emas Sangihe
						yang memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
						yang berjudul
						"Aktivis
						menyerukan
						pencabutan izin
						pertambangan
						emas di pulau
						Sangihe".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
		Λ.	,		Dicantumkan	mencantumka
		/ 1 /				<b>n</b> unsur
						pencatuman
						waktu dengan
						lengkap semua
						tanggal baik
						pemuatan
						maupun
						wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita.
						Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
						disampaikan
						oleh Aktivis
	l .	<u> </u>				5.011 / IRU VIS

						Badan
						Eksekutif
						Mahasiswa
						(BEM)
						Nusantara
						Provinsi Sulut
						dan Aktivis
						Save Sangihe
						yaitu Jull yang
						diwawancarai
						pada hari Senin,
				D	Ada	14 Juni 2021.
				Data		Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
						ada unsur sudah
	4					ada data
						pendukung
						berita pada
						artikel platform
						media online
					`	Antaranews
4						berisi hasil
						wawancara oleh
						Aktivis Badan
						Eksekutif
						Mahasiswa
						(BEM)
						Nusantara
						Provinsi Sulut
						dan Aktivis
						Save Sangihe
						yaitu Jull
						mengatakan
						bahwa para
						aktivis
						menuntut
		1				Pemprov Sulut
						dengan
						mencabut izin
						tambang emas
						Sangihe karena
						bertentangan
						dengan
						sejumlah
						undang-undang
						(UU) yang
		_				berlaku di
	<b>4</b>	Λ.	,			Indonesia
		/1/		_		terkait
				1		Pengelolaan
						Wilayah Pesisir
						dan Pulau kecil-
						kecil serta
						Perlindungan
						dan Pengelolaan
						Lingkungan
						Hidup dengan
						pertambangan.
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurka	tersebut,
					n Fakta dan	terdapat tidak
					Opini	mencampurka
					Mencampurkan	n antara fakta
					Fakta dan Opini	dan opini dari
Ь	l			l	- and can opin	Fin unit

					wartawan.
					Melainkan,
					fakta yang
					didukung
					dengan data
					hasil
					wawancara oleh
					Aktivis Badan
					Eksekutif
					Mahasiswa
					(BEM)
					Nusantara
					Provinsi Sulut
			K (		dan Aktivis
					Save Sangihe
	4				yaitu Jull
					mengatakan
					bahwa alasan
					para Aktivis
					menentang
					tambang emas
4					Sangihe untuk
					PT. TMS
					(Tambang Emas
					Sangihe) telah
					melanggar
					hukum izin
					pertambangan
					yang sudah
					ditetapkan oleh Pemerintah.
		Vatidalsharnihalsa	Cumbon	Caimbana	Dolom ortileal
		Ketidakb <mark>erpihaka</mark>	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
		Ketidakberpihaka n	Sumber Berita	Tidak	tersebut, tidak
				Seimbang Tidak Seimbang	tersebut, tidak seimbang
Т				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam
Т				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian
П				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat
П				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat
T Z				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara
Z				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif
Z				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa
7				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
7	\$ P			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara
	507			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut
	501			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis
	0			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe.
	SA			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya,
	5			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews
	5			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus
	SA			Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS
				Tidak	tersebut, tidak seimbang dalam penyampaian berita terlihat dari sumber berita wawancara dilihat dari sisi tanggapan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe. Seharusnya, Antaranews harus menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan seperti pihak Pemerintah dan pihak terduga

Validitas  Atribusi  Kompetens					T TZ 1	G : 1	D.1
Validitas					Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
Luas fisik kolom bersifat belum berimbang di platform media online   Antaranews. Di mana. dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama kepada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangibe.    Validitas							
Validitas						seimbang	
Validitas Atribusi Ada menjelaskan konflik yang terajadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah menjelaskan konflik yang terajadi di Sangihe.  Tidak Ada Dalam artikel berdasarkan lidentitas marasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (ØEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencepalaskan jada ti artikel berdasarkan lidentitas marasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (ØEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencepalaskan pada ti artikel berdasarkan lidentitas marasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (ØEM) Nusantara Provinsi Sulut dan manipulaskan pada ti artikel berdasarkan lidentitas batan ti artikel berdasarkan lidentitas batan ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada ti artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu waktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Validitas Atribusi Ada  Validitas Atribusi Ada  Tidak A							
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tidak Ada Manasiwa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan manipulasi dan manipulasi hasi afrikel berdasarkan leentasa Provinsi Sulut dan manipulasi dan manip							
Antaranews, Di mana, dalam artikel tersebut hanya memberikan banyak kesempatan yang sama kepada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangibe.  Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tidak Ada dada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulfa dan manjulasi Manasiswa (BEM) Rispanda dari mangulasi pelaku langsung yaitu sudah menjelaskan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu kativis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Validitas  Atribusi  Ata  Tidak Ad							
Validitas							
hanya memberikan banyak kesempatan yang sama kepada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel serabut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulot dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi dan manipulasi dan manipulasi pelaku langsung vaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Waliditas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Ada  Tidak Ada  Tidak Ada  Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Nusantara  Provinsi Sulot dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi untuk mencegah bias informasi dan manipulasi untuk mencegah bias informasi dan menjelaskan pada isi artikel berdasarkan dari pihak dan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Belaku Langsung  Pelaku Langsung  Balam artikel berdasarkan dari pihak dan menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak dari							
Validitas  Atribusi  Validitas  Atribusi  Ada  Tidak At							
kesempatan yang sama kepada narasumber dari pihak masyarakat saja dalam mehjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe  Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara  Kompetensi Pelaku Langsung Komtribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu sudah menjelaskan							
Validitas  Atribusi  Atribusi  Tidak Ada  Ti					K (		
Validitas							
Validitas		1					
Validitas Atribusi Ada palam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktuvis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung terjadi di Sangihe.  Kompetensi Pelaku Langsung terjadi di Sangihe.  Kompetensi Pelaku Langsung terjadi di Sangihe, and permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Validitas Atribusi Ada Tidak Ada Tersebut, sudah adan menjelaskan konflik yang terjadi Sangihe:  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas marasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulint dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.  Validitas Atribusi Ada Dalam artikel tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan dari Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi dan manipulasi kersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak dan gisung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara						~	
Validitas							
Validitas							
Validitas	4						
Validitas							
Validitas							
Tidak Ada  Tidak Ada  tersebut, sudah ada menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi dan manipulasi Langsung  Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribus pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara				Y			
Rompetensi				Validitas	Atribusi		
menjelaskan isi artikel berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi dan manipulasi pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara						Tidak Ada	
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Berdasarkan Identitas narasumber dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi dan manipulasi Itersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Identitas narasumber dari, Aktivis Badan   Eksekutif Mahasiswa (BEM)   Nusantara   Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi   Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan   Eksekutif Mahasiswa (BEM)   Nusantara		1					
Rompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
dari, Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung Pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Kompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Mahasiswa (BEM) Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Competensi  Rompetensi Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara		l					
Kompetensi Pelaku Dalam artikel Langsung Perwinsi Sutut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Nusantara Provinsi Sulut dan Aktivis Save Sangihe untuk mencegah bias informasi dan manipulasi  Kompetensi Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Rompetensi  Rompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi  Kompetensi  Rompetensi  Pelaku Langsung  Pelaku Langsung  Pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi Pelaku Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi Pelaku Langsung Dalam artikel tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi Pelaku Langsung Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Kompetensi Pelaku Langsung tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Langsung  tersebut, terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
terdapat unsur kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara					Kompetensi		
kontribusi pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara						Langsung	
pelaku langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara		•		,			
langsung, yaitu sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara					_ =		
sudah menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
menjelaskan permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara			4	17		•	
permasalahan pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara				7	/ 1 4		
pada isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
berdasarkan dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
dari pihak langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
langsung yaitu Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara							
Mahasiswa (BEM) Nusantara							
(BEM) Nusantara							
Nusantara							
Provinsi Sulut							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							Provinsi Sulut

					dan Aktivis
					Save Sangihe.
				Pelaku Tidak	Dalam artikel
				Langsung	tersebut,
				Lungsung	terdapat unsur
					kontribusi
					pelaku tidak
					langsung, yaitu
					sudah
					menjelaskan
					permasalahan
					pada isi artikel
					berdasarkan
			K (		dari pihak tidak
					langsung yaitu
	1				Pemprov Sulut.
				Wartawan	Dalam artikel
					tersebut,
				•	terdapat unsur
				4	kontribusi
					<b>jurnalis</b> , yaitu
4					sudah
					menjelaskan
					permasalahan
					pada isi artikel
					berdasarkan
					dari pihak
					wartawan Tim
					wartawan
					Antaranews
					yakni Adwit B
	(D ( D	1:4: 2022)			Promono.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

## **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Senin, 21 Juni 2021 berjudul "Aktivis menyerukan pencabutan izin pertambangan emas di pulau Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan alasan para aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) melakukan aksi penolakan izin tambang emas di Sangie di Kantor Pemerintah Sulawesi Utara. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari

berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull yang diwawancarai pada hari Senin, 21 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, perwakilan SSI (Save Sangihe Island) menyebutkan perizinan tambang emas di Sangihe yang dilakukan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar undang-undang tentang izin tambang dan akan berdampak pada kelangsungan kehidupan masyarakat di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) bertentangan dengan sejumlah undang-undang (UU) terkait pengelolaan pesisir di wilayah pesisir atau wilayah pulau-pulau kecil salah satunya Pulau Sangihe. Serta, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan dari narasumber yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber.

Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) terhadap Pulau Sangihe yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dan habitat yang dilindungi akan terancam punah. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita tidak objektif karena narasumber yang digunakan tunggal. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti dari pihak Pemerintah dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan,

Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak masyarakat saja yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang saama kepada semua narasummber yang terlibat dengan menghadirkan pihak dari Pemerintah dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

## 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur validitas yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari perwakilan Gerakan SSI (Save Sangihe Island) yaitu Jull. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut dan pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Adwit B Promono. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam

Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

## 3. Berita 3

Judul : Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati

di Kepulauan Sangihe

Sumber : Antaranews
Tanggal : 29 Juni 2021

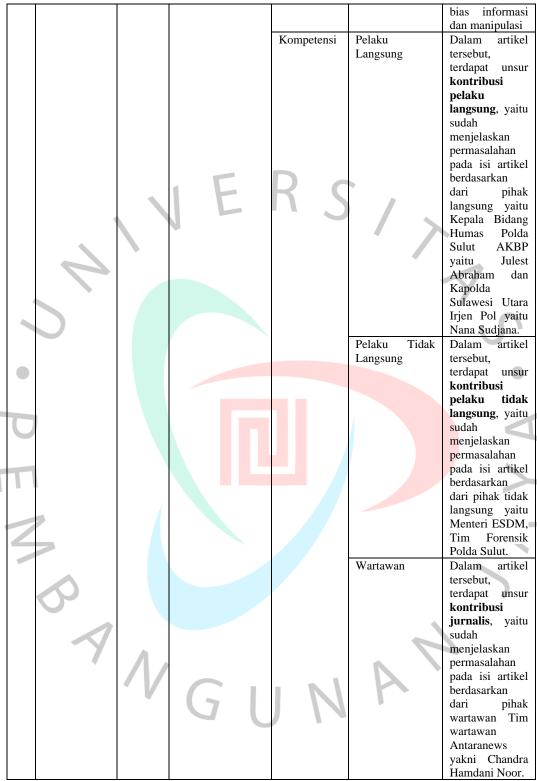
Tabel 4. 18 Analisis Objektivitas Berita 3 (Antaranews)

			<b>5.</b> .			<b>D</b> 11
N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0		e				
3	Polda Sulut	29 Juni	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	Menghentika	2021		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	n Kasus					<b>sesuai</b> antara
	Konflik					judul dengan isi
	Kematian					berita dalam
	Wakil Bupati					artikel yang di
	di Kepulauan					publikasi ke
	Sangihe					platform media
	Ü					online tersebut.
		1				Di mana judul
						menggambarka
						n peristiwa
						konflik tetapi isi
						pemberitaan
						hanya sedikit
						membahas
						konflik tambang
						emas Sangihe
						yang memiliki
						kesesuaian
						dengan isi berita
		// /				yang berjudul
				1		"Polda Sulut
						Menghentikan
					-	Kasus Konflik
						Kematian Wakil
						Bupati di
						Kepulauan di
						Sangihe".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
				11 Waktu	Dicantumkan	mencantumka
					Dicantunkan	<b>n</b> waktu dengan
						_
						lengkap semua tanggal baik
						66
						pemuatan
						maupun

	1	ı				
						wawancara
						semua
						narasumber
						dalam berita.
						Hal tersebut
						ditandai dengan
						tanggapan yang
						disampaikan
						oleh Kepala
						Bidang Humas
						Polda Sulut
						AKBP yaitu
						Julest Abraham,
			1	K (		Kapolda
						Sulawesi Utara
	4					Irjen Pol yaitu
						Nana Sudjana
						yang
						diwawancarai
						pada hari
					· ·	Selasa, 29 Juni
						2021.
				Data	Ada	Dalam artikel
				Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
			Ì			ada unsur sudah
						ada data
	)					pendukung 💮
						berita pada
						artikel platform
						media online
						Antaranews
						berisi hasil
						wawancara oleh
		`				Kapolda
11	1					Sulawesi Utara
						Irjen Pol yaitu
						Nana Sudjana
						yang diwawancarai
						pada hari
						Selasa, 29 Juni
						2021. Di mana,
						Nana
						mengungkapka
					_	n bahwa hasil
						autopsi
						kematian
		Λ.				Helmud
		/1/				Hontong tidak
		4 V		1 11		menemukan
						racun atau luka
				1 1 3		yang disengajai
						oleh pihak
						manapun.
						Melainkan,
						kematian
						Helmud
						dikarenakan
						penyakit
						menahun yang
						dideritanya dari
						dulu.
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurka	tersebut, tidak

			n Fakta dan Opini	mencampurka n antara fakta
			Mencampurkan	dan opini dari
			Fakta dan Opini	wartawan.
				Melainkan, fakta yang
				didukung
				dengan data hasil
				wawancara oleh
				Kepala Bidang Humas Polda
				Humas Polda Sulut AKBP
	1 -	R		yaitu Julest
				Abraham dan
	V			Kapolda Sulawesi Utara
				Irjen Pol yaitu
				Nana Sudjana
				tentang kematian Wakil
				Gubernur
				Helmud
				Hontong yang dinilai janggal
				oleh masyarakat
				karena sebelum
				meninggal
				Helmud sempat mengirim surat
				penolakan
				penambangan
				emas di Sangihe.
				Sehingga
				mengakibatkan
				konflik yang terjadi oleh
				masyarakat
				Sangihe karena
				dapat mengancam
				Sumber daya
				alam
				penghidupan masyarakat
				sekitar yang
1 / A			~ \	sebagai petani
	Ketidakberpihaka	Sumber	Seimbang	dan nelayan.  Dalam artikel
V	n Kendakberpinaka	Berita	Tidak	tersebut, <b>tidak</b>
	7	1 1 1	Seimbang	seimbang
				dalam penyampaian
				berita. Hal
				tersebut terlihat
				dari sumber berita
				wawancara
				dilihat dari sisi
				tanggapan
				Kepala Bidang Humas Polda
				Sulut AKBP

						yaitu Julest
						Abraham dan
						Kapolda
						Sulawesi Utara
						Irjen Pol yaitu
						Nana Sudjana.
						Seharusnya,
						Antaranews
						harus
						menghadirkan
						semua pihak
			_			yang terlibat
						dalam
				K (	la de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	pemberitaan
						seperti dari
						pihak
						Masyarakat dan
						pihak terduga yaitu PT. TMS
						(Tambang Emas
					4	Sangihe).
	_			Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
				Luas Kololil	Tidak	tersebut,
					Seimbang	terdapat unsur
					Seminang	luas fisik kolom
						bersifat <b>belum</b>
						berimbang di
						platform media
						online
						Antaranews. Di
						mana, dalam
						artikel tersebut
						hanya
						memberikan
						banyak
_						kesempatan
						kepada
						narasumber dari
						pihak
						Pemerintah saja
						dalam
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
			v anaitas	2 10 10 USI	Tidak Ada	tersebut, sudah
		Λ.			Tiun Tiua	ada
		/1/				menjelaskan isi
		1 V		1 11		artikel
						berdasarkan
			7	1 1 4		Identitas
				_		narasumber dari
						Kepala Bidang
						Humas Polda
						Sulut AKBP
						yaitu Julest
						Abraham dan
						Kapolda
						Sulawesi Utara
						Irjen Pol yaitu
						Nana Sudjana
	1	l				untuk mencegah



Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur Akurasi dalam kesesuaian judul dengan isi berita. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Selasa, 29 Juni 2021 berjudul "Polda Sulut Menghentikan Kasus Konflik Kematian Wakil Bupati di Kepulauan Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan alasan dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara menghentikan penyelidikan kasus kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong yang dinilai janggal oleh masyarakat Sangihe. Kejanggalan bermula saat Helmud mengirim surat penolakan penambangan emas di Sangihe sebelum kematiannya di pesawat pada tahun 2021 lalu. Hal tersebut mengakibatkan konflik yang terjadi antara masyarakat Sangihe dengan PT TMS (Tambang Emas Sangihe) karena dapat menganca<mark>m sumber day</mark>a alam Pulau Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan hasil penyelidikan kematian Wakil Gubernur Helmud Hontong sudah keluar dan masyarakat diharapkan berlapang dada pada hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Polda Sulawesi Utara. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana yang diwawancarai pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Dalam wawancara tersebut, tim foreksik mengungkapkan bahwa hasil autopsi kematian Helmud Hontong tidak menemukan racun atau luka yang disengajai. Melainkan, kematian Helmud dikarenakan penyakit menahun yang dideritanya. Pernyataan dari narasumber yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana dan Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran pertambangan secara illegal yang dilakukan di Sulawesi Utara, salah satunya PT. (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari narasumber diatas, **TMS** memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada

mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat dengan menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

## 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur kompetensi sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP yaitu Julest Abraham dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol yaitu Nana Sudjana. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Menteri ESDM, Tim Forensik Polda Sulut. Serta, dari pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Chandra Hamdani Noor. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4. Berita 4

Judul : Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas

ilegal di Sulut

**Sumber** : Antaranews

**Tanggal**: 19 September 2021

Tabel 4. 19 Analisis Objektivitas Berita 4 (Antaranews)

N	1	Judul	Periode	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	_						
4		Tim	19	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
		gabungan	Septemb		Judul dan Isi	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
		mendisiplink	er 2021				<b>sesuai</b> antara
		an warga					judul dengan isi
	4	terhadap					berita dalam
		penambangan					artikel yang di
		emas ilegal di					publikasi ke
		Sulut					platform media
							online tersebut.
П							Di mana judul
							menggambarkan
							peristiwa
							konflik tetapi isi
							pemberitaan
							<mark>ha</mark> nya sedikit
							membahas
							konflik tambang
							emas Sangihe
1							yang memiliki
			/				kesesuaian
							dengan isi berita
							yang berjudul
							"Tim gabungan
1							mendisiplinkan
							warga terhadap
							penambangan
							emas ilegal di
						_	Sulut".
					Pencamtum	Dicantumkan	Dalam artikel
					an Waktu	Tidak	tersebut, sudah
			$\Lambda_{\lambda}$			Dicantumkan	mencantumkan
							waktu dengan
							lengkap semua
							tanggal baik
							pemuatan
							maupun
							wawancara
							semua
							narasumber
							dalam berita.
							Hal tersebut
							ditandai dengan
							tanggapan yang
							disampaikan
							oleh Dirjen
							Pranologi
							Kehutanan dan

Data Ada Dendukung Tidak Ada te	Tata Lingkungan PKTL) KLHK Vakni Ruandra Sugardiman Vang liwawancarai Vada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur vudah ada data
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	PKTL) KLHK vakni Ruandra Sugardiman vang liwawancarai bada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah ada data
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	PKTL) KLHK vakni Ruandra Sugardiman vang liwawancarai bada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah ada data
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	vakni Ruandra Sugardiman vang liwawancarai bada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	Sugardiman yang liwawancarai bada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	rang liwawancarai pada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	liwawancarai pada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	pada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah <b>ada</b> data
Data Ada Data Pendukung Tidak Ada te	Minggu, 19 September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	September 2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah <b>ada</b> data
Data Ada Data Pendukung Tidak Ada te	2021. Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah <b>ada</b> data
Data Ada Dendukung Tidak Ada te	Dalam artikel ersebut, erdapat unsur udah <b>ada</b> data
Pendukung Tidak Ada te	ersebut, erdapat unsur udah <b>ada</b> data
te si p	erdapat unsur udah <b>ada</b> data
St p	udah <b>ada</b> data
p	
	endukung
	perita pada
	rtikel platform
	nedia online
	Antaranews
	perisi hasil
	vawancara
	nasyarakat
	Sangihe dan
	Dirjen Pranologi
	Kehutanan dan
	Tata
	Lingkungan
	PKTL) KLHK
	akni Ruandra
	Sugardiman
	<mark>n</mark> engatakan tim
	gabunngan
	enegak Hukum
	Gakkum)
	Kementrian
	Lingkungan
	Hidup dan
	Kehutanan
	KLHK) dan
	Polisi Sulut
	oekerja sama
	nenyelidiki izin
	ambang emas di
	Sangihe. Dalam
	zin
	peroperasinya
	PT. TMS telah
	nenandatangani
	zin tambang
	elauas 42.000
	Hektar atau
	ebagian pulau
	Sangihe.
	Menurut
	Jndang-Undang
	Nomor 1 Tahun
	2014, pulau-
	oulau dengan
	uas daratan
	turang dari
	2.000 km <sup>2</sup>
	lianggap pulau
<u>                                       </u>	cecil dan tidak

	T		T	1		
						dapat
						ditambang. Oleh
						karena itu, PT.
						TMS (Tambang
						Emas Sangihe)
						melakukan.
						pelanggaran UU
						tentatng izin
						Pertambangan di Indonesia.
				Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
				Berita	Mencampurk	tersebut, <b>tidak</b>
				Derita	an Fakta dan	mencampurka
		1		L C	Opini	n antara fakta
					Mencampurka	dan opini dari
	4				n Fakta dan	wartawan.
					Opini	Melainkan
					- 1	berita tersebut
						berisi opini dari
						Masyarakat
						Sangihe dan
-				1		juga fakta yang
				1		didukung
				1		dengan data
						hasil wawancara
						oleh Dirjen
						Pranologi
						Kehutanan dan Tata
						Lingkungan
						(PKTL) KLHK
						yakni Ruandra
						Sugardiman
						mengenai PT.
						TMS (Tambang
						Emas Sangihe)
		/				telah melanggar
						hukum dengan
						Undang-Undang
						Nomor 1 Tahun
						2014 yang
						berlaku terhadap
						pulau-pulau
						dengan luas daratan kurang
						dari 2000 km2
						tergolong pulau
		1				kecil dan tidak
	*			_		dapat ditambang
		'V		1 11		oleh pihak
						manapun.
			Ketidakberpihak	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
			an	Berita	Tidak	tersebut, belum
					Seimbang	seimbang dalam
				1		penyampaian
				1		berita. Hall
				1		tersebut terlihat
						dari sumber
						berita
				1		wawancara
				1		hanya dilihat dari sisi
				1		tanggapan
						masyarakat
	<u> </u>			I .		masyarakat

						Sangihe dan
						Dirjen Pranologi
						Kehutanan dan
						Tata
						Lingkungan
						(PKTL) KLHK
						yakni Ruandra
						Sugardiman.
						Seharusnya,
						Antaranews
						harus
						menghadirkan
						semua pihak
				7 (		yang terlibat
						dalam
	4					pemberitaan
		,				seperti pihak
						masyarakat dan
					•	pihak terduga
						yaitu PT. TMS
						(Tambang Emas
4						Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
					Tidak	tersebut,
					Seimbang	terdapat unsur
					Sembang	luas fisik kolom
						bersifat <b>belum</b>
						berimbang di
						platform media
						online
						Antaranews. Di
	/					
						mana, dalam
						artikel tersebut
						hanya
		· ·				memberikan
						kesempatan
						kepada
						narasumber dari
						pihak
						Pemerintah saja
						dalam
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di
					_	Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
					Tidak Ada	tersebut, sudah
		Λ.			2100011100	ada
				_		menjelaskan isi
		1 V		1		artikel
		-		1/1		berdasarkan
						Identitas
						narasumber dari,
						masyarakat
						Sangihe dan
						Dirjen Pranologi
						Kehutanan dan
						Tata
						Lingkungan
						(PKTL) KLHK
						yakni Ruandra
1			l	I		Sugardiman.unt
						uk mencegah

Kompetensi Rompetensi Rompetensi Rompetensi Rompetensi Pelaku Langsung Pelaku Langsung, yatu masyarakat Sangiba Dirjen Prana Kebutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sungiba Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Rompetensi Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelaku di langsung Neneri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorar Jendral Gak dan Baresi Mabes Pola Wartawan Dalam ar tersebaya Lersebaya Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorar Jendral Gak dan Baresi Mabes Pola Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelakatan Jangsung Menteri Lingkungan Jangsung Menteri Lingkungan Jangsung Jangs		1	ı		T		
Kompetensi Pelaku Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung Langsung, yatu Langsung, yatu masyarakat Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardimat Langsung Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardimat Langsung Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Hidup Kehutanan Jana Hidup Kehutan							
Langsung tersebut, terdapat ut kontribusi pelaku langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak lang, yaitu masyarakat Sangibe Dirjen Pranc Kehutanan Tara Lingkungan (PKTL) Ki yakni Rus Sugardiman Lingkungan (PKTL) Ki yakni Rus Sugardiman Langsung yaitu terdapat ut kontribusi pelaku ti langsung, yaitu terdapat ut kontribusi pelaku ti langsung, yaitu terdapat ut kontribusi pelaku ti langsung, yaitu terdapat ut kontribusi pelaku ti langsung, yaitu kerdapat ut kontribusi pelaku ti langsung, yaitu kerdapat ut kontribusi pelaku ti langsung yaitu kerdapat ut kontribusi pelaku ti langsung yaitu kerdapat ut kontribusi pelaku ti langsung yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi jurialis, yaitu kerdapat ut kontribusi pelaku masa kerdapat ut kerd					Vomnotonsi	Dololau	
terdapat u kontribusi pelaku langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Prana Kehutanan Tara Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman (PKTL) ki yakni Rua Sugardiman kehutanan Tara Lingkungan (PKTL) ki yakni Rua Sugardiman kehutanan Tara Lingkungan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak i langsung yanden permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak i langsung yakni Nurbaya, Direktorat Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresl Mabes Polit witerdapat u kontribusi jurnalis. ya dalah menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan sudah menjelaskan sudah menjelaskan menjelaskan					Kompetensi		
kontribusi pelaku langsung. yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Prant Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Langsung tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. yaitu kontribusi pelaku ti langsung. Yaitu kontribusi pelaku ti langsung yaitu kontribusi jurnalis. yaitu kontribusi kontribusi yaitu kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontr						Langsung	
pelaku langsung. yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rug Sugardiman Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rug Sugardiman Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rug Sugardiman tersebut, terdapat u kontribusi pelaku (tangsung yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yaudah menjelaskan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah padakan permasalaha pada isi ar berdasarkan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar berdasarkan pihak (langsung yautah pada isi ar ber							
Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Sugardimaa Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak langsung, y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Ualam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							
sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rang Sugardiman  Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Usatu kontribusi pelak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yadah menjelaskan menjelaskan berdasarkan pihak ti langsung yadah menjelaskan berdasarkan pihak terdapat u kontribusi jurnalis, yadah menjelaskan							langsung, yaitu
permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak langyaitu masyarakat Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Langsung tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, yakni yakni pelaku ti langsung, yakni kontribusi pelaku ti langsung, yakni kontribusi pelaku ti langsung, yakni kontribusi pelaku ti langsung, yakni kontribusi pelaku ti langsung, yakni kontribusi pelaku ti langsung yakni kontribusi pelaku ti langsung yakni Nurbaya, Direktorat Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jenter Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jenter Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jenter Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jenter Lingkungan Hidup Kehutanan yakni kutanan kutanan yakni kutanan ku							
pada isi ar berdasarkan pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Prana Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI Sugardiman Langsung waki Langsung waki Langsung waki Langsung waki kerdapat u kontribusi pelaku ti langsung. Yasudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yaki waki waki waki waki waki waki waki w							menjelaskan
berdasarkan pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Prama Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) Ki yakni Rua Sugardiman Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelak ti langsung yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yakni Rua derdasarkan pihak ti langsung yakni kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat dendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelak dan Baresi Mabes Polri Direktorat dendral Gak dan Baresi Mabes Polri Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yakni kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi kontribusi							permasalahan
pihak lang yaitu masyarakat Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Tata Lingkungan dersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung ya sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung ya sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung ya kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, ya sudah menjelaskan menjelas				_			pada isi artikel
wartawan  Wartaw							berdasarkan dari
masyarakat Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Tidak Pelaku Langsung tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, yadah menjelaskan permasalahah pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yang Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Politi Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yadah menjelaskan menjelaska					7 (		pihak langsung
Sangihe Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman  Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku ti langsung pelaku ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihaka ti langsung yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yadah menjelaskan							
Dirjen Pranc Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Tidak Pelaku Langsung tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, yadah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yannal Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yadah menjelaskan		1		l			
Kehutanan Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Tidak Pelaku Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, ya sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung ya Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yaudah menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan							Sangihe dan
Tata Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung yaku terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak t langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan  Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yaudah menjelaskan							Kehutanan dan
Lingkungan (PKTL) KI yakni Rua Sugardiman Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Usontribusi pelaku ti langsung, yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung yakni Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yaudah menjelaskan							
Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan  Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							
Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung Tidak Pelaku Langsung  kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak t langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan	4						(PKTL) KLHK
Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Tidak Pelaku Langsung  Wontribusi pelaku ti langsung, sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak t langsung Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan  Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							yakni Ruandra
Langsung tersebut, terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polit Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							Sugardiman.
terdapat u kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							
kontribusi pelaku ti langsung, y sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak ti langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Bares Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan						Langsung	
pelaku tilangsung, yaudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak tilangsung yamenteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Bares Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, yaudah menjelaskan menjelaskan							
langsung, sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak talangsung yang Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gakadan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat uakontribusi jurnalis, yandah menjelaskan menjelaskan							
sudah menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak tangsung yang Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat uakontribusi jurnalis, yandah menjelaskan menjelaskan							
menjelaskan permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak t langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							
permasalaha pada isi ar berdasarkan pihak t langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Bares Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan		1					menjelaskan
berdasarkan pihak talangsung ya Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gakadan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat uakontribusi jurnalis, yadah menjelaskan							permasalahan
pihak t langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							pada isi artikel
langsung y Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							berdasarkan dari
Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							
Lingkungan Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresl Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							
Hidup Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							
Kehutanan yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresi Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							Hidup dan
yakni Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresl Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							
Nurbaya, Direktorat Jendral Gak dan Baresl Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							yakni Siti
Direktorat Jendral Gak dan Baresl Mabes Polri  Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan							
dan Baresi Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							Direktorat
Mabes Polri Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							Jendral Gakkum
Wartawan Dalam ar tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan							dan Bareskrim
tersebut, terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan		7	Λ			Wartewen	
terdapat u kontribusi jurnalis, y sudah menjelaskan		_	///			w artawan	
kontribusi jurnalis, sudah menjelaskan			1 V		1 4		
jurnalis, sudah menjelaskan							
sudah menjelaskan				7			jurnalis, yaitu
							sudah
parmacalaha							menjelaskan
							permasalahan
							pada isi artikel
							berdasarkan dari
pinak warta							pihak wartawan Tim wartawan
Antaranews							
yakni							
							Muhammad
Zukfikar							

			Budisantoso
			Budiman.

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

#### **Rincian Analisis**

## 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19 September 2021 berjudul "Tim gabungan mendisiplinkan warga terhadap penambangan emas ilegal di Sulut". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi dari tim gabunngan Penegak Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para aktivis menertibkan izin tambang emas yang illegal terjadi di Sulawesi Utara. Tambang emas yang melanggar UU pertam<mark>bangan di In</mark>donesia adalah <mark>PT. TM</mark>S (Tambang Emas Sangihe) dan PT. Bulawan Daya Lestari karena akan berdampak pada lingkungan. Hal ini juga sejalan d<mark>engan pernya</mark>taan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman yang diwawancarai pada hari Minggu, 19 September 2021. Dalam wawancara tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyebutkan aktivitas pertambangan di Sangihe beroperasi tanpa izin pertambangan di hutan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur data pendukung berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa tim gabungan dari Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK menghentikan secara paksa tambang ilegal. Di mana, tim gabungan meminta penghentian segala aktivitas sesuai dengan undangundang berlaku yaitu melalui nomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2021 yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan yaitu Siti Nurbaya. Pernyataan dari narasumber yaitu Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam **faktualitas berita**. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dalam isi berita tersebut ditandai dengan penjelasan dari narasumber diatas mengatakan berdasarkan fakta tentang pelanggaran pertambangan secara illegal yang dilakukan di Sulawesi Utara, salah satunya PT. TMS (Tambang Emas Sangihe). Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode

etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

# 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur **ketidakberpihakan** yaitu belum ada keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari **sumber berita** wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari Direktur Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Salah satu faktor penyebab berita tidak objektif karena narasumber yang digunakan tunggal. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak Masyarakat dan pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber dengan menghadirkan pihak dari masyarakat dan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita

disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Anda dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Jendral (Dirjen) Planologi Kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) KLHK yaitu Ruandha Agung Sugardiman. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu Pemprov Sulut, Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan yaitu Siti Nurbaya. Serta, pihak wartawan Tim wartawan Antaranews yakni Muhammad Zulfikar. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 5. Berita 5

Judul : Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan

PT Tambang Mas Sangihe

**Sumber** : Antaranews

**Tanggal** : 29 Oktober 2021

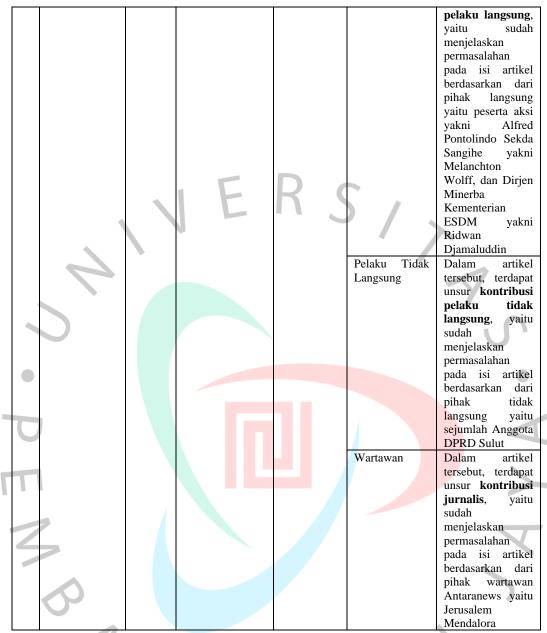
Tabel 4. 20 Analisis Objektivitas Berita 5 (Antaranews)

N	Judul	Period	Dimensi	Kategori	Indikator	Penjelasan
0	`	e				
5	Ratusan anak	29	Akurasi	Kesesuaian	Sesuai	Dalam artikel
	muda	Oktobe		Judul dan	Tidak Sesuai	tersebut, sudah
	Kepulauan	r 2021		Isi		<b>sesuai</b> antara judul
	Sangihe					dengan isi berita
	menolak					dalam artikel yang
	mengoperasik					di publikasi ke
	an PT					platform media
	Tambang Mas					online tersebut. Di
	Sangihe					mana judul
						menggambarkan
						peristiwa konflik
						tetapi isi
						pemberitaan
						hanya sedikit
						membahas konflik
						tambang emas
						Sangihe yang
						memiliki
'						kesesuaian dengan
						isi berita yang
	7					berjudul "Ratusan
						anak muda
						Kepulauan
						Sangihe menolak
						mengoperasikan
						PT Tambang Mas
				D 4	D't	Sangihe".
				Pencantuma	Dicantumkan	Dalam artikel
				n Waktu	Tidak	tersebut, sudah
		A			Dicantumkan	mencantumkan
	•	// /				waktu dengan
		/ 1/		- 1		lengkap semua tanggal baik
						66
			<b>\7</b>			pemuatan maupun
						wawancara semua
						narasumber dalam berita. Hal
						tersebut ditandai
						dengan tanggapan
						yang disampaikan oleh Dirien
						oleh Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni Ridwan
						Djamaluddin,
L	1					peserta aksi yakni

		1		T	
					Alfred Pontolindo
					dan Sekda
					Sangihe yakni
					Melanchton Wolff
					yang
					diwawancarai
					pada hari Jumat,
					29 Oktober 2021.
			Data	Ada	Dalam artikel
			Pendukung	Tidak Ada	tersebut, sudah
					ada unsur data
					pendukung berita
					pada artikel
					platform media
			)	) / .	online Antaranews berisi
					tanggapan atas penolakan izin
					tambang emas di
					Sangihe juga
					disampaikan oleh
					Dirjen Minerba
					Kementerian
					ESDM yakni
					Ridwan
					Djamaluddin).
					Menurut Ridwan
					Djamaludin, PT.
					TMS (Tambang
					Emas Sangihe)
					tidak mengenal
					pulau dan
					masyarakat
	1				Sangihe. Di mana, Pemerintah telah
1 1					Menerbitkan
		/			Peraturan
					Produksi
					No.163.K / MB.04
					/ DJB / 2021
					seluas 42.000
					hektar area
					konsesi
					lingkungan hidup
			Faktualitas	Tidak	Dalam artikel
			Berita	Mencampurk	tersebut, tidak
	7	A		an Fakta dan	mencampurkan
	•	// /		Opini	antara fakta dan opini dari
		7 1/	1	Mencampurkan Fakta dan	opini dari wartawan.
				Opini dan	Melainkan berita
				Opini	tersebut berisi
					fakta yang
					didukung dengan
					data hasil
					wawancara. Dapat
					dilihat dalam
					artikel tersebut
					berisi tanggapan
					peserta aksi yakni
					Alfred
					PontolindoSekda
					Sangihe yakni
					Melanchton

		,				1	
							Wolff, dan Dirjen
							Minerba Kementerian
							ESDM yakni
							Ridwan
							Djamaluddin
							Menurut Ridwan
							Djamaluddin,
							Pulau Sangihe
							bukanlah daerah
							yang cocok untuk
							pertambangan. Luasnya juga
					P		hanya 736km2
					1)		dan PT. TMS
					)	/ /	(Tambang Emas
							Sangihe)
							menambang
						_	setengah dari 42.000 hektar
							Pulau Sangihe.
	4	*					Kemudian akan
							dikelola oleh
							PT.TMS selama
							33 tahun dari
							tahun 2021 hingga 2054. Sama
							halnya dengan
							Undang-Undang
							Nomor 1 Tahun
		1					2014, pulau-pulau
							dengan luas
							kurang dari 2000 km2 tergolong
	Т						pulau-pulau kecil.
1							Berkaitan dengan
							industri
1							pertambangan,
							habitat endemik terancam dan
							kelangsungan
							hidup masyarakat
							terancam.
				Ketidakberpihak	Sumber	Seimbang	Dalam artikel
				an	Berita	Tidak	tersebut, terdapat
						Seimbang	unsur ketidakberpihak
			1				an yaitu sudah
					==		mencoba
							keseimbangan
			-	<b>L7</b>		,	dalam
				7			penyampaian berita. Hal
							tersebut terlihat
							dari sumber berita
							wawancara hanya
							dilihat dari sisi
							tanggapan Koordinator
							Gerakan SSI
							(Save Sangihe
							Island), yakni Jull
							Takaliuangyang,
							Sekda Kabupaten

						Kepulauan
						Sangihe, yakni
						Harry Wollf,
						Dirjen Minerba
						Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin.
						Seharusnya, Antaranews harus
						menghadirkan
						semua pihak yang
						terlibat dalam
				R (		pemberitaan
						seperti pihak
					•	terduga yaitu PT.
						TMS (Tambang
				T TT 1	g : 1	Emas Sangihe).
				Luas Kolom	Seimbang	Dalam artikel
					Tidak Seimbang	tersebut, terdapat unsur luas fisik
					Sombung	kolom bersifat
						belum
						<b>berimbang</b> di
						platform media
						online
						Antaranews. Di mana, dalam
						artikel tersebut
						hanya
						memberikan
						kesempatan
						kepada
	1					narasumber yaitu
11						dari 2 pihak
		,				Pemerintah dan 1 Pihak masyarakat
						dalam
						menjelaskan
						konflik yang
						terjadi di Sangihe.
			Validitas	Atribusi	Ada	Dalam artikel
	(P)				Tidak Ada	tersebut, sudah
						<b>ada</b> menjelaskan isi artikel
						berdasarkan
		_				Identitas
		1				narasumber dari
		/1/		=		peserta aksi yakni
		' V				Alfred Pontolindo
			(7			SekdaSangihe
			7			yakni Melanchton
						Wolff, Dirjen Minerba
						Minerba Kementerian
						ESDM yakni
						Ridwan
						Djamaluddin
						untuk mencegah
						bias informasi dan
				W '	D-1-1.	manipulasi
				Kompetensi	Pelaku Langsung	Dalam artikel tersebut, terdapat
					Lungoung	unsur <b>kontribusi</b>
	1	1	I			Honer iougi



Sumber: (Data Peneliti, 2022)

### **Rincian Analisis**

#### 1. Akurasi

Berdasarkan tabel analisis objektivitas berita diatas, maka dapat dilihat dari unsur **Akurasi** dalam **kesesuaian judul dengan isi berita**. Dalam berita tersebut ditandai dengan adanya isi artikel Antaranews pada Minggu, 19 September 2021 berjudul "Ratusan anak muda Kepulauan Sangihe menolak mengoperasikan PT Tambang Mas Sangihe". Di mana judul dalam berita tersebut sudah sesuai dengan isi berita yang di publikasikan. Dalam isi artikel tersebut menggambarkan peristiwa

konflik tetapi isi pemberitaan hanya sedikit membahas konflik tambang emas Sangihe. Dengan memperlihatkan sudah menjelaskan aksi dari tim gabunngan Penegak Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para aktivis menertibkan izin tambang emas yang illegal terjadi di Sulawesi Utara. Tambang emas yang melanggar UU pertambangan di Indonesia adalah PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dan PT. Bulawan Daya Lestari karena akan berdampak pada lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Suhendang dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan isu penulisan *headline* bersifat menarik dan harus menjadi intisari berita. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, harus mendeskripsikan persoalan pokok peristiwa.

Selanjutnya, dalam artikel tersebut juga terdapat unsur **pencatuman waktu**. Di mana terlihat sudah mencantuman waktu dengan jelas publikasi artikel dan tanggapan wawancara yang disampaikan oleh peserta aksi yakni Alfred Pontolindo yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa para demonstrasi menolak kehadiran PT.TMS (Tambang Emas Sangihe) akan merusaki hutan lindung Sahendarumang sebagai sumber airyang menghidupi masyarakat Sangihe dan satwa endemik akan terancam punah. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Adiwidjaja dalam Fadil (2020, p. 32) yang menegaskan bahwa kegiatan jurnalistik harus menerapkan pedoman pada rumus 5W+1H dalam proses mencari informasi sebagai bahan untuk diolah menjadi berita. Oleh karena itu, pencantuman waktu mencerminkan akurasi suatu berita.

Lalu, dilihat dari unsur **data pendukung** berita pada artikel platform media online Antaranews sudah ada didukung oleh data. Di mana berisi tanggapan wawancara yang disampaikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Di mana, Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Produksi No.163.K / MB.04 / DJB / 2021 seluas 42.000 hektar area konsesi lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT. TMS agar segera dicabut karena sudah melanggar norma hukum.

Data yang didukung lainnya dari Harry Wollf yang diwawancarai pada hari Jumat, 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, menyebutkan bahwa selama

ini masyarakat Sangihe sudah merasa nyaman tinggal di Pulau Sangihe karena sumber penghidupan yang melimpah dan dapat manfaatin baik di darat ataupun di laut. Perlu diketahui bahwa rata-rata pekerjaan masyarakat di Sangihe berprofesi sebagai nelayan dan petani. Artinya, situasi yang awalnya nyaman bagi Masyarakat Sangihe menjadi terusik karena kehadiharan pertambangan yang akan melakukan pertambangan seluas 42.000 hektar atau separuh luas wilayah Sangihe. Kemudian, akan dikelola selama 33 tahun lamanya atau dimulai dari tahun 2021 sampai 2054. Pernyataan dari narasumber yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian (ESDM) dan Sekda Pemprov Sulut merupakan data fakta yang didukung untuk menambah kredibilitas pemberitaan dan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 26) yang menegaskan bahwa setiap wartawan harus menjelaskan berapa pakar yang sebenarnya bicara. Di mana seorang wartawan penting meningkatkan berita dengan didasari oleh data. Hal ini karena data termasuk salah satu bagian dari fakta yang didukung untuk mencerminkan akurasi suatu berita lebih berimbang.

Terakhir, jika dilihat dari keseluruhan isi berita yang dianalisis tidak mencampurkan antara opini dan fakta dalam faktualitas berita. Melainkan berita tersebut berisi fakta yang didukung dengan data hasil wawancara dari narasumber. Di mana, dapat dilihat dalam artikel tersebut berisi tanggapan peserta aksi yakni Alfred PontolindoSekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin, pulau Sangihe bukan wilayah yang tepat untuk melakukan penambangan. Terlebih, Pulau Sangihe bukanlah daerah yang cocok untuk pertambangan. Luasnya juga hanya 736km2 dan PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) menambang setengah dari 42.000 hektar Pulau Sangihe. Kemudian akan dikelola oleh PT.TMS selama 33 tahun dari tahun 2021 hingga 2054. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku terhadap pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km2 tergolong pulau kecil dan tidak dapat ditambang oleh pihak manapun. Berkaitan dengan industri pertambangan, habitat endemik terancam dan kelangsungan hidup masyarakat terancam. Pernyataan dari narasumber diatas, memperlihatkan pemberitaan lingkungan dari Antaranews sudah objektif karena sudah bisa memisahkan antara

fakta dan opini dari wartawan dan narasumber sehingga mencerminkan akurasi dari suatu berita. Hal ini juga sejalan dengan kode etik jurnalistik dari Panjaitan dan Effendi dalam Kurniawan (2014, p. 33) yang menegaskan bahwa dalam meliput dan mendistribusikan informasi, jurnalis Indonesia perlu menghormati dan menyeimbangkan asas praduga tak bersalah, selalu memastikan kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme, daripada mencampuradukkan fakta dengan opini. Sehingga berita yang dipublikasikan bersifat objektif karena tidak mencampurkan fakta dan opini dari wartawan.

## 2. Ketidakberpihakan

Dilihat dari unsur ketidakberpihakan yaitu keberimbangan dalam penyampaian berita yang terlihat dari sumber berita wawancara. Di mana, sumber berita hanya dilihat dari tanggapan Koordinator Gerakan SSI (Save Sangihe Island), yakni Jull Takaliuangyang, Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Harry Wollf, Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Seharusnya, Ketika menulis berita yang objektif, wartawan harus, bila memungkinkan, memperkenalkan semua pihak yang disebutkan dalam berita tersebut. Lebih baik narasumber yang digunakan dikaitkan seperti pihak terduga yaitu perwakilan dari PT. Tambang Emas Sangihe, dan Pemerintah ESDM. Supaya pemberitaan mencerminkan ketidakberpihakan objektivitas. Meskipun menunjukkan hasil keberimbangan tidak sampai 100 persen narasumber yang terlibat. Masalah ketidakberpihakan tidak bisa diukur secara matematis, tapi lebih mengacu kepada semua narasumber yang terlibat dalam pemberitaan itu.

Sedangkan, dilihat dari ukuran **luas fisik kolom**, belum seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber. Melainkan, Antaranews hanya memberikan banyak kesempatan pada pihak narasumber dari pihak Pemerintah saja yaitu Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Lalu, dari pihak masyarakat hanya satu narasumber saja yaitu peserta aksi yakni Alfred Pontolindo. Seharusnya, Antaranews juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat dengan menghadirkan pihak terduga yaitu PT. TMS (Tambang Emas Sangihe) dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Sangihe.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 25) yang menegaskan bahwa terlalu sering perimbangan berita disalahartikan dengan makna nyaris matematis, seperti tulisan bisa dinilai bagus jika ada kutipan yang sama jumlahnya dari kedua belah pihak. Padahal, seperti yang diketahui wartawan, seringa da lebih dari dua pihak dalam sebuah masalah.

#### 3. Validitas

Kemudian, dilihat dari unsur **validitas** yaitu keabsahan informasi pada artikel tersebut sudah cukup jelas karena setiap informasi yang ditujukan didukung oleh data, selain itu pula data yang disuguhkan valid dan jelas sehingga pembaca dapat memahami kronologi kejadian dan dampak dari bencana dengan baik. Setelah Setelah membaca seluruh berita yang dianalisis, Antaranews dapat menyajikan dan mengonfirmasi atribusi sumber yang jelas. Di mana identitas nama narasumber yaitu peserta aksi yakni Alfred Pontolindo, Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan validitas atribusi sumber berita cukup objektif untuk mencegah bias informasi dan manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Irvan (2020, p. 33) yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Sehingga dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi dan objektif.

Lalu, jika dilihat dari unsur **kompetensi** sumber berita sudah menjelaskan isi artikel berdasarkan dari pihak langsung yaitu terdiri dari Alfred Pontolindo Sekda Sangihe yakni Melanchton Wolff, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yakni Ridwan Djamaluddin. Sedangkan, pihak tidak langsung yaitu sejumlah Anggota DPRD Sulut. Serta, dari pihak wartawan Antaranews yaitu Jerusalem Mendalora. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kovach dan Rosenteil dalam Indira (2013, p. 33) yang menegaskan bahwa seorang wartawan harus melangkah jauh dari meja dan berusaha melihat semuanya dengan melakukan pengecekan silang informasi ke berbagai sumber dan mau turun ke lapangan. Sehingga berita yang dipublikasikan dapat mencerminkan validitas dan objektif.

# 4.3. Komparasi Objektivitas Pemberitaan Tambang Sangihe pada Media Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews

Penelitian ini sejak awal ditujukan untuk menganalisis objektivitas pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe pada portal berita Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Berdasarkan hasil analisis data menunjukan antara Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews, memiliki objektivitas yang berbeda. Perbandingan objektivitas dari keempat situs berita online tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 21 Perbandingan Keempat Media

No	Dimensi	Detik.com	Mongabay.co.id	Manado Post	Antaranews
1	Akurasi	Pemilihan	Pemilihan kalimat	Pemilihan	Pemilihan
		kalimat untuk	untuk judul	kalimat untuk	kalimat untuk
		judul	menggambarkan	judul	judul
		menggambarka <mark>n</mark>	data dan dampak	menggambarkan	menggambarkan
		data ya <mark>ng</mark>	dari peristiwa	pernyataan dari	peristiwa
		didukung dari <mark>isi</mark>	konflik yang	narasumber	<mark>ko</mark> nflik tetapi isi
		pemberitaan.	dijelaskan dalam	yang dijelas <mark>kan</mark>	pemberitaan
		Mencantumkan	isi pemberitaan.	dalam isi	hanya sedikit
		lengkap semua	Mencantumkan	pemberitaan.	membahas
		tanggal baik	lengkap semua	Mencantumkan	konflik tambang
		pemuatan dan	tanggal baik	lengkap semua	emas Sangihe.
		wawancara	pemuatan dan	tanggal baik	Mencantumkan
		semua	wawancara semua	pemuatan dan	lengkap semua
		narasumber	narasumber dalam	wawancara	tanggal baik
		dalam berita	berita	semua	pemuatan dan
		Mencantumkan	Mencantumkan	narasumber	wawancara
	· /	nama	nama narasumber	dalam berita	semua
		narasumber dan	dan keterangan	Mencantumkan	narasumber
		keterangan	mengenai latar	nama	dalam berita
		mengenai latar	belakang	narasumber dan	Mencantumkan
		belakang	Tidak	keterangan	nama
		Tidak	mencampurkan	mengenai latar	narasumber dan
		mencampurkan	fakta dan opini dari	belakang	keterangan
		fakta dan opini	wartawan.	Tidak	mengenai latar
		dari wartawan.	Melainkan, fakta	mencampurkan	belakang
		Melainkan, fakta	yang didukung	fakta dan opini	Tidak
		yang didukung	oleh hasil	dari wartawan.	mencampurkan

		oleh hasil	wawancara dari	Melainkan,	fakta dan opini
		wawancara dari	narasumber.	fakta yang	dari wartawan.
		narasumber.		didukung oleh	Melainkan,
				hasil wawancara	fakta yang
				dari narasumber.	didukung oleh
					hasil wawancara
					dari narasumber.
2	Ketidakberpihakan	4 artikel	3 artikel mencoba	2 artikel	1 artikel
_	Tetraukorpinakan	mencoba	berimbang dengan	mencoba	mencoba
		berimbang	menghadirkan	berimbang	berimbang
		dengan	beberapa	dengan	dengan
		menghadirkan	narasumber	menghadirkan	menghadirkan
		beberapa	diantaranya tapi,	beberapa	beberapa
		narasumber.	belum	narasumber	narasumber
4		Tapi, belum	menghadirkan	diantaranya tapi,	diantaranya tapi,
		menghadirkan	semua pihak yang	belum	belum belum
		semua pihak	terlibat dalam isu	menghadirkan	menghadirkan
		yang terlibat	pemberitaan.	semua pihak	semua pihak
		dalam isu	Seharusnya,	yang terlibat	yang terlibat
	\	pemberitaan.	Mongabay.co.id	dalam isu	dalam isu
		Seharusnya,	menghadirkan	pemberitaan.	pemberitaan.
		Detik.com	semua pihak yang	Seharusnya,	Seharusnya,
		menghadirkan	terlibat seperti	Manado Post	Antaranews
		semua pihak	mengahadirkan	menghadirkan	menghadirkan
		yang terlibat	pihak terduga	semua pihak	semua pihak
		seperti	sebagai	yang terlibat	yang terlibat
		mengahadirkan	narasumber yaitu	seperti	seperti
		pihak terduga	PT. TMS	mengahadirkan	mengahadirkan
		sebagai	(Tambang Emas	pihak terduga	pihak terduga
		narasumber yaitu	Sangihe).	sebagai	sebagai
		PT. TMS	1 artikel sudah	narasumber	narasumber
	, y	(Tambang Emas	berimbang dalam	yaitu PT. TMS	yaitu PT. TMS
		Sangihe).	ukuran luas fisik	(Tambang Emas	(Tambang Emas
	4	1 artikel sudah	kolom dengan	Sangihe).	Sangihe).
		berimbang dalam	memberikan	2 artikel sudah	Semua artielum
		ukuran luas fisik	banyak	berimbang	berimbang
		kolom dengan	kesempatan yang	dalam ukuran	dalam ukuran
		memberikan	sama pada semua	luas fisik kolom	luas fisik kolom
		banyak	narasumber	dengan	dengan
		kesempatan yang		memberikan	memberikan
		sama pada semua		banyak	banyak
		narasumber		kesempatan	kesempatan
				yang sama pada	yang sama pada

				semua	semua
				narasumber	narasumber
3	Validitas	Terdapat	Terdapat	Terdapat	Terdapat
		pencantuman	pencantuman	pencantuman	pencantuman
		penyebutan nama	penyebutan nama	penyebutan	penyebutan
		serta gelar	serta gelar jabatan	nama serta gelar	nama serta gelar
		jabatan dari	dari narasumber	jabatan dari	jabatan dari
		narasumber dari	dari pihak	narasumber dari	narasumber dari
		pihak langsung,	langsung, tidak	pihak langsung,	pihak langsung,
		tidak langsung	langsung dan	tidak langsung	tidak langsung
	5	dan wartawan	wartawan	dan wartawan	dan wartawan.
		Tetapi terdapat		*	
		beberapa 2			
		artikel			
4		Antaranews yang			
		belum ada			10
		penyebutan nama			
		wartawan secara			
		lengkap,			
	\	melainkan			
		dengan			
		penyebutan			
		inisial saja.			

Sumber: (Data Peneliti, 2022)

Setelah menganalisis berita konflik tambang emas Sangihe pada keempat media diatas, ditemukan sejumlah perbedaan objektivitas antara media Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Keempat media memenuhi kategori Akurasi, namun demikian setiap media memiliki ciri khas dalam menunjukkan kesesuaian judul dan isi berita. Pada Detik.com Akurasi sangat kuat dengan menampilkan judul yang menunjukkan fakta dan data yang dipaparkan dalam isi berita. Lalu, Mongabay.co.id Akurasi lebih banyak menggunakan judul yang mengarah pada dampak dari konflik yang tergambar dalam isi berita. Kemudian, Manado Post sebagai media lokal Akurasi judul lebih banyak menampilkan penyataan narasumber yang terdapat dalam berita. Sementara Antaranews memilih judul yang menekankan konflik dengan menjelaskan persoalan dari sudut hukum dengan menampilkan narasumber aktivis dan kepolisian. Meskipun judul hanya terdiri dari satu atau dua kalimat pendek, judul

suatu berita harus memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakan (2018, p. 44). Oleh karena itu pada penelitian ini, menunjukkan model Rahma Ida menjadi penting dalam mengukur objektivitas pemberitaan. Hal tersebut karena judul berita sangat penting dalam menentukan keobjektivitasan suatu pemberitaan.

Selanjutnya untuk bagian dimensi pencantuman waktu, keempat media sudah mencantumkan waktu kejadian dan waktu wawancara juga ikut disertakan dalam berita. Sehingga, berita yang dipublikasikan mencerminkan akurasi dari suatu berita. Kemudian, untuk bagian dimensi data pendukung, keempat media sudah ada menjelaskan data yang didukung oleh hasil wawancara dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik tambang emas Sangihe yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat. Menurut Baskoro dalam Fadil (2020, p. 47) tulisan lingkungan yang baik, hendaklah didukung oleh data. Hal itu karena data merupakan suatu fakta yang menambah kredibilitas pemberitaan. Selain itu, menurut Rahma Ida dalam Khotimah (2017, p. 36) juga menyatakan bahwa pencantuman data mencerminkan akurasi dari suatu berita. Sementara itu, untuk bagian dimensi faktualitas berita. Keempat media tidak ditemukan pencampuran antara fakta dan opini dari wartawan dalam penyampaian berita. Melainkan, data yang didukung oleh wawancara dari narasumber yang terlibat dalam konflik tambang emas Sangihe.

Hal tersebut tercantum dalam pelarangan masuknya opini wartawan dalam berita yang sudah ditegaskan dalam kode etik wartawan Indonesia. Kode Etik Wartawan Indonesia menyatakan: "Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. Penafsiran kode etik ini menurut Panjaitan dan Effendi dalam Indira (2013, p. 23), wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyajikan informasi harus bersifat tidak menghakimi dan tidak boleh mencampurkan fakta dan opini pribadinya.

Pada kategori **Ketidakberpihakan**, keempat media sudah berusaha mencoba keberimbangan dalam penyampaian berita sumber berita. Detik.com sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam empat dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Detik.com. Tetapi ada satu artikel yang sumber

beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Mongabay.co.id sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam tiga dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Mongabay.co.id. Tetapi ada dua artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Manado Post sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam dua dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Manado Post. Tetapi ada tiga artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Pada Antaranews sumber berita sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Antaranews. Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Menurut Kovach dan Rosentiel dalam Angga Kurniawan (2014, pp. 44-45) perimbangan berita sering disalahartikan dengan makna. Padahal, seperti y<mark>ang diketahui</mark> yang harus menja<mark>di per</mark>hatian dalam menulis berita yang objektif adalah sedapat mungkin menghadirkan semua pihak yang disinggung dalam pemberitaan itu. Seharusnya, keempat media tersebut dapat menghadirkan pihak terduga agar terjadinya ketidakberpihakan. Pihak yang tidak disinggung dalam keempat media tersebut yaitu perwakilan dari pihak PT. TMS (Tambang Emas Sangihe).

Kemudian, dalam dimensi ukuran luas fisik kolom, Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews sudah mencoba seimbang dalam memberikan banyak kesempatan yang sama pada semua narasumber tanpa membedakan pihak-pihak tertentu. Pada Detik.com ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Detik.com. Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Lalu, pada Mongabay.co.id ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan

Masyarakat dalam satu dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Mongabay.co.id.

Tetapi ada empat artikel yang sumber beritanya memberi peluang yang banyak pada pihak masyarakat dalam pemberitaannya. Selanjutnya, pada Manado Post ukuran luas fisik kolom sudah mencoba seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak Pemerintah dan Masyarakat dalam dua dari lima artikel berita yang dipublikasi oleh Manado Post. Sedangkan, pada Antaranews ukuran luas fisik kolom belum seimbang dalam menghadirkan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik. Melainkan, Antaranews memberi peluang yang banyak pada pihak Pemerintah dalam pemberitaannya. Kelemahan tidak adanya perimbangan itu seharusnya dapat diatasi dengan adanya koordinasi antar wartawan, redaktur, dan koordinator liputan. Sehingga, alasan berita tidak berimbang karena wartawan tidak bisa mengejar sumber lain dapat dihilangkan. Dalam hal ini, koordinator liputan atau wartawan itu sendiri mengkoordinasikan berita yang didapatnya dengan wartawan lain, yang memunginkan bisa mendapatkan perimbangan berita.

Terakhir, pada kategori **Validitas** keempat media sudah mencantumkan penyebutan nama serta gelar jabatan dari narasumber dari pihak langsung, tidak langsung dan wartawan dalam isu pemberitaan konflik tambang emas di Sangihe. Tetapi, Detik.com terdapat dua artikel yang tidak menyebutkan nama wartawan secara lengkap, melainkan hanya inisial saja. Seharusnya, wartawan sebagai sumber informasi harus mencantumkan nama lengkap agar berita yang dipublikasikan lebih valid dan objektif.

Persyaratan untuk mengidentifikasi sumber mengungkapkan kemungkinan merusak informasi dan mencegah sumber membodohi wartawan. Selain itu, dalam pemberitaan harus dihindari pencantuman narasumber jamak yang tidak jelas. Seharusnya dalam pemberitaan itu dijelaskan berapa pakar yang sebenarnya berbicara (Nasution Z., 2015, p. 31). Menurut Kovach dan Rosentiel dalam Emil Meireza Sulaiman (2021, p. 35) menyatakan jangan mengandalkan ucapan pejabat atau laporan berita. Maksud dari pernyataan tersebut adalah mendekatlah sebisa mungkin kepada sumber utama. Bertindaklah sistematis dan carilah bukti yang menguatkan. Keseluruhan berita yang dianalisis dalam penelitian ini mewakili dan

menegaskan atribusi dari sumber yang jelas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa laporan lingkungan sangat objektif karena validitas atribusi sumbernya.

#### 4.4. Diskusi Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu mengenai objektivitas berita menurut Rahma Ida. Dalam ketiga penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil penelitian sudah menerapkan objektivitas pemberitaan berdasarkan metode analisis isi Rahma Ida dengan baik pada portal berita online yang diteliti. Tetapi, portal berita online yang digunakan oleh ketiga penelitian terdahulu hanya menggunakan satu media saja sebagai objek penelitian. Sedangkan, dalam penelitian ini mengukur objektivitas pemberitaan konflik tambang emas Sangihe pada beberapa portal berita online yaitu Detik.com, Mongabay.co.id, Manado Post dan Antaranews. Keempat portal media online yang sudah disebutkan, akan dilihat berdasarkan kepemilikan dan orientasi bisnis medianya.

Dalam penelitian ini, objektivitas berita media mengenai konflik tambang emas Sangihe ditemukan berbeda dalam tingkatan objektivitas yang ditunjukkan dalam kategori objektivitas menurut Rahma Ida yang dominan. Selain itu, orientasi kepemilikan dan bisnis media memengaruhi tingkat objektivitas tersebut. Media Mongabay.co.id sebagai media independen dan berfokus pada isu lingkungan memiliki tingkat objektivitas terkuat. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Mongabay.co.id lebih menonjolkan narasumber aktivis lingkungan dan masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada dampak dari eksploitasi lingkungan. Sehingga jurnalis Mongabay.co.id sudah mempraktikkan pro keadilan dan pro keberlanjutan dalam jurnalisme lingkungan.

Menurut Anderson dalam Indira (2013, pp. 13-14), materi jurnalisme lingkungan baik berita dan jurnalis wajib memiliki materi pengetahuan tentang lingkungan dan nilai budaya dari masyarakat atau kasus lingkungan tersebut. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lain. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada

realitas lingkungan hidup. Lalu, Mongabay.co.id juga sebagai media ruang lingkup lingkungan hidup yang berfokus membahas persoalan lingkungan menjadi salah pendukung objektivitas pemberitaan satu faktor yang dipublikasikan Mongabay.co.id sendiri. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Mongabay.co.id mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Mongabay.co.id sendiri, bersifat independen dan berfokus pada persoalan lingkungan hidup berikut advokasinya yang selalu fokus membahas tentang permasalahan lingkungan. Selain itu, objektivitas berita dari Mongabay.co.id sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Timeliness*, *Impact*, *Conflict* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Detik com menjad<mark>i media denga</mark>n tingkat objektivitas kedua dengan keunggulan pada aspek akurasi. Aktualitas peristiwa menjadi nilai berita yang namun tidak mengulas sampai sangat menoniol dampak. Kategori ketidakberpihakan dan validitas didapati agak lemah karena Detik.com lebih menonjolkan narasumber Pemerintah dan masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada fakta dan data yang tampak pada judul yang ditulis sesuai dengan isi berita. Serta, sudah mencoba mempraktekkan pada jurnalisme lingkungan. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Walaupun, media Detik.com belum menghadirkan ruang lingkungan hidup pada rubrik-rubrik khusus tentang lingkungan, melainkan mencampurkan dengan rubrik-rubrik lainnya. Detik.com memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan, tetapi dalam beberapa hal masih kurang berimbang terkait narasumber. Namun, jurnalisme media Detik.com belum terlalu tampak pro keadilan dan pro keberlanjutan. Melainkan, hanya sebatas menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari agenda setting media saja. Hal tersebut karena berita lingkungan yang bernilai konflik itu berpotensi memberikan keuntungan dengan melibatkan kepentingan yang menghadirkan politik.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Detik.com sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lain. Namun yang membedakan adalah tema sentral dari berita tersebut. Jurnalisme lingkungan hidup selalu berfokus pada peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan hidup. Sedangkan, Detik.com sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaannya bersifat cepat dan terkini dari peristiwa yang terjadi. Hal ini sejalan dengan Romli menyatakan bahwa portal media online yang kita ketahui sekarang ini merupakan kecepatan saat memposting beritanya ini menjadi salah satu tantangan bagi wartawan media massa online untuk terus memegang prinsip objektivitas (Windaryati, 2018, p. 30). Kecepatan yang menjadi tuntutan wartawan media online ini merujuk pada faktor "deadline".

Dengan adanya media online yang menyediakan informasi, termasuk portal berita online. Situasi tersebut mengubah fungsi jurnalisme online yang semula menyajikan berita aktual dan akurat. Salah satu ciri pers dikatakan baik adalah objektif dalam menulis berita. Sesuai dengan kemampuan media massa, berita harus mampu melaporkan isu melalui informasi yang lebih jelas dan berimbang. Di mana pemberitaan dari Detik.com belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi pemberitaannya sudah secara konsisten memberitakan konflik tambang emas Sangihe dari awal sampai akhir. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Detik.com mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Detik.com sendiri, media swasta yang bersifat profit. Selain itu, objektivitas berita dari Detik.com sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Timeliness*, *Impact*, *Conflict* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Antaranews sebagai media Pemerintah menjadi media dengan tingkat objektivitas ketiga dengan berfokus pada aspek hukum dari kasus eksploitasi. serta narasumber utama yang lebih banyak datang pemerintah. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Antaranews lebih menonjolkan

narasumber Pemerintah dan pihak kepolisian. Fokus pemberitaan menekankan pada persoalan dari sudut hukum. Di mana terlihat bahwa jurnalisme media Antaranews belum terlalu tampak pro keadilan dan pro keberlanjutan pada jurnalisme lingkungan. Melainkan, media Antaranews lebih banyak menghadirkan sumber berita dari pihak Pemerintah daripada pihak masyarakat dan pihak terduga. Seharusnya, Antaranews memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber yang terlibat. Terutama, lebih mengedepankan kepentingan lingkungan dan kelompok yang paling terdampak oleh konflik eksloitasi sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan Sambrook dalam Khotimah (2017, p. 22), mendefinisikan objektivitas berita merupakan suatu prinsip dasar yang harus ada pada setiap peliputan isu konflik berita dan menjadi solusi para jurnalis agar tidak subjektivitas pada fakta dan data. Sedangkan berita mempunyai definisi laporan mengenai fakta yang benar-benar terjadi di lapangan dari semua narasumber yang terlibat. Seorang jurnalis dalam menuliskan sebuah berita tentang peristiwa apapun haruslah objektif didalam sebuah pemberitaan itu sangatlah penting ini karena masyarakat sebagai penerima informasi harus mendapatkan haknya memperoleh informasi yang disertai dengan kebenaran dari apa yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Antaranews sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Walaupun di media tersebut belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi Antaranews sudah mencoba memberitakan konflik tambang emas Sangihe dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lainnya. Tetapi yang menjadi perbedaan terletak pada isu sentral dalam pemberitaannya. Lalu, Antaranews juga sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaanya menyajikan berita seputar politik, ekonomi, bisnis, humaniora, gaya hidup, hiburan, sepak bola, otomotif. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Antaranews mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Antaranews sendiri, media BUMN atau milik Pemerintah yang bersifat profit dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Di mana, pemberitaan tentang konflik lingkungan hidup dijadikan sebagai keutungan dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Selain itu, objektivitas berita dari Antaranews sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal

ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Conflict* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.

Media Manado post sebagai media lokal menjadi media dengan tingkat objektivitas keempat. Pemberitaan sangat menekankan aspek proximity, konflik dan human interest dengan narasumber utama dari masyarakat dan aktivis. Keunggulannya pada kategori akurasi dan validitas. Kategori ketidakberpihakan didapati tidak sekuat kategori lain karena Manado Post lebih menonjolkan narasumber dari masyarakat. Fokus pemberitaan menekankan pada judul lebih banyak menampilkan penyataan narasumber masyarakat dan aktivis lingkungan yang terdapat dalam berita. Seharusnya Manado Post harus menempatkan diri dalam posisi netral pada suatu kejadian yang menjadi tolak ukur media tersebut berpihak kepada fenomena berita. Jika media memuat suatu berita dengan tujuan untuk kepentingan segelintir pihak demi untuk mendapatkan opini positif, tidak bisa dikatakan sebagai seorang jurn<mark>alisme karen</mark>a melanggar k<mark>ode etik jurn</mark>alistik (Nasution Z., 2015, pp. 24-25). Objektivitas sendiri merupakan pedoman yang harus dapat diraih oleh semua wa<mark>rtawan media, termasuk jurnalisme</mark> online. Media online yang termasuk media baru ini termasuk kedalam ranah jurnalistik yang bisa kita sebut dengan jurnalistik online.

Namun demikian aspek *fairness* atau ketidakberpihakan tidak tampak karena sedikit melibatkan narasumber pihak lain yang terlibat dalam kasus. Pada dasarnya, seorang jurnalis lingkungan harus berfokus pada isu lingkungan hidup. Tetapi dalam peliputannya harus memperhatikan prinsip imparsialitas dan *fairness* dengan menghadirkan semua pihak yang teribat secara seimbang dan adil. Namun, kurang berimbang pada narasumber lainnya yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks jurnalisme lingkungan, seorang jurnalis harus berpihak kepada lingkungan dan pihak yang paling dirugikan. Sehingga, media yang diperoleh bersifat adil dan berimbang.

Berdasarkan pemaparan diatas, media Manado Post sudah cukup menerapkan objektivitas Rahma Ida pada jurnalisme lingkungan. Walaupun di media tersebut belum menghadirkan rubrik khusus tentang lingkungan, tetapi Manado Post sudah mencoba memberitakan konflik tambang emas Sangihe dalam pemberitaan jurnalisme lingkungan. Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan hidup sama dengan prinsip jurnalisme yang lainnya. Tetapi yang menjadi perbedaan terletak pada isu sentral dalam pemberitaannya. Manado Post juga sebagai media swasta yang ruang lingkup pemberitaanya menyajikan berita lokal dari Provinsi Sulawesi. Hal ini dapat difahami bila melihat orientasi bisnis dan kepemilikan media Manado Post mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Di mana media Manado Post sendiri, media lokal yang bersifat *proximity* dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Di mana, pemberitaan tentang konflik lingkungan hidup dijadikan sebagai keutungan dalam pemberitaan yang dipublikasikan. Selain itu, objektivitas berita dari Manado Post sendiri memiliki kriteria dalam nilai berita lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kovach dan Rosenteil (2014, p. 20), seorang jurnalis harus menerapkan 10 elemen jurnalisme yang harus dimiliki oleh jurnalis. Kriteria tersebut dapat dilihat dari *Conflict, Proximity* dan *Oddity* dalam konflik pemberitaan lingkungan yaitu konflik tambang emas Sangihe.